



PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra LPP RRI merupakan dokumen perencanaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra LPP RRI yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNATIUS HENDRASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1272

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) bersifat independen, netral, dan tidak komersial. RRI bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan sebagai media diplomasi bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RRI menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
2. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik; dan
3. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI merupakan LPP yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, RRI berkomitmen terus menjadi media publik yang tepercaya dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025 - 2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung 8 Misi Program Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RRI berkomitmen kuat mengawal serta menyukseskan berbagai inisiatif dan program unggulan Pemerintah mulai dari Makan Siang Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Danantara sebagai lokomotif investasi Indonesia, hingga program akselerasi pertumbuhan ekonomi 8% — dengan mengedepankan nilai keberagaman, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan Indonesia Emas 2045.

1.1. Kondisi Umum

Transisi kepemimpinan nasional di Indonesia pada tahun 2024, yaitu peralihan dari masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melanjutkan sekaligus memperkuat arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan Asta Cita, yaitu delapan misi utama yang menjadi langkah strategis untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia

Emas 2045", dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, swasembada energi, pemerataan pembangunan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka tersebut, RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, tidak komersial, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, menegaskan perannya sebagai media yang terpercaya sekaligus mitra strategis Pemerintah dalam mensosialisasikan, mengedukasi, dan menggerakkan partisipasi publik demi keberhasilan program-program prioritas nasional.

RRI memiliki jaringan sangat luas di seluruh NKRI dengan jangkauan sekitar 70% dari total populasi penduduk Indonesia. RRI memiliki 69 stasiun siaran dan 30 studio produksi yang tersebar hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dengan cakupan jaringan tersebut, RRI dapat diakses hampir di seluruh daerah di Indonesia, menghubungkan masyarakat dari Sabang hingga Merauke, termasuk mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh media lainnya, hingga mancanegara, baik melalui siaran terestrial maupun *multiplatform*. RRI memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, seimbang, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi penyiaran, RRI terus berinovasi dengan menghadirkan siaran terestrial maupun digital. Selain tetap mempertahankan siaran berbasis frekuensi radio terestrial, RRI berupaya mengadopsi teknologi *Digital Audio Broadcasting* (DAB+) dan *Digital Radio Mondiale* (DRM), yang memungkinkan siaran dengan kualitas suara lebih jernih dan jangkauan lebih luas. Penguatan *multiplatform* juga menjadi strategi utama RRI dalam menjawab kebutuhan *audiens*, dan perkembangan media publik dari *public service broadcasting* (PSB) menjadi *public service media* (PSM) dengan menghadirkan layanan digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses.

Didukung 4.400 pegawai (data per Desember 2024) yang profesional dan berdedikasi, RRI senantiasa berkomitmen untuk menyajikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai radio yang menyandang nama negara, RRI mengemban misi besar untuk menyiarkan informasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga keutuhan bangsa, serta menyebarluaskan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif.

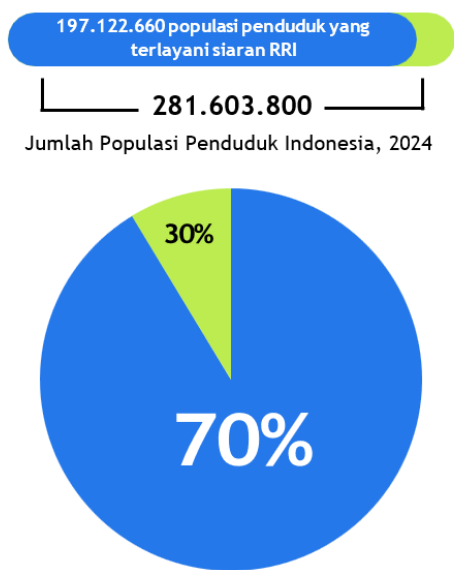
RRI memiliki 4 (empat) kanal programa utama (saluran) dan 1 (satu) programa Siaran Luar Negeri (SLN) atau VOI. Masing-masing kanal siaran tersebut dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh lapisan masyarakat.

- 1) Pro 1, menyajikan informasi dan inspirasi lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat di setiap daerah.
- 2) Pro 2, menjadi wadah kreativitas generasi muda dengan konten yang segar, dinamis, dan inovatif.
- 3) Pro 3, saluran berita nasional yang menghadirkan informasi aktual dan terpercaya.
- 4) Pro 4, berfokus pada pelestarian budaya, memperkenalkan dan melestarikan kekayaan seni serta tradisi nusantara.
- 5) *Voice of Indonesia* (VOI), berfokus pada siaran yang berdimensi diplomasi kebudayaan, perekat sosial dan nasionalisme bagi warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri dan/atau komunitas Internasional.

Melalui berbagai kanalnya, RRI berkomitmen mengawal serta menyukseskan berbagai inisiatif dan program prioritas Presiden mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Danantara sebagai lokomotif investasi Indonesia, hingga program akselerasi pertumbuhan ekonomi 8% nasional dengan

mengedepankan nilai keberagaman, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gambar 1.1 Data Populasi Penduduk yang Terlayani Siaran LPP RRI, 2024 (Direktorat TMB LPP RRI)



RRI telah menjangkau sekitar 70% dari total populasi Indonesia. Capaian ini diperoleh melalui simulasi propagasi sinyal berbasis model ITU-R P.1546 menggunakan perangkat lunak prediksi jangkauan siaran, yang mempertimbangkan daya pancar efektif, ketinggian antenna, kondisi topografi, dan penggunaan lahan. Pendekatan teknis ini menghasilkan data cakupan layanan yang lebih objektif, akurat, dan sesuai kondisi faktual di lapangan, sehingga diperoleh angka 70% total populasi terlayani sebagai baseline populasi pendengar RRI dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya digital, berkembang sangat cepat dan dinamis. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumsi media masyarakat, tetapi juga mengubah ekosistem industri penyiaran secara keseluruhan. Lembaga penyiaran di seluruh dunia tengah berjuang untuk beradaptasi dengan realitas baru ini.

Tantangan menjadi lebih kompleks karena ritme dan fleksibilitas transformasi digital pada LPP tidak se-*agile* lembaga penyiaran swasta yang memiliki model bisnis dan pengambilan keputusan lebih cepat. Meski demikian, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan (*digital inevitability*) yang harus dihadapi LPP agar tetap relevan di tengah disrupsi industri media.

Data *We Are Social* dan *Hootsuite* (Februari, 2025) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa atau sekitar 74.6% dari populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan internet 7 jam 22 menit per hari. Sementara secara global, 67,9% populasi dunia atau sekitar 5,56 miliar orang telah terhubung ke internet, dengan penetrasi penggunaan media digital yang terus meningkat setiap tahun. Tren ini menunjukkan bahwa mayoritas *audiens* kini mengakses informasi melalui kanal digital, sehingga kehadiran dan kinerja lembaga penyiaran di ranah digital menjadi faktor penentu keberlanjutan eksistensinya.

Melalui berbagai inovasi dan penguatan teknologi, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media yang berorientasi pada kepentingan nasional serta menjadi pilar utama dalam penyebaran informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global tersebut, RRI berupaya untuk dapat menjadi media

hybrid, RRI tidak berhenti melakukan pengembangan jangkauan siaran untuk memberikan hak mendapatkan informasi bagi seluruh masyarakat, baik secara terestrial (*mainstream*) maupun digital. Maka, selain berbagai program yang tersedia, RRI juga memperkuat layanannya melalui berbagai pengembangan konten multiplatform dan digitalisasi. Diantaranya dengan menghadirkan portal berita nasional (rri.co.id) dan aplikasi RRI News yang menyajikan berita terkini dalam format digital. Untuk layanan siaran radio berbasis internet, RRI mengembangkan aplikasi *streaming* radio digital (RRI Digital), yang memungkinkan pengguna menikmati konten *on-demand*. Selain itu, berbagai aplikasi dan website penunjang lainnya juga dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyiaran serta pelayanan publik.

Komunitas Para Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Internasional dalam pertemuan pada bulan Oktober 2024 di Ottawa, Canada, yang mana RRI ikut terlibat di dalamnya, menyepakati terdapat lima butir komitmen global terkait prospek lembaga penyiaran publik di masa kini dan mendatang yang terdiri dari:

- a. Memastikan akses yang luas terhadap berita untuk seluruh warga masyarakat;
- b. Memerangi disinformasi yang merugikan masyarakat;
- c. Mendorong deliberasi publik di masyarakat;
- d. Tuntutan akuntabilitas pada perusahaan media sosial; dan
- e. Penggunaan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*) untuk kepentingan masyarakat.

Aspek-aspek yang disepakati dari komitmen global tersebut sangat relevan dengan tujuan dan transformasi yang sedang dituju oleh RRI. Pada hakikatnya, RRI memiliki peran untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya, juga sebagai bagian dari proses demokratisasi dan meminimalisasi disinformasi di Indonesia. Selain itu, hal ini didorong dengan proses adaptasi dan pemanfaatan AI dalam optimalisasi kerja dan layanan kepada masyarakat.

RRI juga berperan dalam proses demokrasi dan birokrasi yang dinamis di Indonesia. Tidak terpisahkan bahwa RRI merupakan bagian dari negara yang memiliki peran untuk membuka ruang kritik konstruktif dalam konteks demokrasi. RRI juga mempunyai kebutuhan untuk melakukan transformasi birokrasi agar lebih dinamis (*dynamic bureaucracy*). Lebih jauh lagi, proses birokrasi yang dijalankan dapat terus berkembang dengan berlandaskan pada kinerja, atau penerapan *agile performance-based bureaucracy*.

Dari sisi optimalisasi teknologi penyiaran, tantangan RRI adalah mempertahankan dan memperkuat teknologi teresterial karena masih banyak pendengarnya, sekaligus berupaya untuk mengembangkan teknologi digital. Harapannya, RRI dapat memiliki jaringan penyiaran dengan frekuensi yang sama, atau dikenal sebagai *single frequency* sehingga memudahkan pendengar RRI untuk mengakses RRI secara teresterial.

Penguatan teknologi teresterial memiliki kekhasan tersendiri, namun tetap harus dilakukan, diantaranya melalui penguatan pemancar *Frequency Modulation* (FM), *Amplitudo Modulation* (AM) dan gelombang pendek berfrekuensi tinggi yang dikenal dengan *Short Wave* (SW). Teknologi penyiaran SW ini tidak masif di tengah publik namun populer di kalangan komunitas. SW memiliki kekhasan karakter untuk menjangkau publik yang lebih luas, di wilayah yang jauh, terutama bagi pendengar internasional. Saat ini teknologi terestrial analog juga sedang berkembang menjadi terestrial digital dan telah diadopsi di beberapa negara besar seperti Tiongkok, India dan sejumlah negara Eropa.

RRI juga melakukan inisiatif konvergensi layanan konten pada berbagai platform digital (*multiplatform*). RRI menyediakan aplikasi RRI Digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti siaran RRI secara *live streaming* dan *on-demand* baik audio (Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan VOI) dari seluruh program di Indonesia, maupun audio-visual di RRI Net dan berupa teks pada rri.co.id, serta dapat pula diakses di platform media lainnya. Pengembangan aplikasi (*mobile apps*) yang dilakukan selama delapan tahun terakhir dimulai pada tahun 2017, bernama RRI *Play Go*, yang saat ini bertransformasi menjadi RRI Digital. Selain itu, RRI juga memiliki aplikasi berita *online* berupa RRI *News* yang diluncurkan pada tahun 2024. Optimalisasi berbagai layanan digital yang disediakan RRI ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, edukasi, dan hiburan dari seluruh Indonesia, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Dasawarsa terakhir, LPP di berbagai negara menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat disrupsi teknologi digital, derasnya arus disinformasi, serta turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media. Menurut laporan *Reuters Institute Digital News Report 2024*, hanya 40% masyarakat global yang masih mempercayai berita dari media utama, menandai penurunan kepercayaan publik dari tahun ke tahun. Dalam konteks tersebut, lembaga seperti British Broadcasting Corporation (BBC) dan Australian Broadcasting Corporation (ABC) telah merespons secara strategis dengan menetapkan visi jangka panjang untuk menjadi media paling dipercaya dan disegani di dunia. Fokus utama kedua LPP tersebut meliputi integritas informasi, keberagaman konten yang mencerminkan seluruh lapisan masyarakat, serta penguatan peran sebagai pemersatu bangsa.

Di Indonesia, tantangan yang dihadapi RRI memiliki skala yang jauh lebih besar, mengingat RRI bertanggung jawab untuk melayani lebih dari 281,6 juta penduduk, termasuk di wilayah 3T. Namun demikian, realitas fiskal yang ada menunjukkan keterbatasan alokasi anggaran yang signifikan. Dengan dana operasional sekitar Rp1 triliun per tahun, RRI harus melayani populasi hampir sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan ABC, yang pada tahun 2023 menerima anggaran sebesar AUD 1,19 miliar (sekitar Rp 12,3 triliun) untuk melayani hanya 27,4 juta penduduk Australia. Jika dihitung berdasarkan alokasi per kapita, ABC mendapatkan lebih dari 132 kali lipat dukungan dana per individu dibandingkan RRI. Ketimpangan ini menggambarkan tantangan struktural yang harus diatasi sekaligus menjadi argumentasi kuat perlunya peningkatan dukungan fiskal dari Pemerintah agar mandat RRI sebagai LPP dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam masa efisiensi, tantangan RRI semakin kompleks karena keterbatasan anggaran operasional produksi siaran, sedangkan pada sisi lain RRI harus tetap mampu menyelenggarakan program, menyajikan konten informatif, dan memastikan publik percaya pada siaran RRI. Di sisi berbeda, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) RRI juga belum signifikan untuk menopang kebutuhan penyelenggaraan program operasional penyiaran. Bagi RRI, “kepercayaan publik” terhadap konten siaran RRI adalah penting. RRI diarahkan untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendukung penuh tujuan Negara, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”. Hal ini akan dicapai melalui penguatan kualitas jurnalisme, akselerasi transformasi digital yang inklusif, serta orkestrasi peran satuan kerja di seluruh wilayah untuk menghadirkan layanan yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi dengan nilai-nilai keindonesiaan. Kepercayaan publik yang kuat dapat mendukung penerimaan publik yang semakin luas terhadap program dan konten RRI, baik secara terestrial maupun digital. Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, RRI juga

berperan sebagai ruang aspirasi masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan dan yang kurang terwakili dalam media arus utama. Kaum tuna netra sebagai sebuah contoh adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, salah satunya melalui layanan RRI.

Peningkatan kapasitas SDM atau *capacity building* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penguatan organisasi, termasuk dalam mendukung transformasi digital di RRI. Untuk mengoptimalkan inisiatif konvergensi layanan konten pada berbagai platform digital, SDM RRI perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan teknologi siaran digital, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, manajemen data, produksi konten *multiplatform*, serta literasi digital.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kepemimpinan digital, pembinaan keterampilan teknis dan kreatif, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi yang terus berkembang. RRI turut mengikuti transformasi digital terrestrial seperti DAB+ dan DRM. Siaran RRI saat ini juga dapat disimak melalui *streaming*, aplikasi RRI Digital hingga platform berita online RRI News, sehingga dapat dioperasikan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan layanan publik yang relevan di era digital. Dalam ekosistem media massa modern di era digital ini, informasi yang disajikan tidak lagi cukup hanya berhenti pada fungsi informatif yang sekadar disimak dan diterima. Masyarakat kini menuntut informasi yang tidak hanya bermanfaat, yakni memberikan pengetahuan, wawasan, atau hiburan, melainkan juga dapat berdampak, seperti mampu menggerakkan pemikiran masyarakat, mengubah sikap dan memicu tindakan nyata yang positif. Perbedaan ini penting diperhatikan, manfaat bersifat langsung dan praktis, sedangkan dampak menembus lebih jauh ke dimensi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perilaku individu maupun kolektif.

Bagi RRI, kehadiran tidak sebatas menjadi sumber informasi publik yang relevan, akurat, dan terpercaya. RRI menegaskan posisinya sebagai media yang berdampak untuk publik, berperan sebagai penggerak perubahan, membangun opini publik yang sehat, memperkuat nilai kebangsaan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih kritis dan partisipatif. Dampak yang dihadirkan RRI tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek melalui respons langsung pendengar terhadap suatu informasi. Tetapi juga dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui kontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa, penguatan demokrasi, dan keberlanjutan pembangunan.

Melalui strategi penyiaran yang adaptif, konten yang partisipatif, dan pemanfaatan teknologi yang inklusif, RRI memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bukan hanya didengar, tetapi juga diresapi dan menginspirasi publik untuk bertindak demi kemajuan bersama. Secara kelembagaan, belum disahkannya RUU Penyiaran juga telah menghadirkan kegamangan dalam penguatan dan pengembangan RRI. UU tersebut telah berusia 23 tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan focus pada pengembangan tata kelola organisasi, teknologi, tugas, dan fungsi penyiaran publik. Salah satu isu besar dalam RUU tersebut, yaitu terkait dengan posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

1.1.1 Capaian RRI Tahun 2020-2024

Pada periode 2020–2024, LPP RRI telah mencatat berbagai pencapaian kinerja yang menjadi dasar evaluasi dan acuan untuk meningkatkan kualitas kerja serta memperkuat kontribusi LPP RRI di masa mendatang. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi fokus LPP RRI pada periode 2020–2024, meliputi:

- 1) Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio; dan
- 2) Terwujudnya tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui berbagai inisiatif dan strategi konkret yang telah dilakukan LPP RRI. Berikut penjabaran dari berbagai capaian yang telah direalisasikan LPP RRI selama periode 2020–2024.

Sasaran Strategis 1

“Tersedianya Akses dan Program Informasi yang Akurat, Mempunyai Nilai Pendidikan dan Hiburan yang Sehat Guna Mendukung Program Negara Melalui Layanan Siaran Radio.”

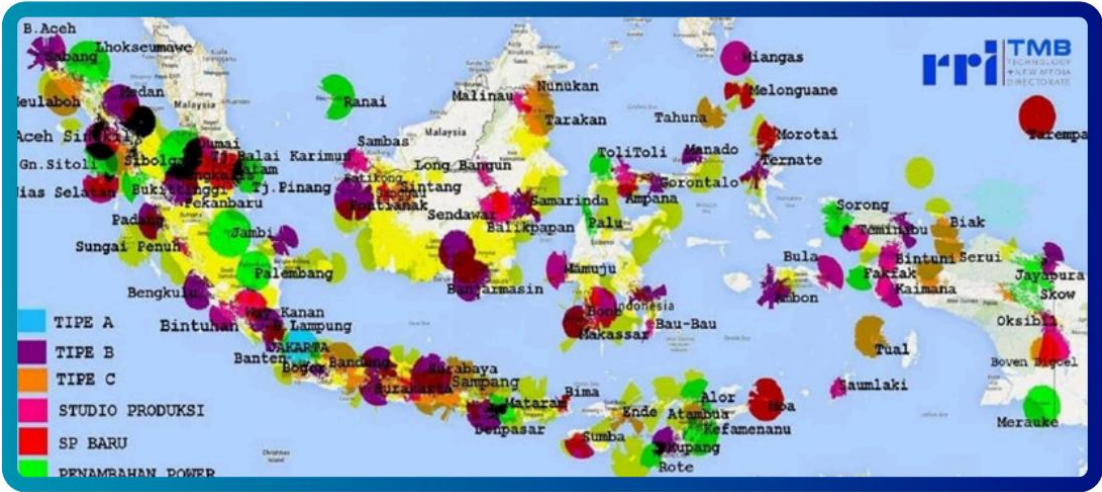
Sasaran strategis ini dibagi menjadi dua aspek utama dalam proses pencapaiannya, yaitu meliputi ketersediaan akses informasi dan program siaran yang mendukung program pemerintah.

A. Tersedianya Akses Informasi Melalui Layanan Siaran Radio

1) Jangkauan Siaran RRI

Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan aplikasi prediksi jangkauan siaran yang mengacu pada metode propagasi ITU-R P.1546, cakupan wilayah siaran LPP RRI pada tahun 2024 mencapai sekitar 70%. Nilai tersebut diperoleh melalui analisis teknis yang mempertimbangkan daya pancar, ketinggian antena, frekuensi, serta kondisi topografi wilayah di Indonesia. Pemodelan ini memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap area jangkauan sinyal efektif dari jaringan pemancar analog AM/FM serta digital DAB+ dan DRM yang dioperasikan RRI serta didukung oleh layanan digital streaming melalui RRI Digital yang dapat diakses oleh masyarakat di mana pun berada. Tersedianya Akses Informasi Melalui Layanan Siaran Radio.

Gambar 1.2 Peta Jangkauan Siaran RRI 2024



Gambar 1.3 Pemetaan Data Jangkauan Siaran dan Kebutuhan Infrastruktur LPP RRI Tahun 2024

Data Jangkauan Siaran dan Kebutuhan Infrastruktur Radio Republik Indonesia secara Nasional					
Jumlah Kab./Kota	Persentase Jangkauan Kab./Kota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Jangkauan Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase Jangkauan Populasi
325	63%	1.205.595	55%	197.122.660	70%
189	37%	985.373	45%	84.481.140	30%

Ter-cover/existing

Belum ter-cover/existing

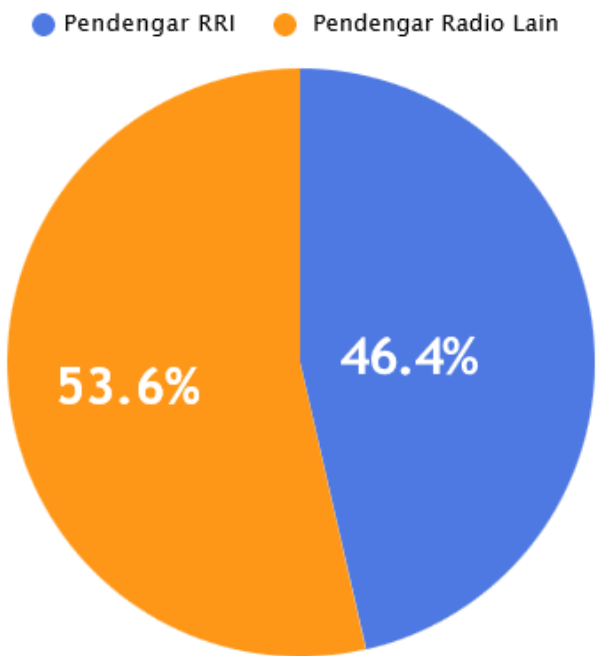
2) Jumlah Pendengar

RRI merupakan LPP yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan yang sehat kepada segenap lapisan masyarakat. Untuk mempertahankan dan terus meningkatkan jumlah pendengarnya, RRI senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Data jumlah pendengar menjadi indikator utama dalam menilai eksistensi dan peran RRI di tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, data tersebut juga berfungsi sebagai alat ukur dalam menganalisis penetrasi teknologi digital, perubahan perilaku pendengar, serta sebagai bahan evaluasi dalam merancang strategi siaran yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil Survei Kependengaran Layanan Siaran RRI Tahun 2024 yang dilakukan secara nasional oleh Nielsen pada periode Juli–Agustus 2024, dengan melibatkan 3.777 responden, data dalam enam bulan terakhir menunjukkan bahwa RRI memiliki jumlah pendengar sebesar 46,4% (1.754 responden) dari total pendengar radio di seluruh Indonesia.

Gambar 1.4 Persentase Audience Share LPP RRI, 2024

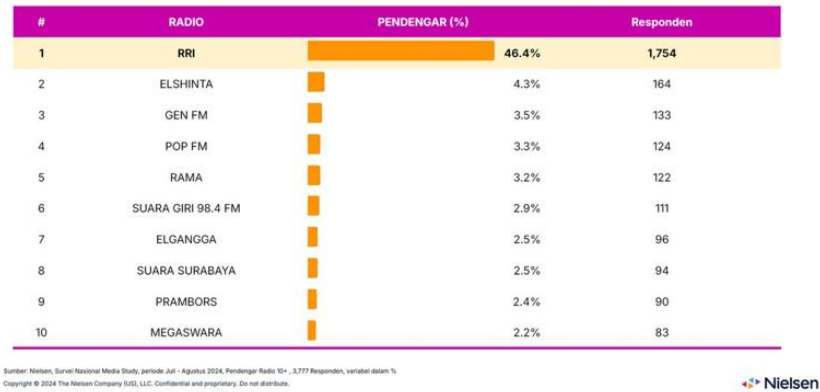


Penyebaran wilayah responden dalam survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagian Barat, Tengah, dan Timur, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa, secara nasional, RRI memiliki jumlah pendengar yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan radio lainnya, dengan persentase mencapai 46,4%. Namun, data ini

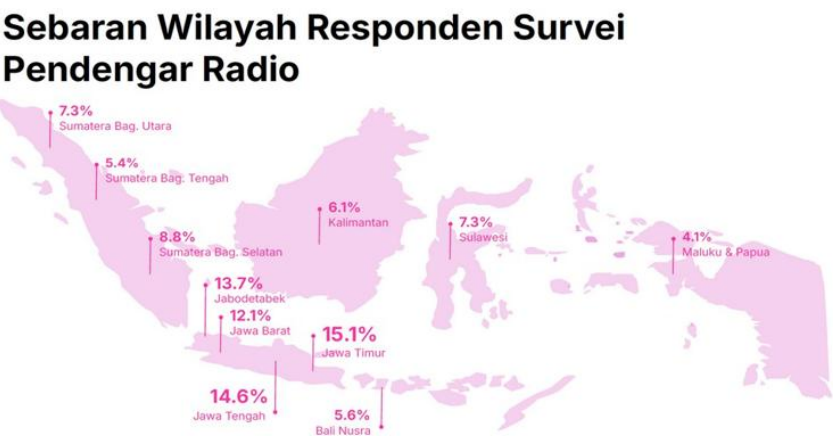
juga menunjukkan tantangan yang dihadapi RRI, seperti penurunan jumlah pendengar dari kalangan muda yang lebih cenderung beralih ke *platform streaming* dan siniar atau *podcast*.

Dari data hasil survei, terlihat bahwa demografi usia pendengar RRI berada di rentang usia 30 tahun ke atas. Oleh karena itu, RRI perlu terus berinovasi dengan mengintegrasikan siaran terestrial dan strategi digital guna menarik minat pendengar dari berbagai segmen. Dengan memahami tren ini, RRI memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai media penyiaran yang relevan, sekaligus tetap mengutamakan kebutuhan informasi masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Gambar 1.5 Jumlah Pendengar LPP RRI Nasional dalam 6 Bulan Terakhir (Nielsen, 2024)

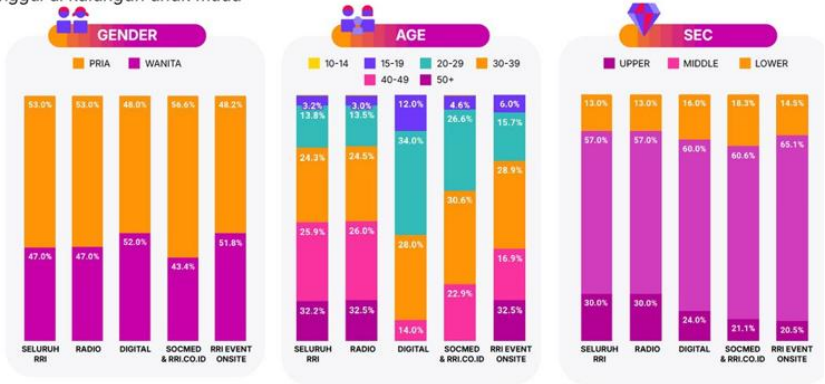


Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Responden Survei Pendengar Radio, 2024



Gambar 1.7 Demografi Pendengar LPP RRI, 2024

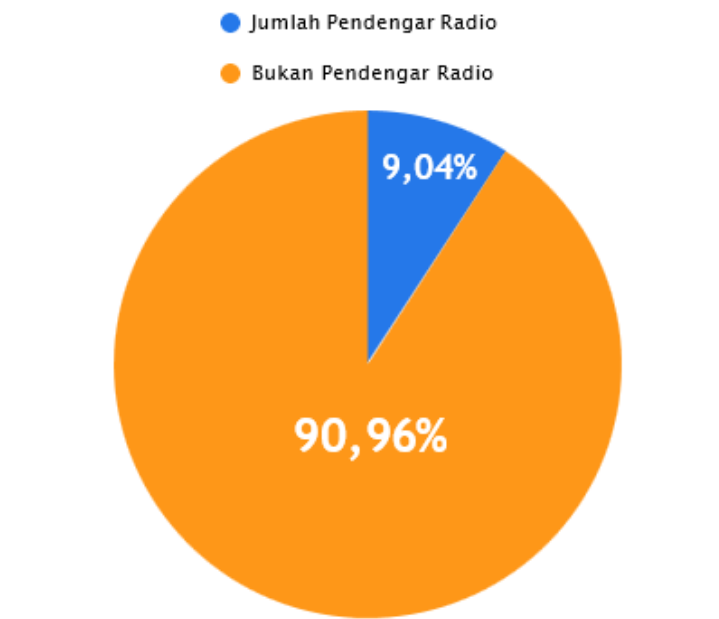
Demografi Pendengar RRI
Keseluruhan pendengar RRI didominasi dari kelas Upper dan Middle, dengan RRI Digital yang juga unggul di kalangan anak muda



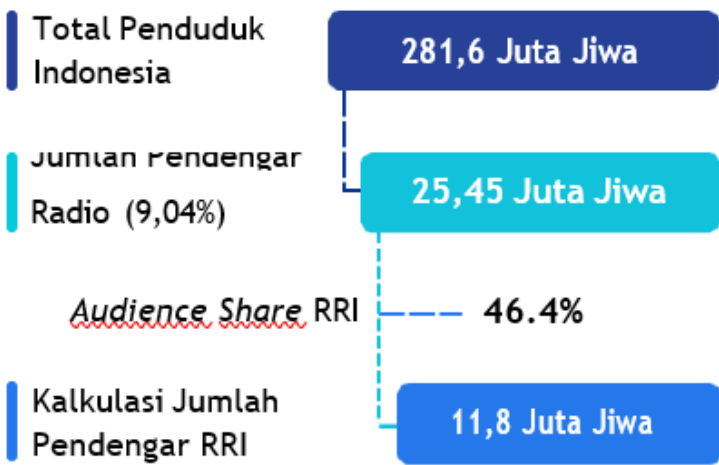
Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada survei Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2024, menunjukkan hasil angka Persentase Penduduk Berumur 10 tahun

ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio dalam Seminggu Terakhir sebesar 9,04% dari populasi penduduk Indonesia (281,6 juta jiwa), sehingga jumlah pendengar radio diestimasikan yakni 25,45 juta jiwa. Jika mengacu pada data Nielsen tentang *audience share* RRI sebesar 46,4%, maka dapat dikalkulasikan bahwa pendengar RRI kurang lebih sebesar 11,8 juta jiwa.

Gambar 1.8 Persentase Jumlah Pendengar Radio, 2024



Gambar 1.9 Kalkulasi Jumlah Pendengar LPP RRI



3) Layanan Digital

Selain memperluas jangkauan siaran terestrial yang terus bertumbuh setiap tahunnya, RRI juga meningkatkan layanan publik pada penguatan layanan *multiplatform* guna menjawab tantangan teknologi media yang semakin dinamis. Transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa RRI tetap relevan dan mampu bersaing di tengah perubahan pola konsumsi media oleh masyarakat.

Hingga tahun 2024, RRI telah menghadirkan berbagai layanan digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan hiburan dengan lebih mudah dan fleksibel. Beberapa *platform* digital yang telah dikembangkan antara lain:

- a. RRI Net, layanan radio visual RRI yang tersedia pada beberapa kanal digital;
- b. rri.co.id, portal berita RRI yang berjangkauan nasional dengan menyajikan informasi terkini;
- c. RRI News, aplikasi berita RRI yang memberikan akses lebih cepat, mudah dan akurat;
- d. RRI Digital, layanan aplikasi yang memungkinkan pendengar menikmati siaran radio dan musik digital kapan saja dan di mana saja.

Dengan inovasi ini, RRI berupaya untuk memberikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik di tengah era *post-truth* gempuran berita *hoax* yang sulit untuk bisa dibedakan benar atau salah, nyata atau buatan, fakta atau rekayasa, sehingga membahayakan hak atas informasi dan membuat disinformasi di masyarakat. Lebih berbahaya lagi, kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memungkinkan orang untuk memanipulasi fakta, memutarbalikkan kebenaran untuk memicu kemarahan dan disharmoni terhadap masyarakat Indonesia yang plural.

Dalam hal ini, RRI berkomitmen menguatkan posisinya sebagai media publik yang terpercaya (*trusted public media*). RRI berupaya menjadi benteng masyarakat dari gempuran *hoax*, disinformasi dan misinformasi.

a) Layanan Berita Nasional Digital

Selain siaran Pro 3 yang menjadi corong pemberitaan radio nasional, penyebarluasan berita juga dilakukan melalui portal berita (rri.co.id) yang hadir sejak tahun 2015 dan aplikasi berita nasional (RRI News) yang diluncurkan pada 2024. Langkah ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah dan luas. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, rri.co.id telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan mencatat berbagai capaian signifikan hingga tahun 2024.

Berdasarkan data dari *SimilarWeb*, portal rri.co.id pada Februari 2025 berhasil menempati peringkat ke-30 di antara media berita *online* lainnya. Hal ini menunjukkan portal berita RRI punya daya saing yang kuat sebagai sumber informasi terpercaya.

Gambar 1.10 Logo rri.co.id



Selain itu, pencapaian lain yang cukup signifikan adalah jumlah total *active users* yang mencapai 3.975.513 users, mencerminkan tingginya keterlibatan audiens terhadap konten yang disajikan. Dari segi kunjungan, portal ini berhasil menarik sekitar 6.700.000 kunjungan, dengan total impresi dalam hasil pencarian *Google* mencapai 232.592.902 tampilan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa rri.co.id terus berkembang sebagai salah satu sumber berita yang kredibel dan diminati oleh masyarakat luas.

Gambar 1.11 Logo RRI News



Sebagai bentuk pengembangan digitalisasi dan amplifikasi konten siaran pemberitaan, aplikasi RRI News hadir dan berfungsi sebagai *mirroring* dari konten pemberitaan yang tersedia di rri.co.id, memungkinkan pengguna untuk mengakses berita nasional dengan lebih praktis melalui *smartphone*.

Dengan tampilan antarmuka (*user interface*) yang lebih interaktif, aplikasi ini memberikan pengalaman membaca berita yang lebih nyaman dan modern. Lebih dari sekadar platform penyajian berita, aplikasi ini juga dikembangkan sebagai kanal utama dalam kolaborasi pemberitaan, khususnya dengan pemerintah dalam menyampaikan berbagai berita terkini yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat luas.

b) Layanan *Streaming* Radio Digital

Perubahan preferensi publik dalam mengonsumsi media telah mendorong kebutuhan akan *platform on-demand* media, yaitu masyarakat ingin mengakses konten sesuai dengan minat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Menanggapi perubahan ini, RRI dengan sigap menghadirkan layanan *streaming* radio digital melalui aplikasi RRI Digital, yang menawarkan konsep *on-demand content*. Dengan aplikasi ini, pengguna bukan saja dapat menikmati siaran sesuai preferensi mereka tanpa terbatas oleh jadwal siaran konvensional, tetapi juga dapat berinteraksi satu sama lain dan menyampaikan pendapat.

RRI Digital merupakan aplikasi resmi dari RRI yang diluncurkan pada tahun 2023 sebagai bagian dari pengembangan aplikasi RRI *Play Go*. Aplikasi ini dirancang untuk menghadirkan berbagai layanan siaran, berita dan komunitas dalam satu *platform* digital.

Gambar 1.12 Transformasi Aplikasi



Melalui RRI Digital, pengguna dapat mengakses siaran langsung (*live streaming*), berita terbaru, *podcast*, serta berbagai konten multimedia yang informatif, edukatif secara interaktif. Sebagai salah satu bentuk pengembangan *multiplatform*,

aplikasi ini tersedia di perangkat Android dan iOS, serta kompatibel dengan berbagai perangkat pintar lainnya. Jumlah kunjungan aplikasi RRI Digital pada Februari 2025 mencapai 4.670.908 kunjungan, dengan total pengguna aktif sebanyak 266.683 pengguna. Berdasarkan data *content analytics*, jumlah *streaming* radio yang diputarkan melalui aplikasi ini pada periode yang sama mencapai 304.206 kali, dengan rata-rata durasi mendengarkan selama 6 menit 41 detik. Kehadiran RRI Digital tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya dari sumber resmi. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai jembatan interaksi antara RRI dan pendengarnya melalui fitur interaktif yang disediakan.

Gambar 1.13 Tampilan Beranda RRI Digital



- B. Tersedianya Program Informasi Yang Akurat, Mempunyai Nilai Pendidikan, Dan Hiburan Yang Sehat Guna Mendukung Program Negara.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membuat hampir semua kegiatan belajar mengajar secara fisik terhenti dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kementerian Pendidikan memprogramkan PJJ berbasis internet dengan memberikan kuota internet kepada siswa. Namun tidak meratanya layanan internet di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur dan 3T, membuat program ini tidak bisa dinikmati seluruh siswa dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Oleh

karenanya, pada bulan Maret 2020, RRI meluncurkan program “Belajar di RRI” dan “Guru Keliling” dengan memanfaatkan siaran Pro 2 RRI di seluruh Indonesia yang memungkinkan para guru menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik.

Tercatat, 17.920 sekolah berpartisipasi dalam program “Belajar di RRI” dan 250 sekolah terlibat dalam program “Guru Keliling” yang diprioritaskan untuk siswa difabel. Program ini terbukti efektif dan diapresiasi oleh pemerintah dan badan dunia.

Bukan saja inisiatif yang dilakukan menghadapi pandemi Covid, RRI terus berkomitmen dalam memberikan literasi bagi masyarakat tentang upaya membangun ekonomi kreatif, program bagi pengusaha UMKM, program tanggap bencana, mendorong kontribusi dan kreativitas pemuda, memperkuat harmonisasi sosial serta toleransi antar agama, mencerdaskan anak bangsa, dan berperan dalam mewujudkan agenda prioritas nasional.

Sebagai ruang ekspresi dan pengembangan bagi generasi muda, RRI menghadirkan berbagai program yang memberikan wadah bagi kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif pemuda dalam membangun bangsa. Melalui berbagai kegiatan edukatif, kompetisi, dan dialog interaktif, RRI membuka kesempatan bagi kaum muda untuk menyuarakan aspirasi, mengembangkan keterampilan, serta menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

Selain itu, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, RRI menginisiasi program-program yang memperkuat harmonisasi sosial dan toleransi antar umat agama. Melalui siaran yang menekankan nilai-nilai kebhinekaan, dialog lintas agama, dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, RRI berperan dalam menciptakan ruang komunikasi yang inklusif dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman.

Lebih dari itu, sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda prioritas nasional, RRI terus mengembangkan program-program yang selaras dengan agenda pembangunan bangsa. Dari pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi kebijakan pemerintah, hingga program yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, semua menjadi bagian dari upaya RRI dalam menjalankan tugasnya sebagai LPP yang bertanggung jawab dan berdedikasi untuk kemajuan Indonesia.

Melalui semua inisiatif ini, RRI menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi, mengedukasi, dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Dengan semangat yang sama, RRI akan terus berinovasi dan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan berdaya saing.

1) Layanan Program Edukasi Masyarakat

Dalam rangka menjawab tantangan dunia pendidikan selama masa pandemi Covid-19, RRI meluncurkan inisiatif strategis melalui program edukasi “Belajar di RRI” dan “Guru Keliling” pada tahun 2020. Melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi, program “Belajar di RRI” disiarkan melalui Program 2 dan menjangkau 17.920 institusi pendidikan, dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, termasuk masyarakat umum.

Program “Guru Keliling” telah berhasil dilaksanakan di 268 sekolah, dengan melibatkan 130 guru pada Oktober dan 127 guru pada November, termasuk 215 Sekolah Luar Biasa/Inklusif. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program melibatkan 3.250 siswa SD dari 65 satuan kerja. Atas kontribusinya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan nasional di masa krisis, RRI mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gugus Tugas Covid-19,

dan Badan Dunia (UNESCO) sebagai bentuk pengakuan atas inovasi dan kepedulian RRI terhadap dunia pendidikan.

2) Layanan Program Dukungan Pemilu

Pemilu 2019, menjadi titik mula RRI untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara Debat Capres bersama beberapa TV Nasional. Debat Capres adalah satu dari berbagai program RRI dalam Pemilu, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada Pemilu 2024.

Gerakan Cerdas Memilih (GCM) adalah inisiatif yang diselenggarakan oleh RRI untuk mendukung kesuksesan Pemilu 2024. Program ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z, mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu serta cara memilih yang cerdas. Secara substantif, orientasi GCM adalah upaya meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pentingnya memberikan suara dalam pemilu. Selain itu, program ini juga berusaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi tentang struktur pemerintahan, fungsi negara, hingga peran dan tanggung jawab para pemimpin politik. Selain itu, edukasi terkait hak-hak memilih, prinsip-prinsip demokrasi, maupun sangsi hukum yang berlaku, agar masyarakat sadar mengenai praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dengan demikian, GCM diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu sebagai salah satu proses terpenting dalam demokrasi.

GCM dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia melalui 69 satuan kerja (satker). Rangkaian kegiatan GCM dilaksanakan mulai 31 Mei 2023 hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kegiatan ini mencakup berbagai acara menarik, seperti:

- a) Pemutaran Edukasi Politik dalam bentuk Spot, Filler, Sandiwara Radio, Obrolan
- b) Dialog Interaktif Pemilu
- c) Kegiatan *Talkshow & Variety Show*
- d) Berita *Online* Pemilu dan GCM
- e) Promosi Radio Pemilu

Selain itu, RRI juga menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dari hasil pelaksanaan program tersebut, RRI mendapatkan Piagam Penghargaan dari KPU atas “Partisipasi Dukungan Sosialisasi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”.

Program selanjutnya yang merefleksikan semangat RRI sebagai media informasi dan edukasi politik adalah “Parlemen Menjawab”. Program ini dikemas berupa dialog/*talkshow* atau wawancara langsung menghadirkan narasumber dengan topik yang berkaitan dengan Pemilu. Selain sosialisasi dan edukasi pemilu, juga dibahas program kontestan peserta pemilu maupun pemilukada. Program ini merupakan satu bagian dari GCM yang dilaksanakan oleh 69 satker. Bersama terselenggaranya program GCM dan Parlemen Menjawab, RRI berkomitmen menayangkan informasi-informasi seputar pemilu melalui portal pemberitaannya. Tercatat lebih dari 16 ribu berita terkait Pemilu dan 12 ribu berita terkait GCM dalam portal berita RRI.

3) Layanan Program Pengembangan Kreativitas Pemuda

a) Festival Pelajar Nusantara

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, RRI bersama *stakeholder* lainnya berkewajiban mendorong generasi muda khususnya para pelajar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan positif yang bermuara pada terciptanya generasi Indonesia yang unggul sebagaimana tujuan pembangunan nasional, yang disalurkan melalui kegiatan Festival Pelajar Nusantara (FPN). FPN memiliki tujuan untuk membuka ruang keterlibatan generasi muda agar turut andil dalam mendukung pembangunan. Kegiatan ini menjadi jembatan generasi muda khususnya para pelajar agar dapat merancang dan mengembangkan kemampuan kreatif serta membangun interaksi sosial antar pelajar sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan FPN mulai diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 2022 yang kemudian terus diselenggarakan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk kreativitas program memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada pelaksanaan FPN 2022, jumlah pelajar yang terlibat sebanyak sebanyak 90.308 pelajar. Puncak Acara FPN 2022 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, dengan melibatkan 22.500 pelajar dari SMA, SMK dan MA se-Kota Solo. Adapun aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan dalam mendukung kreativitas pelajar, meliputi:

- (i) Lomba Paskibraka
- (ii) Pameran Dari Sekolah (Karya Karya Pelajar)
- (iii) Pameran UMKM
- (iv) *Fashion Show*
- (v) Menulis dan Membaca Puisi
- (vi) Pentas Seni Dan Budaya
- (vii) Perlombaan Game *Online*
- (viii) Perlombaan Konten TikTok (Bertemakan Keindonesiaan)
- (ix) *Stand Up Comedy*
- (x) Cerdas Cermat
- (xi) Lomba Paduan Suara Pelajar

b) Bintang Radio

Bintang Radio adalah ajang pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan oleh RRI. Kompetisi ini telah menjadi tradisi sejak pertama kali diadakan pada tahun 1951, menjadikannya salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia. Bintang Radio bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan talenta penyanyi berbakat di seluruh Indonesia. Lomba ini sering menjadi batu loncatan bagi penyanyi yang ingin berkarir di industri musik Indonesia.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan Bintang Radio Nasional diselenggarakan di Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur, dengan total peserta sebanyak 136 partisipan. Sejak dahulu, Bintang Radio telah melahirkan banyak penyanyi berbakat yang kemudian sukses di industri musik. Ajang ini juga turut melestarikan lagu-lagu Indonesia, baik pop maupun dangdut, serta menjadi wadah bagi musisi daerah untuk tampil di panggung nasional. Bintang Radio terus berkembang mengikuti tren musik, termasuk dengan menyesuaikan

format kompetisi dan menghadirkan kategori musik yang lebih beragam.

4) Layanan Program Harmonisasi Sosial dan Toleransi Beragama (Pekan Tilawatil Qur'an)

Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) yang diselenggarakan oleh RRI merupakan agenda tahunan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbagai bidang seperti tilawah Al-Qur'an, hafalan, serta tausiyah.

PTQ pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 dan terus diselenggarakan hingga tahun 2024. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperkuat peran RRI dalam menyebarkan syiar Islam, khususnya di bulan suci Ramadhan. Aktivitas yang biasanya diselenggarakan dalam kegiatan PTQ meliputi Lomba Tilawah, Tausiyah, Tahfidz (Hafalan Al-Qur'an), dan Lomba Tartil Qur'an untuk Sensorik Netra. Pada PTQ 2024, terdapat juga kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan secara luring dan disiarkan melalui *multiplatform* secara nasional, kegiatan ini diadakan di aula utama Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5) Layanan Program Aspirasi Masyarakat (Halo RRI)

Program "Halo RRI" disiarkan setiap hari Senin dan Jumat, pukul 09.00-10.00 pada waktu setempat, melalui kanal Pro 1 berbagai stasiun siaran RRI di seluruh Indonesia. Program ini didesain sebagai kanal masyarakat dalam menyampaikan laporan dan keluhan mengenai pelayanan publik, termasuk masalah kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan pelayanan publik. Setiap keluhan yang masuk akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang kompeten dan instansi yang berwenang dalam bidang terkait, seperti Ombudsman, Kementerian, Dinas, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.

Sejak pertama kali disiarkan pada Oktober 2024, "Halo RRI" telah berhasil menarik perhatian masyarakat dengan berbagai aduan yang dilaporkan. Program ini juga telah berhasil menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan pihak terkait. Melalui program ini, RRI berkomitmen untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat transparansi, dan mendukung tercapainya PN. Dengan menjadi media yang menerapkan jurnalisme solusi, RRI berupaya agar setiap keluhan yang diajukan mendapatkan solusi konkret, memperlihatkan peran RRI sebagai media yang responsif dan mendukung pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

6) Layanan Program Pelestari Kebudayaan

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki berbagai program siaran yang menampilkan konten kebudayaan, konten-konten siaran tersebut tersaji pada kanal Pro 4 RRI. Kanal siaran ini berfokus pada pelestarian budaya nusantara, khususnya dalam menghadirkan berbagai konten yang mendukung kebudayaan lokal, serta peran lainnya dalam:

- a) Mendokumentasikan dan Menyebarluaskan Budaya
- b) Mengenalkan dan Mempertahankan Bahasa Daerah
- c) Mempromosikan Karya Budaya dan Seniman Lokal

Beberapa program yang ditayangkan dalam kanal Pro 4 RRI seperti "Gelar Budaya", "Budaya Bangsa", "Pelangi Budaya" dan "Dongeng Anak Nusantara". Selain itu, beberapa stasiun RRI daerah juga

menyiarkan program dalam bahasa daerah untuk menjaga eksistensi bahasa ibu di tengah modernisasi. Lebih dari itu, RRI secara konsisten menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan kebudayaan di berbagai daerah sebagai upaya mendukung pelestarian budaya nasional. Contohnya dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 79 RRI, Stasiun RRI di berbagai daerah mengadakan pagelaran budaya yang menampilkan berbagai kesenian lokal, acara ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah.

7) Layanan Program Penguatan Perbatasan

RRI memiliki peran strategis dalam penguatan daerah perbatasan melalui layanan program siaran dan kegiatan langsung yang bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan, melestarikan budaya lokal, serta memberikan informasi yang relevan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Beberapa contoh stasiun RRI yang menyajikan program Siaran Perbatasan adalah RRI Entikong, RRI Merauke, RRI Atambua, dan RRI Nunukan. Siaran ini berisi informasi mengenai pembangunan daerah perbatasan, kegiatan ekonomi, serta budaya dan adat istiadat setempat. Selain program siaran, RRI juga mengadakan berbagai kegiatan langsung di daerah perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya kegiatan “Dialog Kebangsaan” yang menghadirkan tokoh masyarakat, pejabat, dan akademisi untuk membahas isu-isu strategis di perbatasan, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan negara terkait perbatasan.

8) Layanan Program Pendukung Reformasi Birokrasi (RB) Tematik

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik adalah inisiatif yang diadopsi oleh RRI selama tahun 2024 untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN) melalui perubahan pola siaran. Program ini mencakup beberapa area utama, antara lain:

- a) Pengentasan Kemiskinan: RRI menyiarkan program-program yang bertujuan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan tingkat kemiskinan.
- b) Pengendalian Laju Inflasi: Melalui siaran informatif, RRI membantu masyarakat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana menghadapinya.
- c) Peningkatan Investasi: RRI bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiarkan informasi yang mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor.
- d) Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri: Melalui program-programnya, RRI mendorong dan mempromosikan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional.
- e) Penurunan *Stunting*: RRI berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyiarkan program yang fokus pada penurunan angka *stunting* di Indonesia.

Dengan mengubah pola siaran dan berfokus pada topik-topik tersebut, RRI berperan aktif dalam mendukung dan mensosialisasikan program-program prioritas pemerintah kepada masyarakat luas.

9) Layanan Program Tanggap Bencana

Pengembangan program untuk radio tanggap bencana dilakukan RRI dengan memasang delapan pemancar DRM yang dilengkapi

aplikasi peringatan dini bencana atau *early warning system* (EWS) di daerah rawan bencana, seperti Pelabuhan Ratu, Labuan Banten, Painan Padang, Labuan Bajo, Cilacap, Yogyakarta, Bengkulu dan Gunungsitoli. Kelebihan aplikasi EWS ini, memungkinkan unit radio menerima sinyal peringatan dini walaupun dalam keadaan tidak aktif

Gempa Bumi di Lombok, tsunami disertai likuifaksi di Palu, banjir, tanah longsor, dan kekeringan menjadi pemicu dibuatnya program radio tanggap bencana sejak tahun 2018. Hingga saat ini program tersebut melibatkan lebih dari 500 personil yang terdiri dari kementerian, instansi, dan lembaga, seperti Basarnas (40), BNPB, BPBD (310), BMKG (178), ditambah TNI POLRI, pecinta alam, penggiat lingkungan hidup, pramuka, orari, komunitas radio amatir.

Format program tanggap bencana:

- a) Dialog Interaktif dengan durasi 30 menit, menghadirkan narasumber;
- b) Liputan *On the Spot* dari peristiwa kebencanaan atau program pelestarian lingkungan;
- c) ILM, *Filler* dan *Tips*; dan
- d) Majalah Udara.

Program tersebut dilaksanakan pada program 1, 2, 3 dan 4, di 69 stasiun RRI dan 35 studio produksi di seluruh Indonesia.

Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Tata Kelola LPP RRI yang Transparan dan Akuntabel.”

Pada periode 2020–2024, RRI telah mendapatkan berbagai capaian yang terukur dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel, serta berkualitas.

A. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan RRI, target yang ditetapkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga periode 2024. Hasil yang telah dicapai sesuai dengan target tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan tata kelola keuangan RRI telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan tanpa penyimpangan signifikan, hal ini sejalan dengan komitmen RRI dalam menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan keuangan negara.

RRI secara konsisten telah berhasil meraih predikat WTP dari BPK RI selama lima tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 hingga 2024. Predikat ini diperoleh berdasarkan Lembar Opini BPK yang merupakan hasil evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan RRI setiap tahunnya, menandakan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar sesuai prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

B. Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) LPP RRI menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen kuat lembaga dalam melakukan transformasi tata kelola pemerintahan. Dari tahun 2020 hingga 2024, nilai RB RRI mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 54,71 pada tahun 2020, naik menjadi 55,64 di tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 60,69 di tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut secara konsisten hingga mencapai 72,58 di tahun 2023, dan pada tahun 2024 berhasil mencapai angka 76,78. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan strategi reformasi birokrasi yang telah direncanakan dan diimplementasikan dengan baik oleh RRI hingga ke level satuan kerja.

Indeks RB merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan lembaga. Nilai ini mencerminkan upaya nyata dalam memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan aksi perubahan yang dijalankan telah selaras dengan tujuan serta sasaran reformasi yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga fokus pada dampak dari setiap kebijakan terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola yang lebih efisien.

Lebih jauh, penilaian indeks reformasi birokrasi ini juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan reformasi secara menyeluruh dan sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan nilai yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan RRI tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah memberikan hasil nyata dalam membangun lembaga yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.1.2 Transformasi Digital RRI

Kebiasaan publik dalam mengakses informasi dan perubahan teknologi yang pesat, mendorong RRI untuk dapat selalu beradaptasi dan relevan dengan masyarakat. Hingga periode 2024, berbagai capaian RRI mencerminkan arah transformasi yang semakin jelas dalam upayanya untuk bersaing dan beradaptasi dengan dinamika era disrupsi dan dinamika perkembangan TIK. Sebagai wujud komitmennya dalam menghadapi perubahan pesat di dunia media, RRI telah merancang strategi yang komprehensif guna mempercepat transformasi digital di berbagai aspek. Fokus utama dari perubahan ini adalah optimalisasi distribusi konten secara multiplatform, memastikan bahwa layanan informasi yang disajikan tetap relevan, inovatif, dan mampu menjangkau audiens yang semakin beragam di era digital.

A. Mengadopsi Teknologi dan Platform Digital

RRI menyadari adanya peningkatan permintaan untuk akses konten di berbagai *platform* digital, termasuk DAB+, DRM, situs web, aplikasi *mobile*, media sosial, dan layanan *streaming*. Seiring dengan itu, RRI bertujuan untuk memperluas kehadirannya di berbagai platform, memastikan bahwa kontennya dapat dijangkau oleh audiens yang lebih luas, tidak hanya melalui kanal terestrial, tetapi juga melalui saluran digital. Hal ini akan melibatkan pengembangan aplikasi digital yang terintegrasi dan ramah pengguna, yang memungkinkan audiens untuk mengakses siaran langsung, konten *on-demand*, dan fitur interaktif lainnya secara mudah. Dengan menawarkan fitur interaktif seperti obrolan langsung, jajak pendapat, dan konten buatan pengguna, RRI berencana untuk mendorong audiens yang lebih terlibat dan berpartisipasi.

B. Strategi Konten Multiplatform

RRI berfokus pada pembuatan konten yang dapat diakses di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar dan komputer desktop. Selain itu, juga melalui berbagai media seperti audio, video, dan teks (pergeseran menuju konten *multiplatform*). Konten akan dirancang sedemikian rupa agar dapat disesuaikan dan cocok untuk berbagai *platform*, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten, baik pendengar yang mengakses RRI melalui radio terestrial, aplikasi *mobile*, maupun saluran media sosial,

Strategi ini juga mencakup pengolahan ulang konten radio menjadi format yang sesuai untuk *platform* digital lainnya. Misalnya, program berita radio dapat diubah menjadi video pendek untuk media sosial atau *podcast* untuk *streaming on-demand*. Demikian pula, program budaya dan pendidikan dapat disediakan dalam bentuk tulisan atau fitur digital lainnya, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dalam berbagai format.

C. Personalisasi Konten dan Interaktivitas

Platform digital memungkinkan personalisasi yang lebih baik, dan RRI ingin memanfaatkan hal ini untuk melayani audiens dengan lebih baik. Melalui penggunaan aplikasi analitik canggih dan umpan balik dari audiens, RRI berupaya menyesuaikan konten dengan minat spesifik pendengarnya.

D. Memperkuat Infrastruktur Digital

Untuk memastikan keberhasilan transformasi digital ini, RRI turut berinvestasi dalam infrastruktur penyiaran dan digital yang modern. Ini mencakup peningkatan sistem teknis untuk mendukung distribusi konten di berbagai *platform*, memperkuat kapasitas penyimpanan data dan *streaming*, serta meningkatkan keandalan dan kualitas siaran *online*. Selain itu, RRI berfokus pada pelatihan pegawainya, memastikan bahwa seluruh personil dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di lingkungan digital.

E. Memperluas Kolaborasi dan Kemitraan

Menyadari pentingnya kolaborasi di era digital, RRI memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, pembuat konten lokal dan internasional, penyedia teknologi, dan lembaga penyiaran lainnya. Dalam hal kemitraan dengan pemerintah daerah, RRI telah mengadakan pertemuan bersama unsur pimpinan daerah dalam rangka kolaborasi konten sehingga memunculkan sinergitas yang memudahkan publik dalam mengakses informasi dari penda dengan lebih cepat. Kolaborasi ini tidak hanya akan membantu RRI mendiversifikasi kontennya, tetapi juga memungkinkan RRI untuk tetap berada di garis depan inovasi teknologi dan menjangkau audiens baru di tingkat global.

F. Menjamin Aksesibilitas dan Inklusivitas

RRI memastikan bahwa transformasi digital ini memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi canggih. Dengan menawarkan konten dalam berbagai bahasa, menyediakan fitur aksesibilitas seperti *subtitle* dan deskripsi audio, serta membuat konten tersedia melalui solusi *bandwidth* rendah, RRI akan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pergeseran digital ini.

RRI menjamin untuk terus menyediakan konten berkualitas dan relevan bagi publik Indonesia di era digital. Dengan mengadopsi strategi konten *multiplatform*, memperkuat infrastruktur digital, dan mendorong kolaborasi, RRI akan terus memainkan peran vital dalam lanskap media nasional maupun internasional.

Sebagai bagian dari pilar informasi nasional, RRI memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif pemerintah dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, RRI turut

berkontribusi dalam mengawal perjalanan pembangunan nasional menuju pencapaian yang lebih baik di masa depan.

Dalam upaya mengimplementasikan dukungan RRI terhadap 8 Prioritas Nasional, RRI memperkuat proses bisnisnya dengan pendekatan 5 Pilar yang terdiri dari:

1) RRI sebagai Radio

Radio tentunya menjadi pilar utama, RRI menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan melalui siaran radio. RRI memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat secara akurat dan terpercaya, sekaligus menjadi kanal utama dalam membangun kesadaran publik terhadap arah pembangunan nasional.

2) RRI sebagai Berita *Online*

Sebagai bentuk amplifikasi dari siaran radio, RRI menghadirkan portal berita *online* untuk memperluas akses informasi secara digital. Dengan kecepatan dan kemudahan akses, berita *online* RRI memperkuat diseminasi informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi yang terbiasa mengakses informasi melalui internet.

3) RRI sebagai *Platform* Digital

Untuk mendukung transformasi digital, RRI mengembangkan platform digital yang menyediakan layanan streaming, podcast, dan konten *on-demand*. Pilar ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan program RRI kapan saja dan di mana saja, menjadikan RRI lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumsi media di era digital.

4) RRI sebagai Media Sosial

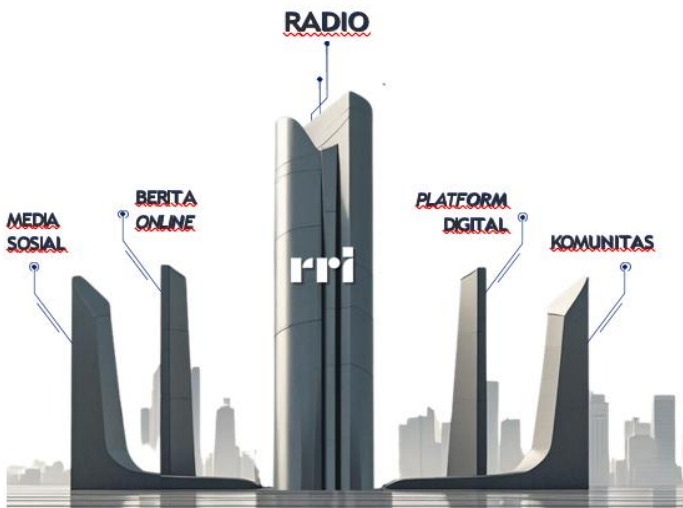
RRI memanfaatkan media sosial sebagai kanal interaktif untuk menyampaikan informasi, menjaring aspirasi, serta membangun kedekatan dengan publik. Dengan gaya komunikasi yang lebih dinamis dan partisipatif, RRI memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat digital, terutama untuk memberikan pendekatan yang lebih relevan terhadap generasi muda.

5) RRI sebagai Komunitas

Pilar ini menegaskan peran RRI sebagai penghubung antar kelompok masyarakat melalui program berbasis komunitas. RRI aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat partisipasi publik, menggali potensi lokal, dan menyuarakan aspirasi warga, sehingga pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan dan harapan masyarakat.

Konsep 5 Pilar RRI ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agar dapat berdiri kokoh dalam persaingan global, RRI harus hadir dalam berbagai platform. Setiap platform berfungsi untuk menopang dan memperkuat satu sama lain. Kelima pilar ini diimplementasikan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target-target RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan sektor strategis lainnya. RRI juga akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Gambar 1.14 Pilar LPP RRI



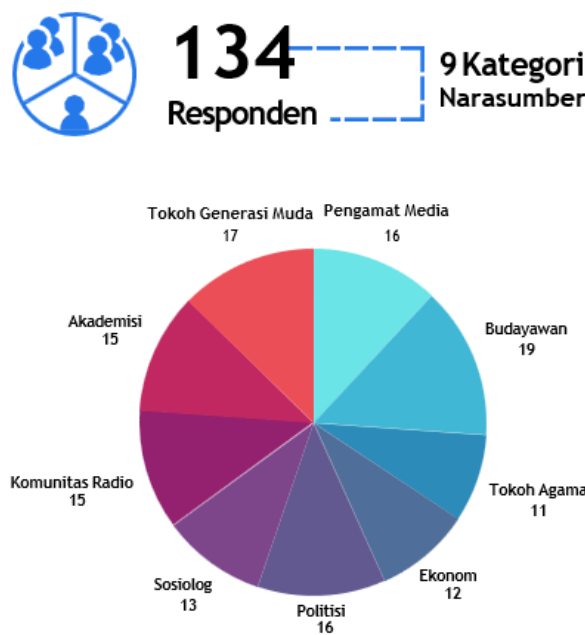
1.1.3 Aspirasi Masyarakat

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini, RRI juga menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan, sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Sebagai LPP, tentunya aspirasi publik atau masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan. Maka dari itu, RRI menyelenggarakan dua kegiatan untuk dapat mengakomodir aspirasi-aspirasi berupa saran, pendapat ataupun rekomendasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk:

A. Survei Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan survei ini diselenggarakan pada tanggal 24–28 Juni 2024 dengan metode wawancara yang dilakukan oleh para reporter LPP RRI dari 21 Satuan Kerja yang mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Jumlah responden atau narasumber yang diwawancarai pada survei ini sebanyak 134 responden, yang terdiri dari 9 kategori narasumber, meliputi: 16 pengamat media, 19 budayawan, 12 ekonom, 13 sosiolog, 15 akademisi, 11 tokoh agama, 16 politisi, 15 perwakilan komunitas pendengar radio dan 17 tokoh generasi muda.

Gambar 1.15 Pemetaan Responden Survei Aspirasi Masyarakat



Berikut ini merupakan ringkasan jawaban atau aspirasi terbuka terhadap LPP RRI yang disampaikan oleh masing-masing kategori narasumber:

1) Pengamat Media

- a. RRI diharapkan mampu menyerap aspirasi dan melibatkan publik dalam pengembangan layanan dan program siaran;
- b. Pentingnya penguatan *brand* lembaga dan programa/kanal siaran agar lebih dikenal publik;
- c. Penting untuk selalu memastikan keseimbangan pemberitaan (prinsip *cover both side*) dan untuk meliput isu-isu yang luput dari pemberitaan media lainnya;
- d. Perkuat pemberitaan di perbatasan dan wilayah yang minim jaringan internet;
- e. Peningkatan kuantitas dan kapasitas kontributor di daerah.

2) Budayawan

- a. RRI perlu secara konsisten mengangkat terus konten tradisi, kearifan lokal, termasuk pengembangan program berbahasa daerah;
- b. Perlunya peningkatan kompetensi dan wawancara kultural para penyiar,
- c. RRI perlu mengembangkan program seni budaya baik dalam bentuk siaran *online* maupun kegiatan dengan berkolaborasi bersama komunitas seni budaya;
- d. RRI perlu melakukan pendokumentasian konten siaran secara rapi dan berkesinambungan agar menjadi arsip kekayaan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Lembaga.

3) Ekonom

- a. RRI perlu konsisten mengangkat isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti UMKM, agar tercipta rasa keterwakilan dan kepemilikan.
- b. Penguatan layanan siaran dan pengembangan konten lintas *platform*, seperti YouTube dan *live streaming* 24 jam, penting untuk meningkatkan aksesibilitas.
- c. RRI harus responsif terhadap isu-isu nyata di masyarakat serta memberdayakan warga di wilayah 3T melalui pelatihan kontributor berita.
- d. Fungsi kehumasan dan pemasaran perlu diperkuat untuk membangun citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap RRI.

4) Sosiolog

- a. RRI perlu mengembangkan program inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas dan komunitas marjinal.
- b. Perlu siaran edukatif, terutama untuk anak usia dini, serta liputan isu sosial yang luput dari media arus utama.
- c. Siaran analog tetap penting untuk menjangkau daerah tanpa akses internet dan seluler.

5) Akademisi

- a. Dalam menjalankan fungsi informasi, edukasi dan hiburan, RRI perlu mengembangkan program kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan media massa lainnya;
- b. RRI harus mampu menjadi rujukan edukasi dan budaya;
- c. Pentingnya pendekatan konvergensi media dengan mengemas secara kreatif konten siaran lintas kanal dan *platform* agar memperbesar jangkauan lintas segmen pendengar;

- d. Penting untuk dikembangkan format penyajian dan penyampaian siaran baru yang lebih menarik bagi generasi muda.
- 6) Tokoh Agama
 - a. RRI perlu memberi ruang setara bagi semua agama melalui dialog, program siaran, dan kegiatan lintas agama.
 - b. Perlu menjalin kerja sama dengan komunitas dan institusi keagamaan untuk memperkuat peran RRI dalam edukasi toleransi, terutama di tahun politik.
 - c. RRI harus memperbanyak konten positif tentang kebhinekaan yang menyasar generasi muda, seperti milenial, Gen Z, dan Alfa.
- 7) Politisi
 - a. RRI perlu meningkatkan pemasaran dan inovasi untuk mengenalkan *brand* lembaga dan siaran agar lebih dikenal masyarakat;
 - b. Perlu diselenggarakan RRI Award sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat lintas sektor sekaligus ajang promosi kelembagaan;
 - c. Perlu pengembangan program edukasi politik untuk publik, khususnya generasi muda.
- 8) Komunitas Pendengar Radio
 - a. RRI perlu mempromosikan platform digital dan memperkuat kanal siaran secara simultan.
 - b. perlu dilakukan adaptasi teknologi dan minat publik harus didukung gaya siaran yang kreatif dan menarik.
 - c. Peningkatan kualitas SDM penting untuk mendukung transformasi siaran.
 - d. Program siaran harus konsisten, khas, dan berbasis aspirasi masyarakat.
- 9) Tokoh Generasi Muda
 - a. RRI harus menjadi wadah ekspresi anak muda melalui layanan, program, *event*, dan *platform* yang dimiliki.
 - b. Disarankan untuk menggunakan *platform* populer dan dekat dengan anak muda dengan kemasan program yang kreatif.
 - c. RRI perlu melakukan kampanye *brand* yang proaktif dan inovatif di media sosial.
 - d. Berkolaborasi dengan *content creator* dan *influencer* untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan publik.
 - e. RRI perlu tangkap dan respon aspirasi serta kebutuhan anak muda secara aktif dalam pengembangan konten.

Dari seluruh aspirasi dan pendapat masyarakat yang terpaparkan di atas, dapat dirangkumkan menjadi 10 aspirasi utama untuk RRI, yaitu:

- (1) Perlunya transformasi digital menyeluruh untuk meningkatkan layanan RRI.
- (2) RRI perlu melakukan optimalisasi teknologi informasi dan pendekatan *multiplatform* secara efektif.
- (3) Peningkatan kualitas konten siaran yang kreatif dan inovatif.
- (4) RRI harus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik.
- (5) Siaran harus mencerminkan informasi yang relevan bagi masyarakat.
- (6) Pengemasan siaran RRI diharapkan lebih luwes dan menarik, menghindari kesan kaku.

- (7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk profesionalisme.
- (8) Perluasan pelibatan konten kreator sebagai mitra strategis.
- (9) RRI diharapkan dapat menjadi ruang ekspresi publik yang inklusif dan representatif.
- (10) Perluasan jangkauan layanan hingga pelosok negeri tanpa terkecuali.

B. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *Stakeholder* Terkait

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis, RRI juga menyelenggarakan FGD dengan beberapa *stakeholder* yang memiliki relevansi dengan RRI, yang terdiri dari pemerhati media, akademisi, budayawan dan praktisi media radio swasta lainnya. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholder* dalam mempertajam perumusan arah kebijakan dan sasaran strategis LPP RRI. Adapun ringkasan hasil diskusi sebagai berikut:

- (1) RRI dinilai bisa menjadi media yang memberikan pencerahan, membangun dan menjaga kesadaran, serta pemberdayaan masyarakat. RRI juga bisa menjadi jembatan antar-masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya.
- (2) RRI harus hadir sebagai media yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengenalkan nilai-nilai keindonesiaan. LPP RRI dinilai dapat membangun *positioning* sebagai media yang terpercaya dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia.
- (3) RRI harus selalu menghadirkan isu-isu yang terkini dan hangat di masyarakat, selain itu juga menjadi media yang dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat, bahkan menjadi sebuah medium dalam penanganan sebuah isu yang sedang berkembang atau disebut dengan jurnalisme solusi.
- (4) RRI perlu melakukan transformasi ke ranah digital, bahkan hadir dalam *multiplatform* dan melakukan pemanfaatan teknologi AI lebih serius agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas SDM RRI dalam bidang teknologi digital.
- (5) Relevansi konten dengan kebutuhan *audiens* atau masyarakat dinilai sangat penting. Di sisi lain, LPP RRI hadir sebagai corong negara, namun LPP RRI juga dituntut untuk menyuguhkan kreasi konten yang relevan dan dekat dengan masyarakat.

1.2. Tantangan & Potensi

Gelombang perubahan teknologi sekarang ini demikian pesat sehingga mengubah lanskap media massa. Hal ini tentu saja membawa manfaat besar bagi konsumen/masyarakat, karena lebih banyak pilihan daripada sebelumnya, tetapi hal ini juga membawa permasalahan baru bagi media massa, bagi masyarakat dan individu.

RRI seringkali disebut sebagai macan tidur. Artinya, RRI memiliki potensi besar tetapi juga menghadapi tantangan yang perlu untuk diselesaikan. Secara clustering, ada tiga tantangan yang dihadapi oleh RRI, yaitu tantangan infrastruktur dengan target utama tersedianya fasilitas dan jaringan pemancaran secara terestrial maupun digital untuk menjangkau seluas-luasnya masyarakat. Kedua, tantangan pengelolaan program dan konten dengan sasaran dapat menguatkan kepercayaan masyarakat atas program konten yang disajikan agar relevan, berdampak dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Tantangan ini sedikit banyak juga dipengaruhi tren perubahan konsumsi media oleh publik. Ketiga,

tantangan tata kelola kelembagaan maupun sumber daya yang dimiliki oleh RRI.

Di samping itu, Industri media massa tengah mengalami transformasi besar seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Pergeseran ini berdampak pada berbagai aspek, mulai dari pangsa pasar iklan, pola konsumsi media oleh publik, hingga regulasi yang harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru.

Selain itu, terjadi pergeseran pola penyiaran berbasis *multiplatform*, konten kini tidak lagi hanya disiarkan melalui satu *platform* saja, tetapi didistribusikan secara simultan ke berbagai *platform*, baik radio, televisi, maupun media digital. Preferensi publik dalam mengkonsumsi media juga mengalami perubahan, dengan kecenderungan beralih ke konten *on-demand* yang dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Menanggapi perubahan ini, pemerintah tengah mengkaji Revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan transformasi digital yang terus berkembang. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi industri penyiaran dalam menghadapi era digital.

1.2.1. Tantangan

RRI menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat terus memperkuat perannya sebagai media penyiaran publik yang relevan, adaptif, dan berdaya saing. Tantangan ini mencakup tantangan internal dan eksternal yang berhubungan dengan perubahan teknologi, perilaku konsumen media, serta isu-isu manajerial dan regulasi yang mempengaruhi efektivitas operasional RRI.

1) Tantangan Pengelolaan Program dan Konten dalam Ekosistem Terestrial dan Digital

RRI memiliki potensi besar untuk menjadi kanal utama diseminasi informasi publik yang terpercaya dan inklusif. Namun, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan perilaku konsumsi media masyarakat yang semakin digital dan interaktif, menuntut penyesuaian strategis yang menyeluruh.

Selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan program dan konten yang menarik dan relevan dengan kebutuhan publik. Indikator jumlah pendengar dan pengakses penting untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa besar publik menyimak program dan konten RRI. Dari segi *platform*, pola konsumsi media oleh masyarakat juga berubah. Publik tetap mendengarkan siaran radio secara *broadcast*, namun kebutuhan publik terhadap program-program yang bersifat *on-demand* juga menjadi hal yang perlu dipenuhi oleh RRI.

Segmentasi program RRI masih perlu dipertajam agar lebih sesuai dengan karakter *audiens* yang semakin spesifik, baik secara demografis maupun psikografis. Di sisi lain, belum banyak media yang mampu menyampaikan program pemerintah secara komprehensif dan konsisten. RRI dapat mengisi ruang ini, namun dibutuhkan peningkatan kualitas konten, penguatan platform digital, serta pendekatan editorial yang lebih terarah. Selain itu, banyak narasi pembangunan yang belum tersebar secara masif, sementara di sisi lain, munculnya propaganda negatif dapat menciptakan persepsi keliru dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Potensi RRI juga belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam mendukung ekosistem informasi nasional, khususnya melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan pengelolaan *big data*. Sistem distribusi informasi internal RRI yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya sinergi dalam pusat satu data nasional, menjadi ruang perbaikan penting agar RRI dapat berperan lebih aktif sebagai simpul

informasi terpercaya. Di tingkat global, *Voice of Indonesia* (VOI) memiliki peran strategis dalam membangun citra Indonesia, namun masih perlu penguatan baik dari sisi teknologi digital, kreativitas konten, maupun kemitraan dengan mitra strategis dan potensial. Dari sisi kelembagaan, *branding* RRI belum sepenuhnya menjangkau generasi muda, dan citra sebagai media publik modern masih perlu diperkuat. Untuk itu, pengembangan konten berkualitas, strategi digital yang adaptif, dan monetisasi *platform* menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian anggaran dan memperkuat peran RRI sebagai media publik yang relevan dan terpercaya di era konvergensi media. Dalam kaitannya dengan penguatan *positioning*, jenama RRI pada program dan *platform* yang digunakan perlu dioptimalisasikan guna meningkatkan citra RRI. Kegiatan- kegiatan yang bersifat *on-stage* atau dilaksanakan secara terbuka sejatinya dapat menguatkan jenama RRI di tengah masyarakat. RRI perlu mengimplementasikan strategi *brand communication* secara menyeluruh dan konsisten.

2) Tantangan Infrastruktur dan Transformasi Digital RRI dalam Menjawab Kesenjangan Akses Informasi

Sebagai upaya dukungan peningkatan kualitas konten dan siaran publik, RRI dihadapkan pada tantangan mendasar terkait kesiapan infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan akses informasi, terutama di wilayah 3T dan daerah *blank spot*, berpotensi memperlemah peran RRI dalam menjamin hak publik atas informasi yang adil dan setara.

Ketergantungan terhadap penggunaan teknologi luar negeri serta keterbatasan anggaran menyebabkan revitalisasi studio, pemancar, dan perangkat siaran berjalan secara terbatas dan belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Dalam konteks kebencanaan, sistem EWS yang seharusnya menjadi bagian penting dari fungsi layanan publik RRI, belum terintegrasi secara optimal karena lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, ketiadaan produsen lokal untuk perangkat radio berteknologi DAB+ dan DRM juga masih menjadi hambatan. Tanpa percepatan penguatan infrastruktur ini, RRI berisiko kehilangan peran strategisnya dalam konteks kedaruratan, mitigasi bencana, dan pelayanan publik berbasis siaran.

Di sisi lain, transformasi digital yang sedang berlangsung belum sepenuhnya terstruktur dalam sistem kerja internal RRI. Belum adanya unit kerja khusus yang menangani teknologi digital dan layanan *multiplatform* menjadi penghambat utama dalam pengelolaan siaran berbasis data dan distribusi konten digital secara efisien. Sistem informasi dan distribusi berita antarsatuan kerja yang masih terfragmentasi dan belum *real-time* perlu segera dibenahi agar RRI dapat menjadi *leading player* pada lanskap media nasional. Oleh karena itu, kebijakan perluasan jangkauan siaran nasional, digitalisasi, serta pembangunan dan standarisasi infrastruktur TIK, menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya jangkau, efektivitas penyampaian informasi, dan ketangguhan kelembagaan dalam menghadapi dinamika industri media global. Dengan infrastruktur yang merata dan sistem informasi yang saling terhubung, RRI akan semakin siap menjawab tuntutan masyarakat akan akses informasi yang cepat, tangguh, dan inklusif.

Penguatan teknologi teresterial memiliki kekhasan tersendiri, namun tetap harus dilakukan. Salah satunya adalah penguatan pemancaran siaran melalui gelombang FM, AM, dan gelombang pendek frekuensi tinggi (*Short Wave*).

Teknologi penyiaran SW ini tidak masif dikenal publik, namun memiliki kekhasan karakter untuk menjangkau publik yang lebih luas,

di wilayah yang jauh, terutama bagi pendengar internasional. Sedangkan teknologi jaringan FM juga menghadapi tantangan untuk penyesuaian dengan pengembangan terestrial digital. Beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India masih sangat dominan dalam penggunaan teknologi pemancaran radio secara terestrial.

3) Tantangan Transformasi Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan RRI dalam Meningkatkan Efisiensi dan Profesionalisme

Sebagai lanjutan dari upaya memperkuat konten dan infrastruktur penyiaran, RRI juga perlu membenahi aspek fundamental kelembagaan, yakni kualitas layanan manajemen internal dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menuntut adanya transformasi SDM yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perubahan. Namun, kompetensi SDM di lingkungan RRI cenderung belum merata, sistem rekrutmen belum sepenuhnya berbasis kebutuhan nyata lembaga, dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) belum berkelanjutan.

Ketidaksesuaian antara kompetensi dan distribusi SDM juga berdampak pada rendahnya efisiensi kerja dan kurang optimalnya kinerja unit-unit strategis. Untuk itu, transformasi manajemen SDM secara terstruktur dan terukur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan orientasi kerja yang sejalan dengan arah transformasi digital dan layanan publik modern.

Dinamika regulasi nasional dan struktur kelembagaan yang kurang strategis menyebabkan implementasi reformasi birokrasi di RRI belum memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Ketimpangan proporsi anggaran yang terlalu besar terserap pada belanja operasional, pemanfaatan aset yang belum maksimal, serta *database* aset yang tidak mutakhir, semakin memperlemah kapasitas institusi dalam berinovasi. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengawasan internal juga masih memerlukan penguatan.

Melalui optimalisasi manajemen internal yang terstandar dan akuntabel, RRI diarahkan untuk menjadi LPP yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga kredibel, efisien, dan berorientasi hasil dalam menjalankan fungsinya bagi masyarakat luas.

1.2.2. Potensi

RRI memiliki berbagai potensi yang menjadi modal penting bagi bangsa ini untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi dengan nilai-nilai keindonesiaan. Sebagai media yang telah mengudara sejak 1945, RRI memiliki potensi internal yang kuat serta peluang eksternal yang dapat mendukung pencapaian prioritas nasional. Potensi-potensi ini dioptimalkan melalui tugas pokok dan fungsi RRI sebagai media penyiaran publik, meliputi:

1) Landasan Hukum LPP RRI

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Keberadaan regulasi dimaksud menjadi dasar RRI menyelenggarakan siaran yang mencakup seluruh NKRI guna mendukung pembangunan bangsa, memperkuat identitas

nasional, serta menjaga keberagaman budaya dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Jangkauan Siaran yang Luas
- Dengan 69 stasiun siaran dan 30 studio produksi yang tersebar di seluruh Indonesia, RRI memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah 3T. Hal ini memberi RRI keunggulan sebagai agen penyebaran pemerataan informasi yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

Tabel 1.1 Alokasi Pemancar Analog LPP RRI (FM, MW dan SW)

No	Tipe	Jumlah (Unit)	Range Power (kW)	Range Frekuensi (MHz)	Jumlah Konten / Pemancar	Keterangan
1	FM	609	0.1 - 30	87.7 - 107.5	1	Analog (22% dapat diubah ke DRM namun perlu perangkat tambahan)
2	MW	73	2.5 - 10	0.5 - 1	1	Analog (82% dapat diubah ke DRM namun perlu perangkat tambahan)
3	SW	4	1 - 40	3 - 7	1	Analog

Tabel 1.2 Alokasi Pemancar Digital DAB+ LPP RRI

No	Lokasi	Power (kW)	Frekuensi (MHz)	Jumlah Konten	Keterangan
1	Jakarta	2.5	229.072	8	Full Digital
2	Bandung	0.5	229.072	8	Full Digital
3	Surabaya	1.7	229.072	8	Full Digital
4	Semarang	2.5	229.072	16	Full Digital
5	Yogyakarta	2.5	229.072	16	Full Digital
6	Malang	2.5	208.064	16	Full Digital

Tabel 1.3 Alokasi Pemancar Digital DRM LPP RRI

No	Lokasi	Power (kW)	Frekuensi (MHz)	Jumlah Konten	Keterangan
1	Painan - Pesisir Selatan	1	97.9 (A); 98.05 (D)	3 + Journaline	Dualcast
2	Labuan - Padeglang	1	88.8 (A); 88.9 (D)	3 + Journaline	Dualcast
3	Pelabuhan Ratu - Sukabumi	1	98.2 (A); 98.35 (D)	3 + Journaline	Dualcast
4	Gunung Depok - Banyumas	1	89.2 (A); 89.35 (D)	3 + Journaline	Dualcast
5	Labuan Bajo - Manggarai Barat	1	90.9 (A); 91.0 (D)	3 + Journaline	Dualcast
6	Gunung Sitoli - Nias	1	90.3 (A); 90.5 (D)	3 + Journaline	Dualcast
7	Bengkulu	1	98.4	3 + Journaline	Full Digital
8	Kaliurang - Sleman	1	87.1	3 + Journaline	Full Digital

3) Pemanfaatan Teknologi Terbaru

LPP RRI terus mengikuti perkembangan pesat industri media dengan melakukan transformasi digital yang signifikan. Hal ini tercermin dalam penerapan teknologi terkini, seperti Digital Audio Broadcasting (DAB+) dan Digital Radio Mondiale (DRM), serta pengembangan platform multiplatform. Upaya ini memastikan LPP RRI tetap relevan di era digital, memudahkan akses bagi audiens yang semakin beragam, dan mampu menjangkau pendengar yang semakin bergantung pada teknologi untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

4) Kedekatan dengan Masyarakat Lokal

LPP RRI memiliki keunggulan dalam kedekatannya dengan masyarakat lokal. Dengan jaringan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, LPP RRI mampu berinteraksi langsung dengan audiens di berbagai daerah, memahami kebutuhan mereka, dan menyesuaikan konten agar lebih relevan serta menarik. Hal ini terbukti melalui tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan LPP RRI, seperti Festival Pelajar Nusantara (FPN) pada 23-27 Oktober 2022 yang diikuti oleh 113.808 pelajar dari seluruh Indonesia, Kegiatan Bintang Radio Indonesia 2024 yang melibatkan 3.956 peserta dan disaksikan secara offline oleh 6.885 orang. Selain itu, LPP RRI juga aktif memberikan wadah untuk para pelaku UMKM, baik melalui kanal siaran, ruang khusus UMKM pada RRI Digital, hingga kegiatan Bazar UMKM.

Selain itu, Konser Pesta Rakyat Surabaya pada 24 September 2024 di Surabaya Expo Centre berhasil menarik 11.990 penonton. Kedekatan dengan masyarakat lokal ini juga menjadi modal penting bagi LPP RRI untuk terus relevan, berdampak dan menginspirasi dengan nilai-nilai keindonesiaan guna mendukung tercapainya tujuan lembaga serta program prioritas nasional.

5) Segmentasi Audiens Beragam

Dengan keunggulan kuantitas program dan kanal yang dimiliki oleh LPP RRI, LPP RRI memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kontennya dengan berbagai segmen audiens yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pendengar. Hal ini menjadi peluang yang memungkinkan LPP RRI untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan usia. Selain itu, penajaman dan penyesuaian segmentasi ini juga diperuntukan pada platform-platform yang dimiliki LPP RRI agar tetap relevan dengan keinginan dan kebutuhan publik. Ini memberi LPP RRI fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, dan edukasi masyarakat.

6) Audiens Share yang Signifikan

Dengan pangsa pendengar mencapai 46,4% dari pasar radio nasional, LPP RRI menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah pendengar radio di Indonesia tidak signifikan dibandingkan audiens pada platform lain, posisi LPP RRI yang mendominasi di pasar radio tetap memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengaruhnya di sektor penyiaran publik.

7) Reputasi sebagai Media Terpercaya

LPP RRI dikenal sebagai media yang memiliki reputasi baik dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan rilis riset Nielsen 2024, LPP RRI didengarkan oleh masyarakat karena siarannya yang *up-to-date*,

menarik, informatif, serta menghadirkan konten yang beragam dan menghibur. Sejak tahun 2021, LPP RRI berhasil memperoleh dan mempertahankan predikat sebagai Lembaga Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2024, LPP RRI berhasil meraih 111 penghargaan atas capaian-capaian primanya, baik di tingkat nasional maupun internasional, salah satunya penghargaan dari *Asia Pacific Broadcasting Union*, *The ABU Prizes 2024* pada kategori Audio Drama “*Investigation Dawar Island*”, Audio Podcast “*The Everlasting Oral Tradition of Kejung*” dan *Audio on Air Personality* “*Melodies for Indonesian Children*”, serta penghargaan tambahan sebagai *Radio Community Service Announcement Special Commendation*.

8) Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara

Didukung oleh jaringan luas dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, LPP RRI secara aktif menjalin kolaborasi dengan kementerian dan lembaga negara dalam pengembangan layanan, program, dan kegiatan untuk mendukung tercapainya program prioritas nasional secara lintas sektor.

Salah satu potensi besar yang bisa dimanfaatkan adalah dengan melihat hasil data radio yang menjadi sumber informasi Pemilu kedua terbanyak setelah televisi, yaitu mencapai 62,8% pada tahun 2024, dan sebanyak 79.6%- nya menyatakan bahwa mereka mendengarkan informasi Pemilu melalui LPP RRI (Data Nielsen Audience Measurement, 2024). Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama erat LPP RRI dengan KPU RI dalam mengembangkan siaran Pemilu, seperti Gerakan Cerdas Memilih (GCM), *Quick Report* Pemilu, dan Dialog Pasca Pemilu 2024 yang diselenggarakan serentak oleh seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam upaya mendukung penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleransi antarumat beragama, LPP RRI bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) LPP RRI Tingkat Nasional ke-54 pada 21–26 Maret 2024 di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Dengan tema "Internalisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Bagi Generasi Milenial Menuju Indonesia Emas", acara ini turut memperkuat komitmen LPP RRI dalam mendukung nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman.

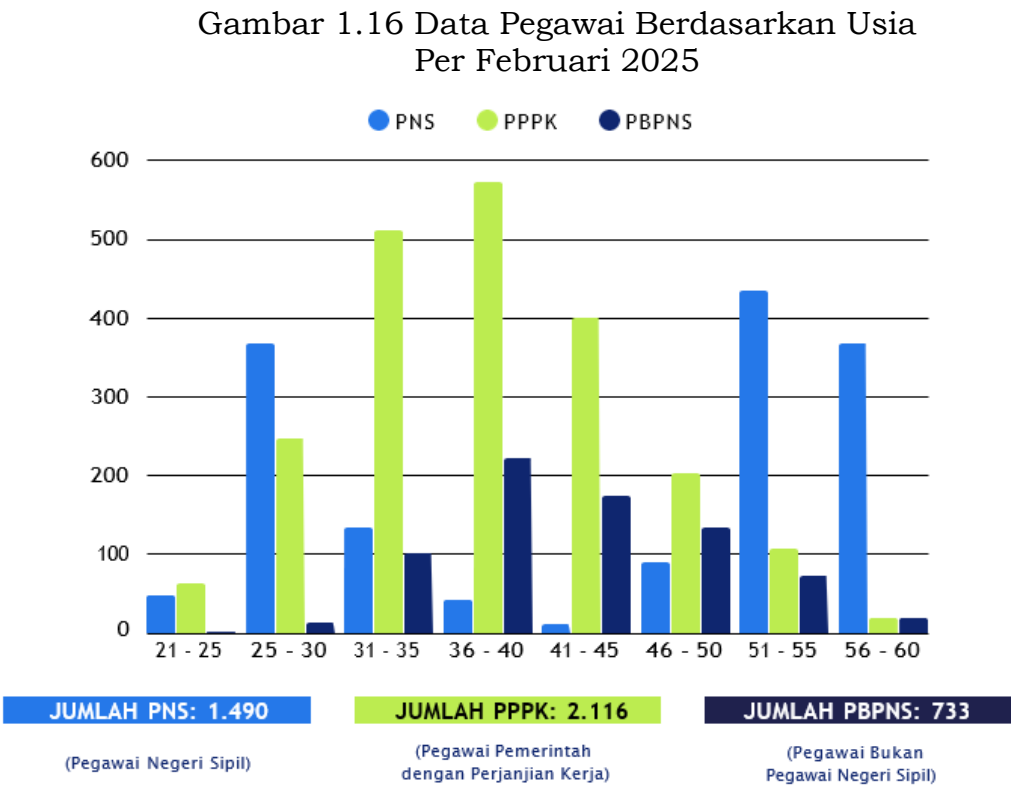
9) Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Aset yang Mendukung

Dari aspek sumber daya manusia (SDM), secara kuantitas, LPP RRI memiliki 4.399 pegawai per Februari 2025 yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 1.490 pegawai, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 2.116 pegawai, dan PBPNS (Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 733 pegawai.

Selain itu, LPP RRI juga memiliki dukungan aset berupa tanah, gedung, tower, pemancar, dan peralatan siaran yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi kekuatan utama untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Dukungan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) LPP RRI dapat dikategorikan cukup memadai dalam mendukung operasional dan pengembangan infrastruktur, walaupun belum tergolong optimal. Selain itu, aset yang dimiliki LPP RRI memberikan potensi untuk dimanfaatkan lebih maksimal, baik dalam hal penyebaran informasi maupun pengembangan program siaran.

Melalui berbagai potensi sumber daya ini, LPP RRI memiliki landasan yang kuat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperkuat perannya sebagai media penyiaran publik yang

relevan, berdampak dan menginspirasi dengan nilai-nilai keindonesiaan.



10) Optimalisasi Monetisasi Siaran

Dalam era transformasi digital yang kian pesat, LPP RRI memiliki peluang strategis untuk menciptakan kemandirian lembaga melalui optimalisasi digitalisasi jasa penyiaran. Melalui pengembangan layanan penyiaran berbasis multiplatform, LPP RRI dapat menjangkau audiens yang lebih luas, menghadirkan konten yang relevan dan interaktif, serta membuka berbagai model bisnis baru yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). LPP RRI secara proaktif telah menempuh strategi pencarian sumber pendapatan alternatif sebagai suplemen pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), langkah ini menjadi penting karena dua alasan utama. Pertama, LPP RRI memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi- fungsi strategis penyiaran publik, dan kedua adalah terkait kebutuhan operasional dan pengembangan LPP RRI yang lebih besar dari alokasi pendanaan yang bersumber dari APBN.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah disusun memberikan angin segar dengan semakin terbukanya ruang bagi penyiaran radio digital dan multiplatform. Hal ini memungkinkan LPP RRI untuk memperluas ekosistem layanannya, tidak hanya sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan yang mencerdaskan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi ini juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan layanan dan kolaborasi lebih besar dari berbagai pihak, baik dari sektor teknologi, konten kreatif, maupun dunia usaha. Dengan mengoptimalkan potensi ini, LPP RRI dapat bergerak menuju lembaga penyiaran publik yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

BAB II

VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis RRI didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029. Visi Pembangunan Nasional merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025- 2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini merupakan upaya kolektif dalam memajukan Indonesia, dengan tujuan besar menyongsong **Indonesia Emas 2045**, usia 100 (seratus) tahun kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan **8 Misi Strategis**, yakni Asta Cita, **17 Program Prioritas** dan **8 Program Hasil Terbaik Cepat**.

Dalam upaya mendukung penuh Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025 – 2029, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagaimana tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang RRI sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2024, maka RRI menetapkan Visi dan Misi yang disusun secara terarah, terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perubahan, dalam upaya mendukung dan mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional.

Gambar 2.1 Penjabaran Visi Misi Presiden RRI Tahun 2025-2029



RRI menempatkan dirinya untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik dengan materi yang komprehensif. Dalam kaitannya dengan RPJMN, RRI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menginformasikan dan memberikan edukasi tentang program prioritas yang telah disusun. Sementara dengan kaitannya sebagai LPP, RRI juga tetap memberi ruang kepada khalayak luas untuk terlibat dalam penyiaran program di RRI

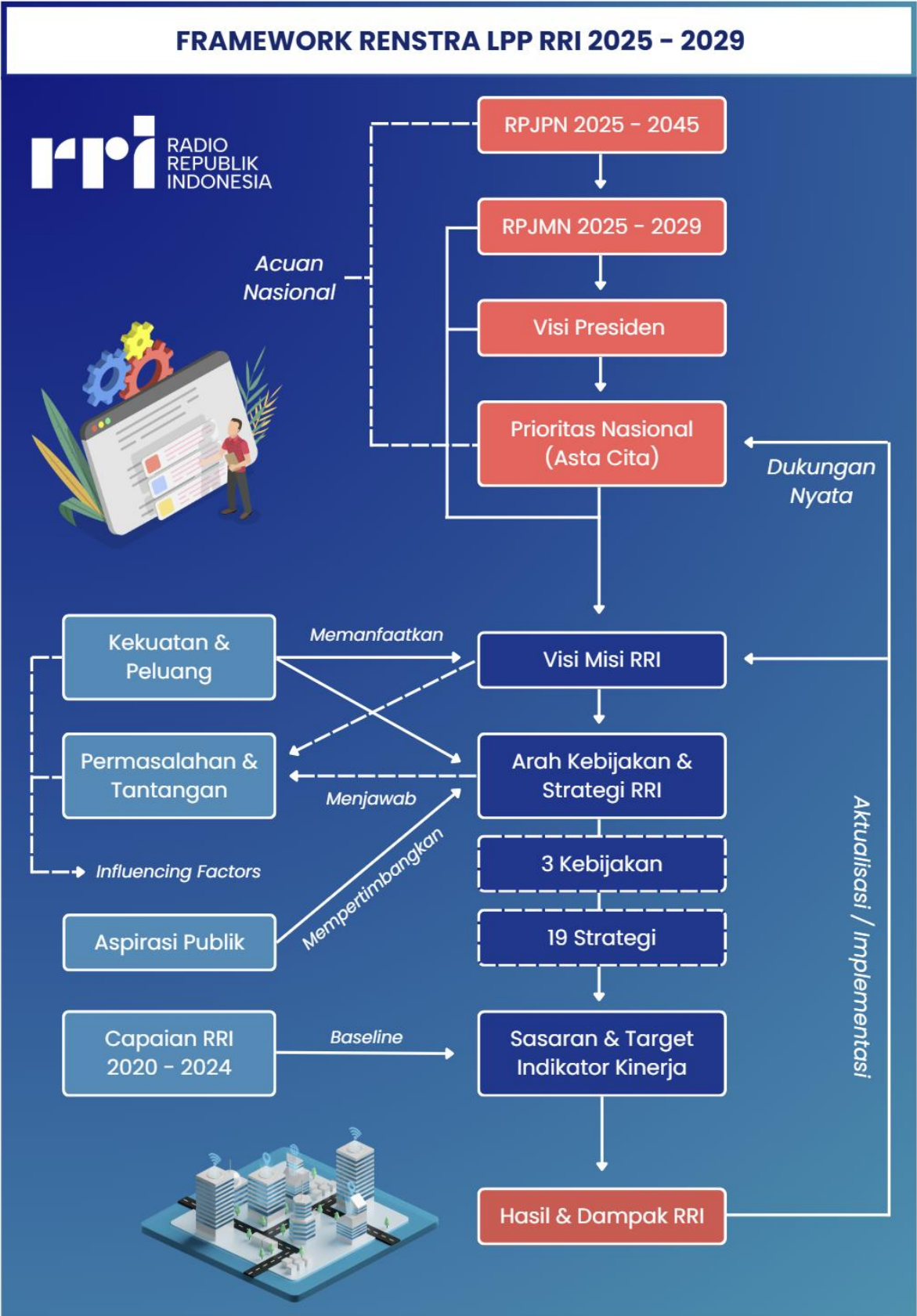
secara proporsional dengan mengusung *cover both-sides* yang terverifikasi. Seiring dengan hadirnya kepemimpinan nasional untuk periode 2025-2029, RRI berkomitmen mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

RRI siap berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi, membangun kesadaran publik, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 8 Program Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan. Dalam rangka mengoptimalikan perannya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI melakukan penguatan infrastruktur penyiaran guna memastikan akses siaran yang merata, meningkatkan kualitas penyiaran, serta memperluas jangkauan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Dalam konteks ini, RRI mengambil beberapa peranan inisiatif yang meliputi:

- Penguatan infrastruktur penyiaran terrestrial dan digital, yang meliputi perangkat pemancar dan studio guna meningkatkan kualitas siaran.
- Mengembangkan jaringan penyiaran analog dan digital terrestrial, termasuk pada wilayah 3T dan area blank spot, agar layanan informasi dapat menjangkau lebih banyak pendengar.
- Mewujudkan ruang digital yang kondusif dengan mengembangkan program-program siaran yang mendorong edukasi, kolaborasi, dan inovasi berbasis komunitas.
- Memberikan akses informasi yang berkualitas guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan masyarakat.
- Pengembangan berbagai platform digital yang memungkinkan akses lebih luas bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih besar.

Gambar 2.2 Framework Renstra RRI 2025 - 2029



Sejarah mencatat, RRI berperan penting dalam upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sementara itu, dari masa ke masa, RRI terus mempertahankan jati dirinya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat juang para pendiri RRI, menjadi pedoman para angkasawan dan angkasawati dalam berkarya. Terkait itu, terdapat falsafah profesi menjadi landasan yang tertuang dalam Tri Prasetya, yang terdiri dari:

- 1) Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara

kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

- 2) Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
- 3) Kita harus berdiri diatas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk opini, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga keutuhan negara, RRI senantiasa berlandaskan pada Tri Prasetya. Nilai – nilai ini menjadi fondasi moral dan profesional bagi seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas jurnalistik dan penyiaran, sekaligus menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada semangat kebangsaan, integritas, dan persatuan. Penyiaran RRI selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan memberi ruang bagi publik untuk berekspresi.

Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam program siaran, maka ada beberapa hal penting yang menjadi acuan.

- 1) Media Verifikator yang Akurat dan Terpercaya
Berlandaskan amanat Tri Prasetya untuk menjaga alat siaran sebagai sarana perjuangan, RRI memposisikan kebenaran, akurasi, dan integritas informasi sebagai prinsip dasar. Di tengah gempuran disinformasi, misinformasi, malinformasi dan *deepfake* (manipulasi informasi), kehadiran RRI menjadi semakin krusial. RRI hadir bukan sekadar sebagai penyampai berita, tetapi sebagai media publik terpercaya yang menjalankan fungsi verifikasi untuk memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. RRI berkomitmen memperkuat posisinya sebagai *The Most Trusted, Verified and Accurate Media*, dengan selalu menghadirkan berita yang mencerahkan, menjaga keutuhan bangsa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah tantangan ekosistem media digital yang kian kompleks. Selain itu, penting dalam penyajian program dan informasi, memenuhi etika yang berlaku secara nasional oleh Dewan Pers, KPI dan peraturan atau norma terkait
- 2) Proporsional terhadap Keragaman Masyarakat
Sebagai alat perjuangan yang mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, RRI tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi serta hiburan yang mencerdaskan. RRI percaya bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan wawasan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program yang ditayangkan harus mengandung nilai- nilai pendidikan, budaya, dan hiburan yang sehat, sehingga dapat membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berbudaya. Program RRI secara khusus memberikan layanan kepada kaum minoritas, termasuk kalangan disabilitas maupun kelompok marginal lainnya.
- 3) Mendukung Program Presiden bagi Keberhasilan Asta Cita
Sebagai bagian dari organisasi Kementerian/Lembaga, RRI juga turut menjalankan program dan menyajikan informasi terkait dengan Asta Cita yang secara khusus berupa program prioritas presiden. Program-program tersebut dikemas secara baik dan menarik sehingga dapat berdampak di tengah masyarakat seperti program MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes MP, Sekolah Unggul Garuda, Swasembada Pangan, hingga Pertumbuhan Ekonomi 8%. Hal ini adalah komitmen RRI untuk

bersama-sama memajukan bangsa dan negara, serta mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan berpijak pada prinsip persatuan bangsa dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, RRI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung program-program pembangunan nasional dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam setiap siaran dan aktivitasnya, RRI senantiasa menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan sebagai kekayaan bangsa. RRI hadir untuk semua, melampaui sekat-sekat kelompok, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan bersatu.

2.1. Visi

Transformasi lanskap media global yang ditandai oleh disrupsi informasi, fragmentasi audiens, serta derasnya arus disinformasi dan misinformasi menuntut RRI untuk melakukan reformulasi visi kelembagaan. Kehadiran teknologi seperti AI, maraknya konten instan dan algoritmis, serta perubahan perilaku publik yang cenderung memilih *digital on-demand platform* telah memunculkan kebutuhan mendesak bagi RRI untuk tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga tetap relevan, berdampak, dan mampu menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan di tengah arus globalisasi.

RRI berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan pelestarian kebudayaan nasional serta daerah. Sebagai institusi yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, RRI tidak hanya fokus pada transformasi digital, tetapi juga membangun sinergi dengan berbagai sektor, kementerian, lembaga atau pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, berdasarkan kondisi tersebut maka Visi RRI 2025 – 2029 yaitu:

“Menjadi Media Relevan, Berdampak, dan Inspirasi Nilai-Nilai Keindonesiaan dalam rangka mewujudkan: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi baru ini menjadi pijakan strategis RRI dalam menjawab tuntutan zaman dan memperkuat fungsi pelayanan publik secara lebih optimal. Visi ini mencerminkan integrasi peran strategis RRI dalam mendukung arah pembangunan nasional, yang terangkum dalam Trisula Pembangunan dan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai media publik, RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi yang akurat dan netral, tetapi juga menjadi *medium* pemersatu bangsa, perekat sosial, dan fasilitator demokrasi yang sehat.

Dengan pendekatan multiplatform, digitalisasi layanan, dan penguatan konten berbasis nilai, RRI menegaskan diri sebagai simpul strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berwawasan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Kehadiran RRI sebagai media yang tepercaya, relevan, dan berdampak menempatkan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan positif di tengah masyarakat.

Visi baru ini hadir sebagai jawaban atas sejumlah isu dan tantangan strategis yang dihadapi saat ini:

- Perubahan kepemimpinan nasional yang membawa fokus pada prioritas pembangunan nasional, menuntut RRI untuk menyesuaikan arah siaran dan kontennya agar selaras dengan agenda besar bangsa.
- Perubahan teknologi global yang bergerak cepat, di mana teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan.

Walaupun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menghadapi dinamika birokrasi yang tidak sefleksibel dibandingkan media swasta, RRI berkomitmen beradaptasi dengan inovasi, modernisasi platform, dan layanan yang relevan bagi publik.

- Kondisi ekosistem informasi yang rentan akibat maraknya *hoax* dan disinformasi, mewajibkan RRI untuk menjadi media verifikator yang akurat, terpercaya, dan berpihak pada kebenaran.
- Penguatan dan transformasi tata kelola lembaga yang menyeluruh membutuhkan dukungan kapasitas SDM yang kompeten, adaptif, dan berintegritas tinggi.
- Perubahan paradigma media massa di mana informasi tidak lagi cukup hanya didengar atau dilihat, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi publik. Dalam hal ini, RRI menegaskan diri sebagai media yang berdampak untuk publik, menginspirasi, membentuk opini, dan mendorong tindakan nyata yang positif demi kemajuan bangsa.

Dengan visi ini, RRI berkomitmen untuk menjadi media publik terpercaya yang terus relevan dengan perkembangan zaman, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Terdapat 4 (empat) kata kunci utama yang tertuang dalam visi baru RRI, yakni “Tepercaya”, “Relevan”, “Berdampak” dan “Menginspirasi Publik dengan Nilai-Nilai Keindonesiaan” yang terdeskripsikan pada uraian sebagai berikut:

1) Tepercaya

- a. Menegakkan Independensi dan Kebenaran Informasi
- b. RRI berkomitmen untuk menjaga independensi redaksional dengan mengutamakan kebenaran dan kepentingan negara dengan memperhatikan kepentingan publik. Setiap informasi yang dipublikasikan objektif, akurat, faktual, dan berimbang.
- c. Menjadi Media Verifikator di Tengah Arus Hoaks dan Misinformasi
- d. Di era penyebaran hoaks dan misinformasi, RRI berperan sebagai media verifikator yang memastikan kebenaran informasi. Setiap berita yang disajikan RRI merupakan hasil kerja jurnalistik yang faktual dan dapat dijadikan rujukan terpercaya
- e. Melaksanakan Tata Kelola Lembaga yang Transparan dan Akuntabel
- f. Prinsip tepercaya juga diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga (*good governance*).

2) Relevan

Sebagai media, teknologi dan organisasi, RRI mampu mengadaptasi kebutuhan, harapan, tantangan zaman, trend dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi media.

- a. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Audiens
Kebutuhan audiens yang sering berubah seiring dengan waktu mewajibkan RRI sebagai media massa untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan
- b. Mengikuti Perkembangan Teknologi
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini membuat RRI sebagai media massa perlu beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada audiensnya.
- c. Meningkatkan Aksesibilitas
Memanfaatkan *platform* digital dan media baru lainnya agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

3) Berdampak

Adanya efek positif dari program, kegiatan, maupun konten-konten yang dihasilkan RRI, berpengaruh kuat untuk pencapaian tujuan

organisasi, publik dan negara, serta mendorong partisipasi publik dan diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan dalam masyarakat.

a. Meningkatkan Kesadaran

RRI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti nasionalisme, kebangsaan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih peduli dan terlibat dalam isu-isu tersebut.

b. Mempengaruhi Persepsi dan Sikap Masyarakat

RRI memiliki jangkauan yang luas dapat membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan memiliki dampak, RRI mampu mempengaruhi opini *public* dan mempromosikan perubahan yang positif.

c. Menggerakkan Aksi dan Perubahan Nyata

Dampak RRI tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk bertindak. Melalui kampanye publik, dialog interaktif, dan program berbasis solusi, RRI menggerakkan publik menuju perubahan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan bagi kemajuan Indonesia.

4) Menginspirasi Nilai Publik dengan Nilai-Nilai Keindonesiaan

a. Membangun Identitas Nasional

RRI membangun dan memperkuat identitas nasional Indonesia dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, serta mempromosikan nilai-nilai gotong royong, kerjasama dan solidaritas, nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.

b. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan

Dengan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan, RRI turut memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta toleransi dan kerukunan antar masyarakat dalam semua program dan konten.

c. Mempromosikan Budaya Indonesia

RRI mempromosikan budaya Indonesia yang kaya dan beragam kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan citra positif bangsa.

d. Menginspirasi Seluruh Generasi

Dalam program dan konten siarannya, baik melalui siaran radio maupun platform lainnya RRI dapat menginspirasi seluruh generasi, terlebih generasi muda Indonesia untuk mencintai nilai – nilai keindonesiaan serta memotivasi generasi muda untuk menjadi bagian dalam pembangunan bangsa.

2.2. Misi

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan di atas, maka Misi RRI dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi, sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program, kegiatan dan konten sesuai dengan fungsi media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas;**
- 2) Menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyiaran terrestrial dan *streaming* digital; dan**
- 3) Mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip *good public governance*.**

Melalui visi dan misi yang selaras dengan pembangunan nasional, RRI memiliki peran strategis sebagai katalisator perubahan, memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi yang kredibel, menginspirasi, dan memajukan bangsa.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi dengan menunjukkan suatu hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Dengan demikian, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu:

- 1) Terlayannya seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui integrasi platform terestrial dan digital, serta kegiatan yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan untuk memperkuat NKRI dan terselenggaranya siaran internasional untuk membangun citra positif bangsa.
- 2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya dan tata kelola manajemen RRI yang dinamis, transparan, akuntabel, dan adaptif.

Uraian penjelasan dari penetapan 2 (dua) tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. RRI senantiasa menyiarkan program, kegiatan, konten dan output siaran yang informatif, edukatif, inspiratif, sekaligus menghibur, sehingga tercipta masyarakat yang literat, harmoni, bermartabat sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan;
- b. Siaran RRI dapat diterima dan dinikmati oleh khalayak di berbagai wilayah tanah air, baik perkotaan, desa, maupun wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta dapat juga diakses oleh masyarakat mancanegara.
- c. Upaya ini dilakukan RRI dengan selalu melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta memperluas penyediaan berbagai *platform* digital (*multiplatform*), sehingga publik semakin mudah mengakses beragam layanan dan program RRI;
- d. RRI senantiasa melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar adaptif dan kompetitif sehingga tetap relevan dengan kemajuan teknologi dan dinamika publik bermedia dalam pencapaian tujuan organisasi.
- e. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan *Corporate University* dengan indikator yang terukur;
- f. RRI berupaya menerapkan dan mengelola kelembagaan agar dinamis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, terutama melalui pembangunan integritas para pegawai, agar selalu adaptif, kompetitif, dan relevan dalam menghadapi tantangan domestik maupun global.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan LPP RRI

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	2025	2029
1	Memberikan Layanan Siaran Berkualitas Sesuai Fungsi Media yang Menginspirasi Seluruh Lapisan Masyarakat dengan Nilai Keindonesiaan Untuk Mendukung Tercapainya Program Prioritas Nasional	Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden	Konten	61.685	160.965
		Indeks tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden	Indeks	6	7
		Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI	Tingkat	70	90
		Persentase Layanan Siaran yang Melibatkan Komunitas Masyarakat	Persentase (%)	10	18
		Jangkauan Penyiaran Radio Terrestrial per Populasi	Persentase (%)	73	85
		Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	Persentase (%)	35	120
		Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Terrestrial RRI	Persentase (%)	1	1
2	Meningkatkan Tata Kelola LPP RRI sesuai Prinsip <i>Good Public Governance</i>	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	80	90

2.4.Sasaran Strategis

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan). Guna mengukur pencapaian sasaran strategis organisasi, perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan prinsip *Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Bound* (SMART).

IKU Penyiaran Publik RRI disusun/ditetapkan berdasarkan penjabaran dan penyelarasan (*cascading*) kinerja untuk memastikan kontribusi kinerja dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja *level* di atasnya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama LPP RRI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2029
1	Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional	Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden	Konten	61.685	160.965
		Indeks Tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden	Indeks	6	7
		Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI	Tingkat	70	90
		Persentase Layanan Siaran yang Melibatkan Komunitas Masyarakat	Persentase (%)	10	18
2	Meningkatnya Jangkauan dan Layanan Siaran Radio serta Penguatan Platform Digital	Jangkauan Penyiaran Radio Teresterial per Populasi	Persentase (%)	73	85
		Persentase Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	Persentase (%)	35	120
		Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Teresterial RRI	Persentase (%)	1	1
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen LPP RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	80	90

2.5. Identifikasi Indikasi Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis RRI, identifikasi terhadap potensi risiko dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan terarah kepada setiap bidang strategis. Untuk sasaran strategis pertama, yakni “Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional”, risiko utama yang diidentifikasi adalah adanya kebijakan pemerintah terkait pemblokiran anggaran. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas dan kegiatan siaran yang telah direncanakan. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan beberapa tindakan yaitu:

- 1) Mengusulkan pembukaan blokir anggaran kepada otoritas terkait;
- 2) Mengubah format acara agar lebih efisien dari sisi pembiayaan; dan
- 3) Mengupayakan dukungan layanan guna terselenggaranya program.

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan mitigasi pembukaan blokir anggaran berada pada Direktur Keuangan. Penyesuaian format acara secara lebih efisiensi merupakan tanggung jawab Direktur Program dan Produksi. Adapun Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha bertanggung jawab terhadap upaya dukungan layanan guna memastikan penyelenggaraan program, yang secara kolaboratif memastikan kegiatan siaran prioritas nasional tetap berjalan sesuai target.

Selanjutnya, sasaran strategis kedua, yaitu “Meningkatnya Jangkauan dan Layanan Siaran Radio serta Penguatan Platform Digital”, memiliki dua risiko utama yang menjadi perhatian Direktorat Teknologi dan Media Baru (TMB). Risiko pertama adalah ketidaktersediaan komponen

peralatan penyiaran akibat produk yang telah dihentikan produksinya (*discontinue*). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat TMB melakukan mapping dan pengalokasian ulang peralatan penyiaran lain yang masih berfungsi agar layanan siaran tetap dapat berjalan optimal. Risiko kedua adalah kerusakan peralatan karena faktor alam, seperti bencana atau cuaca ekstrem. Sebagai langkah mitigasi, Direktorat TMB menyusun standar operasional dan teknis guna memperkuat ketahanan infrastruktur penyiaran terhadap potensi kerusakan tersebut.

Adapun sasaran strategis ketiga, yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif”, menghadapi risiko berupa kesulitan pegawai yang dapat diangkat pada jabatan manajerial karena status kepegawaian. Situasi ini terutama dialami oleh pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum diakomodasi dalam regulasi pengangkatan jabatan manajerial. Sebagai langkah mitigasi, Direktur Utama perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator terkait untuk membuka ruang agar PPPK mendapatkan kesempatan menduduki jabatan manajerial.

Tabel 2.3 Identifikasi Indikasi Risiko

Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1	Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional	Adanya kebijakan pemerintah terkait pemblokiran anggaran	• Mengusulkan buka blokir anggaran • Mengubah format acara dengan biaya lebih efisien • Mengusahakan dukungan layanan untuk terselenggaranya program	• Direktur Keuangan • Direktur Program dan Produksi • Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
		Ketidaktersediaan komponen peralatan penyiaran yang telah berhenti diproduksi	• Melakukan pemetaan terhadap ketersediaan dan pengalokasian peralatan penyiaran untuk memastikan kecukupan, kelayakan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi	
2	Meningkatnya Jangkauan dan Layanan Siaran Radio serta Penguatan Platform Digital	Kerusakan peralatan karena faktor alam	• Pembuatan standar operasional mitigasi kerusakan peralatan	• Direktur Teknologi dan Media Baru
		Kesulitan pegawai yang dapat diangkat pada jabatan manajerial karena status kepegawaian	• Mengkomunikasikan dengan regulator untuk membuka ruang bagi PPPK untuk dapat andil dalam jabatan manajerial	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen LPP RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif			• Direktur Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045" sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan RPJMN 2025-2029. Dalam RPJMN tersebut, telah ditetapkan sejumlah sasaran utama pembangunan nasional yang mencakup:

- 1) Pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029;
- 2) Pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju;
- 3) Pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi;
- 4) Peningkatan pengaruh Indonesia di dunia internasional;
- 5) Peningkatan daya saing SDM; dan
- 6) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *Net Zero Emission*.

Langkah strategis pemerintah dalam upaya mencapai sasaran tersebut termuat dalam 3 (tiga) strategi utama pembangunan nasional yang disebut sebagai Trisula Pembangunan, meliputi:

- 1) Penurunan Kemiskinan
 - a. Stabilitas ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi
 - b. Pengurangan beban pengeluaran: bantuan sosial dan jaminan sosial
 - c. Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja
 - d. Layanan Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah: membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.
- 2) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan SDM mencakup Pemenuhan Layanan Dasar, Peningkatan Modal Manusia dan Peningkatan Modal Sosial Budaya yang dilaksanakan melalui:

 - a. Pemberian Makan Bergizi Gratis
 - b. Penuntasan TBC
 - c. Layanan Kesehatan Terintegrasi
 - d. Perbaikan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
 - e. Program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat
- 3) Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
 - a. Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
 - b. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan
 - c. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
 - d. Penguatan Daya Anagata Nusantara sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional
 - e. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
 - f. Pariwisata dan Ekonomi Hijau
 - g. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
 - h. Transformasi Digital
 - i. Investasi: *Foreign Direct Investment* (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non APBN
 - j. Belanja Negara untuk Produktivitas: MBG, Pembangunan 3 Juta Rumah, Lumbung Pangan, Sekolah Unggul, Hilirisasi lanjutan-EV
 - k. Didukung oleh Deregulasi perizinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter *Pro-Growth*

Untuk mendukung implementasi Trisula Pembangunan, RRI menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran RRI diarahkan untuk menyampaikan narasi pembangunan secara inklusif dan masif sebagai media yang mendidik, mencerdaskan, serta memperkuat kohesi sosial.

Gambar 3.1 Dukungan RRI pada Trisula Pembangunan Nasional
Mendukung Penurunan Kemiskinan

RRI berperan aktif menyebarkan informasi terkait program pemerintah, seperti pemberdayaan ekonomi desa, kewirausahaan, serta promosi lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Melalui konten edukatif dan partisipatif, RRI mendorong peningkatan literasi ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. RRI secara aktif juga mensosialisasikan program-program pemerintah seperti bantuan sosial, integrasi kartu kesejahteraan dan perluasan akses terhadap layanan dasar, serta menjadi kanal umpan balik yang efektif antara rakyat dan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. RRI juga berperan dalam mengawal, memantau, serta mengawasi kinerja institusi pemerintah sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

RRI mengambil peran penting dalam menyebarkan konten literasi, pendidikan, dan kesehatan publik. Kampanye dan edukasi publik mengenai pentingnya gizi seimbang, pendidikan inklusif, serta layanan kesehatan yang merata menjadi bagian dari agenda penyiaran RRI dalam semangat transformasi menuju *Public Service Media*.

Mendukung Pertumbuhan Tinggi dan Berkelanjutan

RRI berperan sebagai penghubung strategis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui jaringan penyiaran nasionalnya, RRI menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi, industri kreatif dan UMKM, pariwisata, perubahan iklim dan lingkungan, serta penguatan sektor digital. RRI memperkuat peran sebagai media akselerator transformasi digital melalui inovasi platform digital seperti “RRI Digital” dan program-program teknologi berbasis multiplatform.

Peran dan Dukungan RRI terhadap Program Prioritas Nasional

Guna mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045, dengan berpedoman kepada RPJMN 2025- 2029, RRI memiliki peran kunci dalam mensukseskan tercapainya PN sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik. RRI berperan sebagai Instansi Pengampu PN 3 dalam konteks mendorong pengembangan infrastruktur, menciptakan ruang digital yang kondusif, dan memberikan akses informasi yang berkualitas, serta meningkatkan peran dalam menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk wilayah 3T.

Berikut adalah peran strategis RRI dalam mendukung berbagai prioritas nasional.

Peran dan Dukungan RRI sebagai Pengampu Prioritas Nasional ke-3



1. Penguatan Infrastruktur Penyiaran dan Spektrum Frekuensi Penyiaran
RRI berperan dalam penguatan infrastruktur penyiaran dan spektrum frekuensi penyiaran untuk memastikan akses siaran yang merata di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T. Dengan memperluas jangkauan penyiaran serta meningkatkan kualitas siaran, RRI memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3T, dapat mengakses informasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Infrastruktur penyiaran yang kuat juga mendukung keberlanjutan komunikasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebencanaan.
2. Menciptakan Ruang Digital yang Kondusif
Sesuai amanah UU, RRI bertanggungjawab untuk menyelenggarakan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Indonesia. Namun demikian, RRI juga diamanatkan untuk menciptakan ruang digital yang kondusif dengan mengembangkan program-program siaran yang mendorong edukasi, kolaborasi, dan inovasi sebagai amplifikasi seluruh konten dan program siaran yang dapat diakses dengan berbagai platform. Hal ini sebagai upaya perkembangan teknologi dan penyesuaian terhadap kebiasaan publik mengkonsumsi media. Program berbasis digital ini juga berfungsi sebagai wadah bagi wirausahawan dan pelaku industri kreatif untuk berbagi wawasan serta memperluas jaringan bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing nasional.
3. Menyediakan Akses Informasi yang Berkualitas
RRI berperan dalam memberikan akses informasi yang berkualitas kepada masyarakat, menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan. Melalui berbagai kanal siaran dan platform digitalnya, RRI menyediakan informasi terkait kebijakan ekonomi, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim. Dengan penyebaran informasi yang luas dan merata, RRI turut serta dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan kompetitif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

RRI juga memberikan dukungan terhadap Prioritas Nasional lainnya, utamanya melalui pengembangan program dan layanan siaran, serta kegiatan yang relevan.



Hasil penelitian Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Nasional (2022), memperlihatkan fakta yang mengejutkan, yakni hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 21,7% siswa memahaminya dari media sosial. Fakta ini menunjukkan peran strategis RRI sebagai media massa. Sekaligus menghadirkan tantangan untuk lebih berperan dalam mendukung keberhasilan program Prioritas Nasional 1, yaitu memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

RRI perlu lebih berperan aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, RRI juga diharapkan lebih mampu mendorong keterlibatan Masyarakat dalam kehidupan demokratis. Potensi untuk menambah pemahaman generasi muda tentang ideologi Pancasila menjadi sangat besar jika dilakukan secara berkesinambungan, massif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Tanah Air.

Berikut adalah 5 (lima) poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut:

Pertama, jangkauan siaran RRI yang meliputi seluruh wilayah Indonesia memungkinkan penyebaran nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan HAM ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan akses yang luas, RRI dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan perbatasan, sehingga mereka tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perkembangan nasional, kebijakan pemerintah, serta hak-hak mereka sebagai warga negara. Peran ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, melalui 163 kanal siaran yang tersebar dari Aceh hingga Papua, RRI konsisten menayangkan konten siaran yang berwawasan kebangsaan dan multikulturalisme. Hal ini bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat serta menciptakan suasana untuk memperkuat kecintaan terhadap Indonesia. Program-program siaran yang mengangkat keberagaman budaya, suku, dan umat beragama di Indonesia berperan dalam memperkuat identitas nasional serta membangun pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat dari berbagai latar belakang.

Ketiga, RRI menyediakan *platform* dialog yang inklusif melalui berbagai program diskusi publik yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Ruang diskusi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam semangat demokrasi.

Keempat, RRI turut mengakomodasi suara masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai program interaktif, RRI memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Hal ini mencerminkan komitmen RRI dalam mendorong partisipasi publik serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Kelima, RRI aktif berperan dalam mencegah radikalisme serta menyebarluaskan pesan perdamaian dan solidaritas di tengah keberagaman bangsa. Melalui siaran-siarannya, RRI terus mempromosikan nilai-nilai toleransi, keadilan sosial, dan harmoni antar umat beragama. Program-program yang mengangkat tema perdamaian dan persatuan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik berbasis perbedaan ideologi atau kepercayaan.

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Sebagai lembaga penyiaran publik dengan jaringan siaran yang luas hingga ke pelosok nusantara, RRI berperan dalam menyebarluaskan agenda nasional serta mendorong kemandirian bangsa di berbagai sektor. Berikut ini adalah lima poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, siaran RRI berbasis terrestrial masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dikutip dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga tahun 2024, sekitar 57 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak terjangkau internet. RRI memperkuat posisinya di wilayah 3T serta daerah perbatasan sebagai media yang memberikan akses informasi kepada masyarakat setempat melalui siaran terrestrial. Dengan siaran terrestrial yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil, RRI sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan dan keamanan negara, serta membangun semangat kebangsaan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sementara faktanya, media asing aktif melakukan penetrasi siarannya ke wilayah NKRI.

Kedua, RRI memperkuat layanan dan jangkauan *Voice of Indonesia* (VOI) sebagai media diplomasi bangsa. Melalui siaran internasionalnya, RRI tidak hanya menyampaikan perkembangan nasional kepada warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga mempromosikan budaya, ekonomi, dan kebijakan nasional kepada masyarakat global. Hal ini mendukung upaya diplomasi publik dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.

Ketiga, dengan jangkauan siaran yang luas hingga pelosok negeri, RRI berperan dalam mempromosikan berbagai agenda nasional. Program-program siaran RRI menyoroti kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan, ketahanan pangan, energi, serta berbagai inisiatif ekonomi strategis lainnya. Informasi yang disampaikan melalui siaran RRI membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program-program nasional yang mendukung kemandirian bangsa dan mengurangi disinformasi dari platform digital yang menyebarkan berita *hoax*. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, teridentifikasi 1.923 konten *hoax* sepanjang tahun 2024 yang tersebar di berbagai *platform* digital.

Keempat, RRI mengembangkan program - program yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat industri kreatif, membangun keterampilan wirausaha, serta mendorong ekonomi berkelanjutan sebagai pilar kemandirian bangsa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2024), tercatat 65,5 juta unit UMKM di Indonesia yang telah menyerap 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97 % dari total tenaga kerja nasional.

Sementara, pelaku ekonomi kreatif di Indonesia mencapai 15.898 unit merupakan penyumbang terbesar bagi PDB ekonomi kreatif. RRI dapat berperan sangat besar melalui berbagai siaran edukatif dan program interaktif, membangun sinergitas dengan *stakeholder* terkait upaya meningkatkan wawasan dan pelatihan kepada Masyarakat untuk

mengembangkan usaha mandiri serta memanfaatkan peluang di sektor ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Kelima, RRI turut berperan dalam mendorong pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan menayangkan program-program yang membahas isu-isu lingkungan, energi terbarukan, serta praktik ekonomi berkelanjutan, RRI berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam. Siaran yang mengangkat tema konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijak mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

PN 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Sebagai lembaga penyiaran publik dengan jaringan siaran yang luas hingga ke pelosok nusantara, RRI berperan dalam menyebarluaskan agenda nasional serta mendorong pembangunan manusia yang lebih maju dan inklusif. Berikut ini adalah lima poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, RRI mengembangkan program siaran yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara holistik. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, RRI menciptakan wadah untuk mendorong kesadaran, partisipasi, serta kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Program-program ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan yang bertujuan untuk menciptakan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Kedua, RRI mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga nasional melalui program-program unggulan yang dirancang untuk mengangkat citra Indonesia di kancah nasional dan internasional. Melalui siaran khusus mengenai perkembangan olahraga, profil atlet, serta edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat dan olahraga, RRI berperan dalam membangun budaya olahraga yang lebih kuat di Indonesia. Dengan memberikan eksposur bagi atlet nasional, RRI turut membantu dalam membangun semangat juang dan kebanggaan bangsa.

Ketiga, RRI memfasilitasi dan mengembangkan siaran yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas. Program-program siaran yang menampilkan keragaman budaya, gender, dan kelompok masyarakat, bertujuan untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat kesetaraan gender serta meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda dalam pembangunan nasional.

Keempat, RRI memastikan akses informasi dan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan menyediakan program siaran yang ramah disabilitas, seperti konten audio yang dirancang untuk mudah diakses serta pelibatan komunitas disabilitas dalam penyiaran, RRI berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Langkah ini penting dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang keterbatasan fisik atau sensorik.

Kelima, RRI mendorong peningkatan literasi digital dan kompetensi teknologi masyarakat melalui siaran edukasi yang mendukung penguasaan teknologi serta keterampilan digital. Dengan semakin berkembangnya era digital, RRI berperan dalam memberikan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi secara produktif, keamanan digital, serta peluang ekonomi berbasis digital. Program ini sangat relevan bagi generasi muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, dalam menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital.

PN 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Sebagai lembaga penyiaran publik yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RRI berperan dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hilirisasi serta industrialisasi sumber daya alam (SDA). Berikut ini adalah empat poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, LPP RRI memberikan sorotan lebih pada daerah yang menjadi pusat pengolahan SDA melalui program siaran yang menampilkan potensi kawasan industri strategis seperti industri nikel, bauksit, dan kelapa sawit. Dengan menghadirkan liputan mendalam, wawancara dengan pelaku industri, serta diskusi mengenai dampak ekonomi dan sosial dari hilirisasi, RRI memberikan pemahaman langsung kepada publik tentang bagaimana pengolahan SDA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Kedua, RRI meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hilirisasi bagi perekonomian nasional. Melalui berbagai program siaran edukatif, RRI menjelaskan bagaimana hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan cara ini, RRI berkontribusi dalam membangun pola pikir masyarakat yang lebih mendukung kebijakan industrialisasi yang berkelanjutan.

Ketiga, RRI menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendorong partisipasi generasi muda dalam pengembangan industri berbasis SDA. Dengan menampilkan kisah inspiratif para inovator muda di bidang industri, serta menyediakan ruang diskusi tentang peluang kerja dan kewirausahaan dalam sektor ini, RRI berperan dalam menumbuhkan minat dan keterlibatan generasi milenial dan generasi Z dalam industri berbasis SDA, sehingga menciptakan SDM yang siap bersaing dalam era globalisasi.

Keempat, RRI menjadi platform kolaborasi bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam menyebarluaskan kebijakan hilirisasi agar dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Dengan menghadirkan dialog interaktif dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, RRI memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan hilirisasi tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Langkah ini bertujuan untuk membangun dukungan publik yang lebih kuat terhadap pengembangan industri berbasis SDA di Indonesia.

PN 6

Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 6, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Dengan jaringan siaran yang luas, RRI menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi serta mendukung berbagai program pembangunan ekonomi desa. Berikut ini adalah empat poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, dengan 69 stasiun siaran dan 30 stasiun produksi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta 163 kanal yang beroperasi, RRI memiliki kedekatan dan kemampuan untuk menjangkau masyarakat desa. Hal ini menjadikannya mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa melalui penyampaian informasi yang relevan, program edukasi, serta promosi kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa. RRI turut serta dalam memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan sumber daya lokal agar lebih produktif dan berdaya saing.

Kedua, RRI berperan sebagai perantara atau *medium* utama dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi lokal, termasuk yang ada di pedesaan, kepada khalayak umum secara luas. Melalui program siaran khusus, RRI mengangkat berbagai kisah sukses desa yang telah berhasil mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, kerajinan, serta industri kreatif berbasis komunitas. Dengan demikian, masyarakat desa memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan peluang investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Ketiga, RRI membuka ruang bagi para pelaku perubahan di desa untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi masyarakat lain dalam mengembangkan ekonomi lokal. Program-program diskusi, wawancara, serta liputan khusus memberikan wadah bagi tokoh masyarakat, pelaku usaha kecil, dan inovator desa untuk menyampaikan pengalaman mereka dalam membangun usaha dan komunitas. Dengan adanya ruang inspirasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat desa yang terdorong untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya.

Keempat, RRI berperan sebagai jembatan informasi mengenai peluang lapangan kerja lintas wilayah yang dapat disampaikan hingga pelosok daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Melalui program-program siaran yang menginformasikan tentang kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, serta program bantuan ekonomi dari pemerintah dan sektor swasta, RRI membantu masyarakat desa untuk lebih mudah mengakses peluang yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

PN 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Sebagai media penyiaran publik dengan jaringan luas, RRI berkontribusi dalam menciptakan transparansi,

meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Berikut ini adalah empat poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, RRI berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip melalui digitalisasi. Dengan proses digitalisasi, pengelolaan data dan dokumen menjadi lebih transparan, akurat, dan mudah diakses, sehingga mengurangi potensi manipulasi atau penyalahgunaan informasi. Selain itu, RRI juga melakukan penguatan keamanan kearsipan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting dalam administrasi negara dapat terjaga dengan baik untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif.

Kedua, RRI menjadi media yang memfasilitasi *whistleblowing* dan pelaporan masyarakat terhadap kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Melalui program siaran yang memberikan ruang bagi pengaduan masyarakat, RRI membantu meningkatkan transparansi dan mendorong keterlibatan publik dalam upaya pemberantasan kejahatan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan berbagai tindakan yang merugikan negara serta mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

Ketiga, RRI memberikan ruang lebih bagi aparat hukum untuk menyampaikan informasi mengenai penegakan hukum dan sanksinya. Dengan menyiarkan program edukasi hukum serta wawancara bersama penegak hukum, RRI membantu masyarakat memahami aturan-aturan hukum yang berlaku dan konsekuensi dari pelanggaran. Hal ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Keempat, RRI berperan dalam meningkatkan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan aparatur negara yang lebih berkualitas, profesional, dan adaptif. Melalui program siaran yang membahas peningkatan keterampilan, penguatan etika kerja, serta pembinaan karakter bagi ASN dan tenaga birokrasi lainnya, RRI mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan membangun aparatur yang berkompeten dan berintegritas, diharapkan tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.

PN 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

RRI memiliki peran strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Sebagai lembaga penyiaran publik dengan jaringan luas, RRI turut serta dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, serta sadar akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Berikut adalah empat poin utama yang menggambarkan keterkaitan RRI dengan program prioritas tersebut.

Pertama, RRI menyajikan dan mengoptimalkan kanal program serta konten siaran yang memuat ke-Bhineka-an, kekayaan budaya, dan kearifan lokal. Melalui berbagai program, RRI berkomitmen untuk menjaga warisan budaya nusantara dengan menampilkan musik tradisional, cerita rakyat, serta diskusi tentang adat istiadat yang memperkaya wawasan kebangsaan. Dengan demikian, masyarakat dapat

lebih memahami dan menghargai keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Kedua, RRI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) yang terintegrasi. Dengan peran ini, RRI membantu mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat secara lebih baik.

Ketiga, RRI menjadi media utama dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Melalui siaran khusus, diskusi lintas agama, serta program edukasi, RRI berperan sebagai perekat sosial dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kerukunan antar-umat beragama. Dengan memfasilitasi dialog terbuka dan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, RRI turut serta dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman bangsa.

Keempat, RRI berperan dalam edukasi publik sebagai upaya peningkatan kapasitas wawasan dan kemampuan masyarakat tentang kesiapsiagaan, pencegahan, serta rehabilitasi pasca- bencana. Melalui siaran yang membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana, teknik mitigasi, serta langkah-langkah pemulihan pasca-bencana, RRI membantu masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan mendukung pemulihan yang lebih cepat dan efektif.

RRI tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga bagian dari solusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dengan alam dan budaya. Sebagai media penyiaran publik yang berorientasi pada kepentingan nasional, RRI terus berupaya untuk memperkuat toleransi, melestarikan budaya, serta meningkatkan kesadaran lingkungan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui dukungan terhadap Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud, RRI diharapkan menjadi media yang semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi bagian dari motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan dukungan sumber daya kelembagaan yang semakin baik, sebagaimana terefleksikan pada Renstra 2025-2029, RRI berkomitmen mendukung secara aktif terhadap capaian Prioritas Nasional dengan penekanan pada 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. RRI menegaskan posisinya dalam mensosialisasikan, mengedukasi, dan menggerakkan partisipasi publik untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional tersebut.

1) Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi Untuk Balita dan Ibu Hamil

RRI berkomitmen untuk berperan aktif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil sebagai saluran informasi dan edukasi publik mengenai pentingnya gizi seimbang, melalui program-program siaran kesehatan, dialog interaktif bersama pakar, serta peliputan lapangan yang menggugah kesadaran kolektif masyarakat tentang pemenuhan gizi anak dan ibu.

2) Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan untuk Anak-Anak dan Remaja

Melalui Pro 2, serta berbagai program edukasi dan siaran yang melibatkan komunitas, RRI mendukung pemerataan akses Pendidikan, termasuk menyukseskan program Sekolah Rakyat dengan menyiarkan materi belajar jarak jauh, informasi beasiswa, serta kisah inspiratif anak muda berprestasi dari berbagai daerah.

- 3) Program Kesehatan Masyarakat untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan dan Akses Obat-Obatan
RRI menayangkan informasi seputar layanan kesehatan, imunisasi, dan akses obat di berbagai kanal, serta membuka ruang dialog antara masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan literasi kesehatan publik, termasuk isu-isu kesehatan mental, serta penyakit menular.
- 4) Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas
RRI turut mempublikasikan capaian pembangunan infrastruktur nasional hingga ke pelosok, mendorong transparansi proses pembangunan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan konektivitas transportasi, energi, dan digitalisasi.
- 5) Program Perlindungan Sosial untuk Membantu Masyarakat yang Kurang Mampu
RRI memperkuat fungsi diseminasi informasi seputar bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial lainnya. Melalui siaran di Pro 1, Pro 3 dan platform lainnya, RRI dapat menjadi penghubung aspirasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat penerima manfaat.
- 6) Inisiatif Lingkungan Hidup untuk Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam
RRI melalui kanal Pro 4 dan program khusus bertema lingkungan, kearifan lokal (*local wisdom*), dan keberlanjutan (*sustainability*) akan terus menyuarakan pentingnya konservasi lingkungan, edukasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, hingga praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan, khususnya di daerah rawan bencana dan ekosistem penting.
- 7) Dukungan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi Desa Merah Putih
RRI memberikan ruang promosi dan pemberdayaan UMKM dan Kopdes Merah Putih melalui layanan program siaran, liputan khusus pelaku usaha di daerah dan update perkembangan Kopdes Merah Putih di daerah, serta kerja sama promosi digital melalui RRI Digital dan media sosial. Ini bertujuan mengangkat potensi lokal dan memperluas pasar produk UMKM yang merupakan backbone ekonomi Indonesia.
- 8) Peningkatan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Pemerintahan yang Lebih Transparan dan Efisien
RRI mendukung transformasi digital nasional dengan memperkuat infrastruktur penyiaran berbasis teknologi informasi, serta membuka ruang publik melalui program advokasi Publik seperti Halo RRI, yang menjadi jembatan dialog antara pemerintah dan masyarakat secara cepat, transparan, dan interaktif.
Melalui dukungan terhadap program strategis tersebut, RRI tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan. RRI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong tercapainya swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkeadilan, serta pertumbuhan ekonomi 8% dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi RRI

RRI sebagai mitra strategis Komisi VII DPR RI, berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan pertahanan keamanan di Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi, memberikan edukasi, serta melakukan publikasi dan promosi guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis tersebut. RRI juga

memantau dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dari program kerja pemerintah tersebut yang berdampak kepada masyarakat, juga menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan, RRI terus menghadirkan program, kegiatan, serta layanan siaran yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Komitmen RRI sejalan dengan visi pemerintah, "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Peran aktif RRI diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas serta bernilai positif bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan konten siaran, RRI berfungsi sebagai perekat sosial, pengawal demokrasi, serta agen pencerdasan kehidupan bangsa, sekaligus menjaga citra positif Indonesia di kancah internasional.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap 8 Program Prioritas Nasional, RRI menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025–2029. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi utama RRI serta selaras dengan program nasional, yang tertuang dalam 3 Arah Kebijakan dan 16 Strategi Utama sebagai berikut:

A. Kebijakan 1: Meningkatkan Dan Mengembangkan Program Siaran dan Konten yang Mendukung Program Prioritas Nasional (Asta Cita)

Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional (Asta Cita), RRI berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan program siaran serta konten yang berkualitas. Melalui kebijakan ini, RRI berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang edukatif, inspiratif, dan relevan bagi masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Kebijakan ini pun bertujuan untuk memperkuat peran RRI sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai media penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menyajikan program siaran yang mendukung kebijakan strategis pemerintah. Dengan memperkaya konten yang berorientasi pada Asta Cita, RRI memastikan bahwa siaran yang dihadirkan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa.

- 1) Meningkatkan Kualitas Layanan Siaran yang Berfokus pada Diseminasi Informasi terkait Program Prioritas Nasional Dan Agenda Pembangunan Nasional.

Sebagai tanggung jawab utama LPP dalam memberikan informasi secara optimal kepada publik, tentunya RRI terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan siarannya sehingga masyarakat dapat menikmati akses informasi yang lebih relevan dan memadai. Dalam jangka waktu menengah ini (5 tahun ke depan), RRI akan berfokus pada penyajian dan pengembangan konten siaran terkait program prioritas nasional sebagai bentuk perpanjangan tangan dan dukungan penuh terhadap proses penyuksesan agenda pemerintah.

- a. Mendukung program pemerintah berbasis *outcome* dengan menyiarkan informasi dan program yang tidak hanya mengenalkan kebijakan atau inisiatif, tetapi juga mendorong terciptanya dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, dalam mendukung program pemberdayaan UMKM, siaran RRI harus mampu memfasilitasi penyebaran informasi yang mendorong peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM secara langsung
- b. Menjalankan peran sebagai media (jurnalisme) verifikator kebijakan publik, tidak hanya memastikan kebenaran informasi dan menangkal *hoax*, tetapi juga mengawasi pelaksanaan program pemerintah. RRI akan menyajikan

informasi yang menguji implementasi suatu kebijakan, menilai apakah program telah berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan mengidentifikasi kendala di lapangan, sehingga menjadi saluran umpan balik yang konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.

Sebagai tanggung jawab utama Lembaga Penyiaran Publik dalam memberikan informasi secara optimal kepada masyarakat pendengar, tentunya RRI terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan siarannya sehingga masyarakat dapat menikmati akses informasi yang lebih relevan dan memadai. Pada periode Renstra 2025-2029, RRI akan berfokus pada penyajian dan pengembangan konten siaran terkait program prioritas nasional sebagai bentuk perpanjangan tangan dan dukungan penuh terhadap proses keberhasilan agenda pemerintah.

Dalam kaitan peran RRI mendukung capaian RPJMN dan khususnya prioritas nasional maka strategi yang dilakukan adalah mengarahkan seluruh program dan konten-kontennya sesuai dengan program prioritas nasional. Salah satu yang dilakukan dalam mendukung program PN berbasis *outcome* dengan menyiarkan informasi dan program yang tidak hanya mengenalkan kebijakan atau inisiatif, tetapi juga mendorong terciptanya dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, dalam mendukung program pemberdayaan UMKM, siaran RRI harus mampu memfasilitasi penyebaran informasi yang mendorong peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM secara langsung.

Khusus terkait dengan penyiaran RRI akan menguatkan peran sebagai media verifikator. Media verifikator adalah tidak hanya memastikan kebenaran informasi dan menangkal *hoax*, tetapi juga memantau pelaksanaan program pemerintah di tengah masyarakat. RRI akan menyajikan informasi dan implementasi suatu kebijakan dan memberitakan apakah program telah berjalan sesuai target, tepat sasaran, serta mengidentifikasi kendala di lapangan, sehingga menjadi saluran umpan balik yang konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.

RRI memastikan bahwa setiap layanan siaran tidak hanya menyampaikan informasi terkait program prioritas nasional dan agenda pembangunan nasional, tetapi juga mampu menggerakkan partisipasi publik. Melalui penyajian informasi yang akurat, relevan, dan kontekstual, RRI berperan aktif dalam membangun pemahaman mendalam masyarakat terhadap kebijakan strategis pemerintah. Dampak yang dihasilkan tidak hanya pada tingkat kesadaran, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

2) Penajaman Segmentasi Program Sesuai Perkembangan Karakter Pendengar

Menghadapi tantangan perkembangan teknologi, disrupsi media, serta perubahan perilaku pendengar yang semakin kompleks dan dinamis, RRI memandang perlu melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap segmentasi dan karakter program siaran. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, efektivitas penyampaian pesan publik, serta memperkuat peran RRI sebagai media penyiaran publik yang inklusif dan berdampak. Saat ini, segmentasi program RRI ditetapkan berdasarkan dua pendekatan utama:

- c. Demografis: Pro 1 menyasar kalangan keluarga, termasuk anak-anak dan dewasa, sedangkan Pro 2 menyasar generasi muda dengan orientasi gaya hidup urban.
- d. Psikografis: Pro 3 berfokus pada informasi dan dialog (*news and talk*), sementara Pro 4 mengangkat isu budaya dan kearifan lokal.

Namun, pendekatan ini dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan komunikasi strategis pemerintah dan ekspektasi publik. Selain itu, pengukuran kinerja program masih bersifat *output-oriented*, yaitu berfokus pada jumlah produksi atau kegiatan siaran, bukan pada dampak nyata terhadap masyarakat. Misalnya, keberhasilan siaran UMKM atau pariwisata masih diukur dari jumlah penayangannya, bukan dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor tersebut.

RRI juga menyadari bahwa produksi konten masih dominan berangkat dari sudut pandang internal institusi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara yang disiarkan dengan apa yang menjadi minat dan kebutuhan publik. Ke depan, konten siaran harus dirancang secara lebih partisipatif dan berbasis agenda publik, agar mampu menarik perhatian audiens dan menghasilkan efek komunikasi yang lebih kuat.

Sebagai langkah strategis, rekonstruksi program RRI akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

- a. Kajian Strategis Segmentasi Program (Pertengahan 2025)
Dilakukan kajian menyeluruh untuk menentukan pendekatan segmentasi yang paling relevan, apakah tetap berbasis demografi, psikografi, atau kombinasi keduanya dengan melibatkan masukan dari publik, pakar media, dan *stakeholders*.
- b. Penyusunan Panduan Pengelolaan Program (2026)
Berdasarkan hasil kajian, RRI akan menyusun Panduan Pengelolaan Program Nasional sebagai acuan resmi dalam merancang, memproduksi, dan mengelola konten siaran untuk seluruh kanal (Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia, serta pengembangan kanal baru Pro 5 - kanal musik).
- c. Sosialisasi dan Implementasi Penajaman Program (2026 – 2029)
Panduan tersebut akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja dan menjadi dasar pelaksanaan program siaran yang lebih fokus, relevan, dan mendukung pencapaian program prioritas nasional secara lebih terukur.
- d. Transformasi Indikator Kinerja Program
Indikator keberhasilan program akan bergeser dari orientasi kuantitatif (jumlah siaran) menjadi indikator kualitatif berbasis capaian audiens dan dampak sosial, seperti peningkatan literasi publik, pemberdayaan masyarakat, atau perubahan perilaku positif di sektor tertentu.

e. Desain Kanal Siaran yang Terintegrasi dan Berbasis Data Audiens

Setiap kanal siaran akan didesain dengan identitas, tone, dan gaya siaran yang mencerminkan lokalitas dari karakter audiensnya, dengan pendekatan berbasis data dan riset audiens untuk memastikan efektivitas penyampaian pesan. Dengan strategi ini, RRI akan mampu memperkuat perannya sebagai media publik yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

RRI menyadari bahwa pesan yang berdampak hanya dapat tercapai bila disampaikan dengan format, bahasa, dan pendekatan yang sesuai dengan karakter pendengarnya. Oleh karena itu, segmentasi program dilakukan dengan analisis mendalam terhadap demografi, minat, dan perilaku audiens. Pendekatan ini memungkinkan RRI merancang konten yang lebih relevan, tepat sasaran, dan berpotensi memicu respons positif yang diharapkan dari setiap segmen, baik dalam bentuk pengetahuan, perubahan perilaku, maupun tindakan nyata.

3) Pengembangan *Platform* Layanan Media RRI Meliputi Layanan Siaran Digital, Portal Berita Digital, Aplikasi Digital dan Content-Sharing Digital Untuk Memudahkan Masyarakat Mengakses, Membuat dan Membagikan Program dan Informasi Sesuai Kebutuhan

Saat ini kemajuan TIK yang sangat pesat mempengaruhi cara audiens dalam perilaku mengkonsumsi media, baik itu preferensi genre musik, durasi mendengarkan, waktu mendengarkan dan cara mendengarkan. Maka, strategi pengembangan ini diperuntukkan pada platform-platform yang dimiliki RRI agar tetap relevan dengan keinginan, kebutuhan dan perilaku publik dalam mengkonsumsi media. Bahkan saat ini, konsumsi konten media oleh publik bersifat *personalized content*, yaitu konsumen atau audiens dapat bebas memilih konten apa yang ingin mereka lihat, dengar atau tonton.

a. Siaran Digital

Layanan siaran ini meliputi transmisi radio terrestrial berbasis digital seperti DRM dan DAB. Siaran ini, memudahkan pendengar menikmati konten siaran secara jernih dan variasi program yang lebih *segmented*. Sementara, siaran *streaming digital* adalah program siaran yang didistribusikan melalui internet. Kedua hal tersebut sama-sama bersumber pada karakter siaran radio. RRI akan menguatkan pengembangan layanan ini untuk dapat terus relevan dengan perkembangan teknologi penyiaran radio di dunia.

b. Portal Berita Digital

RRI melakukan pengembangan dan penyesuaian platform portal pemberitaan guna menyebarkan informasi lebih luas kepada berbagai kalangan audiens, yaitu melalui layanan portal (rri.co.id) dan aplikasi berita nasional (RRI News), yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menjangkau audiens lebih luas. Layanan-layanan tersebut

merupakan bagian dari cara RRI mengamplifikasi konten siaran radio yang merupakan *core business* RRI.

c. Aplikasi Digital

Dalam beradaptasi pada karakter pendengar untuk mengakses informasi sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki, maka RRI hadir menyediakan layanan aplikasi digital, yaitu “RRI Digital”. Layanan ini memungkinkan pendengar dapat mengakses berita dan informasi, memilih dan menikmati berbagai konten siaran, musik sesuai genre yang diinginkan, termasuk lagu-lagu daerah di manapun dan kapanpun. Layanan ini juga menyediakan konten berbasis teks, foto dan audio-visual, selain itu dalam aplikasi digital ini juga tersedia kanal yang memfasilitasi berbagai entitas komunitas.

Dalam beberapa tahun ke depan ini, RRI akan terus melakukan optimalisasi dan pengembangan aplikasi digital, baik kualitas konten maupun dalam infrastruktur teknologi yang lebih ramah (*user friendly*) untuk audiens. Seluruh konten digital yang diproduksi dan dipublikasikan adalah aset RRI. Maka dari itu, untuk menjamin keberlangsungan dan ketersediaan konten tersebut, harus dipastikan pengelolaan aset tersebut dilakukan secara mandiri oleh RRI dan tidak tergantung pada vendor atau penyedia jasa aplikasi *provider*.

d. *Content-sharing* Digital

Karakter masyarakat pengguna media saat ini berubah sejalan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek dari media, tetapi juga berperan sebagai subjek. Bila sebelum ini, media memproduksi dan mendistribusikan konten untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan saat ini masyarakat pun merasa perlu untuk mendapat akses untuk memproduksi dan mendistribusikan konten yang disediakan oleh media melalui platform *content-sharing* digital.

Sebagai media publik, RRI juga harus memfasilitasi platform yang memungkinkan publik untuk mengaktualisasikan diri melalui konten yang diproduksinya. Dengan cara demikian, RRI tidak terbatas dalam mendistribusikan konten dan masyarakat terlibat langsung dalam membesarkan aplikasi RRI. Kendati demikian, harus tetap dipahami bahwa RRI adalah lembaga media publik negara yang konten- kontennya harus tetap dipercaya agar tidak menimbulkan kegaduhan, sehingga untuk itu harus mematuhi regulasi yang berlaku, serta ketersediaan mekanisme publikasi.

Sistem penyiaran terestrial berbasis audio yang diakses melalui radio transistor mulai ditinggalkan seiring berkembangnya teknologi distribusi konten seperti siaran digital, radio streaming, portal berita, aplikasi, dan *content-sharing* digital. Masyarakat kini lebih memilih konten multimedia audio, video, gambar, teks, dan data yang diakses melalui perangkat digital. Perubahan ini memengaruhi perilaku konsumsi media, termasuk preferensi genre, durasi, waktu, dan cara mendengarkan. Karena itu, RRI mengembangkan platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan publik.

Konsumsi media kini bersifat personal, di mana audiens terlibat dalam produksi konten. Platform digital RRI dirancang untuk mendukung partisipasi ini, dengan RRI berperan sebagai admin dan editor, khususnya untuk konten terkait program prioritas nasional. Portal berita rri.co.id juga terus diperkuat sebagai penguat dan penyebar konten siaran radio secara multiplatform agar dapat diakses lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui jumlah layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari provinsi hingga kecamatan, bahkan sampai di daerah 3T, memungkinkan RRI menjadi media hiperlokal yang berfokus pada informasi yang relevan dengan area geografis yang sangat kecil, dari mulai potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, kearifan lokal dan kreativitas masyarakat setempat.

4) Bersinergi dan Berkontribusi Dalam Satu Pusat Data dan Informasi Nasional terkait Berbagai Potensi Sumber Daya di Indonesia

RRI turut berperan dalam mendukung strategi nasional sebagai wadah untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait potensi sumberdaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan pengelolaan dan pendistribusian data terkait sumberdaya yang optimal, tentu akan berimplikasi pada percepatan agenda pembangunan nasional. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak tentang potensi tersebut untuk mendorong investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.

Strategi yang ditempuh RRI salah satunya partisipasi dan keterlibatan Lembaga secara aktif dalam menyiapkan tata kelola dan data internal RRI untuk keperluan pusat satu data dan informasi nasional. Selain itu RRI juga akan memanfaatkan konten-konten atau materi dalam pusat data tersebut agar dapat diakses oleh masyarakat.

5) Kolaborasi dengan *Stakeholder* Terkait dalam Meningkatkan Kualitas dan Intensitas Konten Berita dan Informasi untuk Masyarakat Melalui Layanan Portal dan Aplikasi Berita Nasional

Kolaborasi antara RRI dengan berbagai stakeholder pemerintahan dan komunitas menjadi semakin diperlukan pada era sekarang dan masa depan, karena untuk membesarkan suatu lembaga, tidak dapat dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Sebagai upaya RRI dalam melakukan pengembangan dan penyesuaian platform media guna menyebarkan informasi lebih luas kepada berbagai kalangan audiens, salah satunya melalui layanan portal (rri.co.id) dan aplikasi berita nasional (*RRI News*). RRI berupaya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun pihak swasta, media massa dan media online lainnya, serta berbagai *stakeholder* lainnya untuk bisa mendapatkan, menggali, menyajikan dan mendistribusikan konten berita yang lebih variatif dan berkualitas, terutama berkenaan dengan informasi perkembangan agenda pembangunan nasional.

Strategi yang ditempuh diantaranya melalui pengembangan konten bersama mitra-mitra *content creator* yang bekerjasama dengan RRI difasilitasi LPU. Dilakukan pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan dalam pembinaan dan penguatan

mindset maupun *technical skill* untuk menyiapkan konten-konten yang selaras dengan prioritas nasional.

Saat ini programnya baru layanan portal (rri.co.id) dan aplikasi berita nasional (*RRI News*), untuk kedepannya mereka juga akan difasilitasi untuk mempublikasikan berita-berita dalam bentuk multiplatform seperti foto, video, teks dan data.

6) Peningkatan kualitas dan kuantitas konten siaran pelestarian budaya dan pengembangan ensiklopedi budaya Nusantara

RRI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya Indonesia melalui siaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan menghadirkan konten yang menggali, mendokumentasikan, dan juga mempromosikan warisan budaya, RRI berperan menciptakan dampak jangka panjang berupa tumbuhnya kebanggaan nasional, penguatan identitas, dan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pelestarian budaya, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keragaman budaya nusantara.

Sebagai bentuk dukungan nyata pada program prioritas nasional ke-8, RRI turut andil dalam pelestarian warisan budaya melalui peningkatan strategi konten siaran, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Melalui jaringan nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, RRI berperan menjadi Media Pelestari Budaya untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan kearifan lokal dan potensi budaya nusantara.

Melalui stasiun penyiaran RRI yang tersebar di seluruh provinsi, RRI turut berkontribusi aktif untuk menggali dan mendokumentasikan informasi terkait berbagai kebudayaan Indonesia, tentunya dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder lokal untuk mengembangkan ensiklopedi budaya nusantara.

Program siaran budaya ini meliputi, lagu daerah, seni musik, pertunjukan wayang, seni tutur yang berisi kearifan lokal dan drama radio dalam bahasa daerah. Ini merupakan cara RRI untuk memberikan wadah kepada para pelaku seni tradisional untuk terus dapat berkiprah dan menjaga eksistensinya. Melalui siaran layanan RRI, seluruh program ini disajikan dan dapat diakses oleh para pendengar di nusantara maupun para pekerja migran dan diaspora di berbagai negara sebagai upaya menguatkan rasa kecintaan terhadap kebudayaan leluhurnya. Salah satu kekhasan program RRI yang hanya sedikit dilakukan media masa lain adalah menyajikan program-program budaya seperti lagu daerah, seni musik, pertunjukan wayang, seni tutur yang berisi kearifan lokal dan drama radio dalam bahasa daerah. Misalnya di Banjarmasin dikenal dengan budaya tutur Madihin, di Jawa ada Ketoprak dan Wayang Orang, Wayang Golek, Lenong, di Sumatera Utara ada Tor-Tor, dan beragam budaya nusantara lainnya. Budaya-budaya tersebut memiliki kandungan falsafah hidup, sosial kemasyarakatan bahkan kenegaraan. Ini tentu akan memperkuat kohesi bangsa dan terwujudnya program prioritas nasional. Penguatan strategi ini juga dimaksudkan bahwa RRI akan memberikan wadah kepada para pelaku seni tradisional untuk terus dapat berkiprah dan menjaga eksistensinya.

RRI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya Indonesia melalui siaran yang berkualitas dan berkelanjutan. RRI berperan menciptakan dampak jangka panjang berupa tumbuhnya kebanggaan nasional, penguatan

identitas, dan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pelestarian budaya, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keragaman budaya nusantara.

- 7) Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Program dan Layanan Siaran Luar Negeri atau *Voice of Indonesia* (VOI) Melalui Digitalisasi dan Format Kegiatan Interaktif Untuk Mempromogandakan Nilai, Budaya dan Pariwisata Indonesia kepada Masyarakat Internasional

RRI akan mengembangkan dan meningkatkan kualitas siaran VOI dengan menerapkan digitalisasi serta format kegiatan interaktif untuk memperluas jangkauan audiens global. Digitalisasi akan memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan trend media global.

Selain itu, format interaktif seperti diskusi daring, *podcast*, serta kolaborasi dengan komunitas internasional akan memperkuat keterlibatan pendengar. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan nilai, budaya, serta pariwisata Indonesia secara lebih efektif dan menarik bagi masyarakat internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, VOI harus memiliki jangkauan global dan hadir diberbagai negara dengan kantor perwakilan, koresponden, dan siaran dalam berbagai bahasa, sehingga dapat setara dengan media internasional lainnya.

RRI memiliki program khusus siaran internasional yang dikenal sebagai *Voice of Indonesia*. Siaran internasional ini menysasar 3 (tiga) segmen audience: **pertama**, masyarakat internasional dan warga negara asing; **kedua** kalangan diaspora, yakni orang Indonesia dan keturunannya yang telah menjadi warga negara setempat; serta yang **ketiga** adalah para pekerja migran atau warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain. Siaran internasional ini menggunakan bahasa utama Inggris dan dilengkapi dengan 8 (delapan) bahasa internasional lainnya yakni bahasa Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang dan tetap juga menyiarkan program berbahasa Indonesia. Penguatan siaran internasional ini akan memberikan pemahaman kuat bagi *audience* pada tiga segmen tersebut diatas untuk semakin memahami Indonesia dan bila mungkin berkontribusi untuk memajukan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Konten-konten yang disajikan untuk masyarakat internasional seperti budaya, wisata, investasi dan nilai-nilai keIndonesiaan dengan gaya khas sesuai karakter masyarakat di negara- negara tersebut. Format yang dikembangkan antara lain siaran *live* bahasa Inggris, *podcast*, drama, dialog interaktif dan feature dalam berbagai platform.

Melalui layanan *Voice of Indonesia*, RRI menghadirkan konten yang mempromosikan nilai, budaya, dan potensi pariwisata Indonesia kepada masyarakat internasional. Digitalisasi dan pengembangan format interaktif memastikan pesan tersampaikan secara efektif, membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Dampak yang dihasilkan melampaui manfaat informasi semata, karena turut mendukung diplomasi budaya, memperluas jejaring internasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.

8) Optimalisasi Anggaran dan Postur Anggaran Untuk Dukungan Operasional *Core Business*

Saat ini, lebih dari 95% anggaran RRI berasal dari APBN. Dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan untuk dukungan manajemen. Hanya sekitar 8% dari anggaran RRI yang digunakan untuk *core business*, sehingga sangat sulit bagi RRI untuk mengembangkan program-program secara lebih berkualitas dan berorientasi publik. Kedepan, setidaknya terdapat 30% anggaran RRI dialokasikan bagi kegiatan *core business*. Hal itu tentu tidak mudah karena peningkatan alokasi anggaran pemerintah bagi RRI kenaikannya juga sangat terbatas. Untuk itu diperlukan upaya-upaya inovatif dan kreatif untuk menghasilkan pendapatan bagi peningkatan alokasi anggaran kegiatan *core business*. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain kerjasama kemitraan, monetisasi platform digital, utilisasi aset dan upaya lainnya.

Sebagai bagian dari transformasi kelembagaan dan modernisasi tata kelola, RRI berkomitmen mengembangkan ekosistem media multiplatform yang mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui pendekatan digitalisasi terpadu, RRI tidak hanya memperluas distribusi konten, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru yang mendukung peningkatan PNPB dari sektor penyiaran publik. Untuk mendukung hal ini, RRI juga tengah mengembangkan kebijakan layanan digitalisasi penyiaran sebagai landasan regulatif dalam monetisasi konten, serta memperkuat strategi pemasaran berbasis teknologi. Langkah-langkah yang akan dilakukan RRI dalam meng-implementasikan strategi ini, meliputi:

a. Monetisasi Konten Siaran melalui Platform Digital

Monetisasi konten menjadi kunci dalam membangun sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup:

- a) Kemitraan Komersial Digital: Menjalin kerja sama dengan penyedia platform digital untuk distribusi dan monetisasi konten RRI, baik dalam bentuk *streaming*, *podcast*, maupun *video-on-demand*.
- b) Perlindungan Kekayaan Intelektual: Mendaftarkan seluruh karya siaran RRI ke dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna memastikan perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi dari aset intelektual.
- c) Penguatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan intensif bagi tenaga pemasaran, tim kehumasan, serta manajer konten digital guna meningkatkan kompetensi dalam menghadapi dinamika industri media digital.

b. Optimalisasi Utilisasi Aset

Pemanfaatan aset secara produktif menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung kemandirian finansial:

- a) Pembentukan Tim Utilisasi Aset: Tim khusus ini bertanggung jawab dalam proses identifikasi, validasi, dan optimalisasi seluruh aset fisik dan non-fisik RRI.
- b) Pemetaan dan Penyusunan Roadmap Aset: Menyusun peta aset dan strategi pemanfaatan jangka panjang secara sistematis, termasuk skema kerja sama dengan pihak ketiga yang relevan dan sah secara hukum.
- c) Model Bisnis Berbasis Aset: Mengembangkan skema pemanfaatan aset untuk kegiatan usaha, seperti lahan

serta sarana pendukung lainnya, melalui pendekatan bisnis yang terukur dan akuntabel.

9) Penguatan Branding yang Berorientasi pada Program RRI

Penguatan *branding* dan *positioning* RRI sebagai media publik yang kredibel, inklusif, dan berdampak merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperluas jangkauan audiens. Branding tidak hanya tentang memperkenalkan identitas lembaga, tetapi juga membentuk persepsi positif dan membedakan RRI dari media lainnya. Seluruh aktivitas siaran maupun *event* yang diselenggarakan harus diarahkan untuk mendukung pencapaian *brand awareness* dan *brand image* RRI secara konsisten. Dengan membangun *positioning* sebagai media yang menyuarakan kepentingan publik dan menjadi referensi informasi yang terpercaya, RRI akan semakin relevan di tengah dinamika kebutuhan informasi masyarakat.

Upaya penguatan *branding* ini memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kepuasan audiens. Ketika identitas dan peran RRI semakin kuat di benak publik, maka kepercayaan dan loyalitas *audiens* akan tumbuh. Untuk memastikan bahwa branding dan positioning yang dibangun berdampak nyata, RRI perlu melakukan pengukuran secara berkala melalui survei kepuasan dan riset persepsi audiens. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas program siaran dan konten yang diproduksi, sekaligus menjadi umpan balik penting dalam merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi Penguatan *Branding* dan *Positioning*

a) *Branding* Terpadu dan Konsisten

Seluruh program siaran, event, dan aktivitas kelembagaan diarahkan untuk membangun *brand awareness* dan memperkuat *brand image* RRI. Konsistensi narasi komunikasi menjadi kunci dalam membedakan RRI dari media lainnya.

b) *Positioning* sebagai Media Publik yang Inklusif dan Kredibel

RRI memposisikan diri sebagai media yang berpihak pada kepentingan publik, inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi rujukan utama dalam informasi kebangsaan.

c) Kampanye Komunikasi Publik

Pelaksanaan kampanye komunikasi publik melalui multiplatform digital dan konvensional untuk memperkuat citra RRI di mata audiens nasional dan daerah.

d) *Brand Activation* melalui Event dan Kolaborasi

Penyelenggaraan event tematik dan kolaborasi dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah untuk membangun keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap brand RRI.

Upaya Peningkatan Kepuasan *Audiens*

Brand yang kuat harus berbanding lurus dengan pengalaman positif audiens. Oleh karena itu, RRI fokus pada peningkatan kepuasan audiens melalui strategi sebagai berikut:

a) Survei Kepuasan dan Riset Persepsi Audiens

Melakukan survei berkala terhadap kepuasan dan persepsi audiens guna mengukur efektivitas program dan konten siaran, serta mengevaluasi *positioning* RRI di mata publik.

b) Penyusunan Strategi Konten Berbasis Data

Hasil survei menjadi dasar dalam penyusunan strategi konten yang lebih adaptif, relevan, dan partisipatif terhadap kebutuhan Masyarakat.

c) Peningkatan Interaktivitas dan Engagement

Meningkatkan interaksi dua arah dengan audiens melalui media sosial, forum digital, dan dialog publik, guna memperkuat loyalitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap RRI.

Optimalisasi Iklan Layanan Publik sebagai Sarana *Branding* dan Komunikasi Publik

Dalam mendukung penguatan *branding* sekaligus meningkatkan pelayanan publik, RRI mengoptimalisasi fungsi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) sebagai sarana komunikasi efektif yang menyasar langsung masyarakat luas. Strategi ILP mencakup:

a) Kegiatan *Off-Air* Interaktif

Penyelenggaraan kegiatan *off-air* di berbagai daerah yang menghadirkan partisipasi masyarakat secara langsung, sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi publik yang membumi.

b) Digitalisasi Layanan Kelembagaan

Inovasi digital seperti aplikasi informasi publik dan kanal pelaporan elektronik memperkuat transparansi dan efisiensi layanan RRI sebagai lembaga publik

c) Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Layanan

Pelayanan disesuaikan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, melalui penyusunan SOP layanan publik yang terstandar dan inklusif.

d) Penyedia Kanal Umpan Balik Masyarakat

Penyediaan kotak masukan digital dan offline sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap partisipasi serta akuntabilitas publik.

Penguatan *branding* dan peningkatan kepuasan audiens bukan hanya bagian dari strategi komunikasi, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang demokratis, efektif, dan terpercaya sejalan dengan butir ke-7 Asta Cita. Dengan identitas yang kuat dan audiens yang puas, RRI akan terus memperkuat perannya sebagai media publik yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi dan hiburan yang disajikan melalui siaran nasional maupun daerah dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan informasi.

B. Kebijakan 2: Perluasan Jangkauan Siaran Nasional Terrestrial dan Digital, serta Pembangunan dan Standarisasi Infrastruktur/Peralatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Merata

Sebagai media penyiaran publik, RRI berkomitmen untuk memperluas jangkauan siaran nasional, baik melalui teknologi terrestrial maupun digital. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, RRI terus membangun dan menstandarisasi infrastruktur serta peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kebijakan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan, dapat mengakses informasi yang berkualitas dan relevan bagi pembangunan nasional.

1) Penambahan, Revitalisasi dan Standarisasi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, serta Perangkat Studio dan Pemancar

Dalam upaya pencapaian infrastruktur berkelanjutan yang mana tertuang pada program prioritas nasional ke-3, RRI melakukan penambahan dan revitalisasi infrastruktur TIK, yang dikhususkan pada perangkat pemancar dan studio. Hal ini bertujuan sebagai upaya percepatan dalam membangun jembatan komunikasi dan penyebaran informasi yang merata, sehingga secara bertahap dapat memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara menyeluruh.

RRI melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur TIK dan seluruh perangkat studio serta pemancar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang ada, yang selanjutnya membuat perencanaan yang jelas terkait perangkat yang perlu ditambahkan, diperbaharui atau distandarisasi.

RRI menentukan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan penambahan, revitalisasi dan standarisasi infrastruktur TIK serta perangkat studio dan pemancar. RRI harus memastikan anggaran mencukupi untuk memperoleh peralatan dan layanan yang diperlukan. Selanjutnya terkait penyediaan perangkat TIK dan perangkat studio harus selektif dalam memilih vendor sebagai penyedia perangkat yang kompeten. Untuk itu RRI harus melakukan penelitian dan membandingkan sebelum memutuskan bekerjasama dengan *vendor* tertentu.

Penambahan, revitalisasi dan standarisasi harus dilakukan perubahan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan operasional yang sedang berlangsung, tentunya didukung dengan Tim teknis yang terlatih dan memiliki pemahaman yang cukup terkait penggunaan peralatan baru. Setelah penambahan selesai dilakukan maka harus dilakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur baru berfungsi dengan baik. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkala sehingga bisa tetap terpantau/termonitor performa dan akan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Untuk mengoperasikan infrastruktur/peralatan teknologi, informasi dan komunikasi serta perangkat studio dan pemancar harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu akan diberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, agar mereka terlatih dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan infrastruktur.

Dalam *Roadmap Coverage*, akan dilakukan upaya progresif infrastruktur dengan target perluasan cakupan siaran tahun 2025 sampai dengan 2029, dari 73% menjadi 85% secara nasional berdasarkan *baseline* 70% di tahun 2024. Dalam *roadmap* jaringan dan *storage*, akan dilakukan upaya peningkatan pada tahun 2025 - 2029 yaitu, kapasitas dari 4 tera/satker menjadi 12 tera/satker berdasarkan *baseline* 2 tera/satker di tahun 2024, *bandwidth* satker dari 10 Mbps menjadi 30 Mbps berdasarkan *baseline* 5 Mbps di tahun 2024, dan *bandwidth* kantor pusat dari 1 Giga menjadi 3 Giga berdasarkan *baseline* 500 Mbps di tahun 2024. Peralatan multimedia juga direncanakan meningkat dari

75% menjadi 100% cakupan satker berdasarkan baseline 50% satker di tahun 2024.

Hal ini bertujuan sebagai upaya percepatan dalam membangun jembatan komunikasi dan penyebaran informasi yang merata, sehingga secara bertahap dapat memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara menyeluruh.

2) Kolaborasi dengan *Stakeholder* Terkait dalam Mengembangkan Fasilitas dan Teknologi DAB+ dan Perluasan Jangkauan Pemancar DRM untuk Mitigasi Bencana dengan *Early Warning System (EWS)*

RRI terus melakukan pengembangan fasilitas dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait, khususnya dalam mengadopsi teknologi DAB+ (*Digital Audio Broadcasting Plus*). Berdasarkan *Roadmap* radio digital, RRI merencanakan uji coba DAB dengan PRSSNI, dilanjutkan dengan *Car Receiver Implementation*. Ekspansi bertahap akan dilakukan dari kota-kota besar di Jawa-Sumatera, dilanjutkan ke Sulawesi & NTT, hingga mencapai operasi nasional. Target peningkatan Lokasi tahun 2025 sampai 2029 yaitu dari tujuh menjadi 41 lokasi berdasarkan baseline 6 lokasi di tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan RRI untuk menghadirkan kualitas siaran digital yang lebih jernih dan efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pendengar di seluruh pelosok negeri.

RRI juga berupaya memperluas infrastruktur dan jangkauan pemancar DRM (*Digital Radio Mondiale*) melalui integrasi dengan sistem peringatan dini yang dikenal sebagai *Early Warning System (EWS)*. Selain itu, RRI berupaya mengoptimalisasikan *Car Receiver Implementation* dan *smartphone* serta ekspansi dengan target peningkatan uji coba dari tahun 2025 sebanyak 10 unit menjadi 48 unit pada 2029 berdasarkan baseline 8 unit pada tahun 2024.

Langkah ini merupakan bagian dari sinergi RRI dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjalankan program DPIS (*Disaster Prevention Information System*). Dengan infrastruktur DRM yang lebih canggih dan tahan terhadap kondisi bencana, RRI diharapkan dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan tepat saat terjadi situasi darurat.

Tabel 3.1 Proyeksi Perluasan dan Penguatan Jangkauan Pemancar

Pemancar	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Perencanaan DAB +	Bandung	Bogor	Medan Makassar Palembang Batam	Balikpapan Mataram Samarinda Denpasar Padang Jayapura Pontianak	Sorong Banjarmasin Palangkaraya Ambon Pekanbaru Jambi Bandar-lampung Serang Kupang Balikpapan
Perencanaan DRM	Manado Denpasar	Sukabumi Malang	Calang Pulau Nias Kepulauan Mentawai	Serang Pengandaran Cianjur Kuningan	Langadai Loeri (Paser) Bulukumba Majene

Pemancar	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
			Pulau Enggano Lampung Selatan	Banyumas Banjarnegara Jember Banyuwang	Kendari Palu Tolitoli Manado Sangihe Talaud Badung
Pemancar FM	PangkalanBun Wonogiri Tahuna Polewali Sibolga Meulaboh	Padang Balangan Luwu Berau Morowali Gorontalo Jayapura Sumba Tengah Nunukan Sula Natuna	Gunung Mas Bolaang Mongondow Pulau Taliabu Deiyai Nduga Puncak Jaya Banda Aceh Banten Sukamara Dogiyai Garut Malang Berau Bolaang Mongondow Timur	Seruyan Bolaang Mondow Selatan Cianjur Sijunjung Membrano Raya Yalimo Semeuleu Jember Rambigundam Lumajang Bukitkutul Tanjung-pinang Kotapasuruan Pegunang Arfak	Skouw Sentani Gunung Sitoli Magelang Subussalam Lamno Langsa Prapat Kabanjahe Sibuhuan Tembilahan Muntai Tobali Curup Ipuh Muara Enim Prambumulih Kotabumi Puncaksuranga Semitau Sendawar Sangata Banggai Talaud

3) Mengembangkan Jaringan Penyiaran Analog dan Digital Terrestrial, termasuk pada Wilayah 3T dan *Blank Spot*

RRI terus mengembangkan jaringan penyiaran analog dan digital terrestrial untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini minim akses siaran, dengan melakukan transisi bertahap dari radio analog ke digital. Dalam roadmap radio analog untuk tahun 2025 sampai dengan 2029, RRI akan melakukan migrasi analog ke digital, jumlah unit FM dari 662 akan menyisakan 370 unit hingga periode 2029, perkiraan angka migrasi ini diambil berdasarkan baseline 735 unit di tahun 2024, sedangkan untuk unit AM/MW dari 32 menjadi 20 unit berdasarkan baseline 36 di tahun 2024. Strategi migrasi akan difokuskan pada kota-kota besar yang akan dimigrasi ke DAB, sementara kota-kota rawan bencana akan dimigrasi ke DRM. Untuk AM/SW, RRI akan mempertahankan 5 unit digital dan memulai migrasi dari analog ke DRM.

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta daerah *blank spot*, dapat mengakses siaran RRI secara optimal. Hal ini akan berdampak positif pada pemerataan komunikasi publik terkait agenda pembangunan nasional, sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami ketertinggalan informasi. Dengan memperluas jangkauan siaran ini, RRI bertekad untuk semakin mendekatkan diri kepada publik dan terus berperan sebagai penyedia informasi yang terpercaya di berbagai wilayah di Indonesia.

4) Melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana teknologi pendukung siaran digital dan aplikasi multiplatform

RRI akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana teknologi untuk mendukung siaran digital dan aplikasi multiplatform guna meningkatkan kualitas serta jangkauan layanan siaran. Pengembangan mandiri RRI Digital dari sistem sewa pihak ketiga menjadi pengembangan dan pemeliharaan oleh tim internal, Roadmap pengembangan RRI Digital meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan *web development* untuk tim internal (3 bulan);
- b. Pengembangan aplikasi *mobile* dan *web* dengan dukungan partner (6 bulan);
- c. Migrasi pengguna dari RRI Digital versi lama ke versi baru (perkiraan kuartal pertama tahun 2025);
- d. Pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan oleh tim internal.

Untuk portal berita *rri.co.id*, RRI menetapkan strategi *milestone* yang berjenjang:

- a. Pelatihan tim pengembangan *web* internal dan pengembangan aplikasi web;
- b. Pengembangan aplikasi *mobile* RRI *News*, integrasi *Google News*, analitik data baru, dan analitik media sosial;
- c. Pengembangan konten kontribusi dari partner (Pemda, K/L), konten multibahasa, peningkatan konten video, dan integrasi sosial media simultan;
- d. Implementasi platform berbasis AI dan *Metaverse*, manajemen mandiri semua *platform* digital, dan integrasi dengan konten eksternal (*real big data*).

Roadmap Digital & IT juga mencakup pengembangan analitik konten dan media sosial, portal intranet, integrasi database induk, peningkatan perpustakaan konten dan implementasi teknologi komando manusia untuk aplikasi (suara, sidik jari, pengenalan wajah). Langkah ini mencakup modernisasi infrastruktur penyiaran, pengembangan aplikasi digital, serta optimalisasi platform daring agar lebih interaktif dan mudah diakses. Dengan percepatan ini, RRI dapat memberikan layanan siaran yang lebih inovatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan audiens di era digital.

5) Pengembangan Sistem Integrasi Informasi dan Berita (*Data Sharing*) Antar Satuan Kerja RRI Secara *Real-Time* untuk Kebutuhan Penyiaran dan Pemberitaan

Sebagai upaya memperkuat peran RRI dalam penyiaran dan pemberitaan berbasis data yang responsif dan menyeluruh, RRI merancang sistem integrasi informasi dan berita antar satuan kerja secara *real-time*. Sistem ini berbasis *computer & internet-based data sharing* yang menyerupai *platform cloud* atau *one drive*, di mana setiap penyiar dan reporter dapat mengunggah berbagai informasi, konten siaran, dan materi berita ke dalam satu platform terpusat. Dengan sistem ini, satuan kerja RRI dari berbagai daerah dapat saling mengakses, memanfaatkan, dan mengadaptasi konten yang tersedia untuk disesuaikan dengan kebutuhan siaran lokalnya masing-masing. Hal ini memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas wilayah yang lebih dinamis dan efisien, sekaligus mendorong pemerataan kualitas konten antar daerah.

Pengembangan sistem ini akan dilakukan secara kolaboratif oleh Direktorat Teknologi dan Media Baru bersama Direktorat Program dan Produksi, serta memungkinkan keterlibatan pihak pengembang (*developer*) profesional untuk membangun infrastruktur digital yang andal dan mudah digunakan. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan ekosistem data terintegrasi RRI yang mendukung penyiaran berbasis informasi aktual dan terverifikasi secara nasional.

Dengan adanya sistem ini, informasi strategis dan krusial, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, dapat tersebar secara masif dan cepat ke seluruh jaringan RRI, sekaligus tetap mempertahankan relevansi lokal melalui penyesuaian isi berdasarkan karakteristik audiens di masing-masing daerah. Inovasi ini akan memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang adaptif, terkoneksi, dan berbasis data.

C. Kebijakan 3: Optimalisasi Kualitas Layanan Manajemen Internal dan Kinerja RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang Berkualitas dan Kredibel

RRI terus berupaya mengoptimalkan kualitas layanan manajemen internal dan meningkatkan kinerja organisasi agar tetap kredibel dan profesional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional RRI berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung visi dan misi lembaga.

Melalui peningkatan tata kelola yang baik, RRI berkomitmen untuk memberikan layanan penyiaran yang lebih berkualitas dan relevan bagi masyarakat. Dengan memperkuat sistem manajemen internal, RRI dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan industri penyiaran serta memberikan informasi yang terpercaya dan berimbang.

- 1) Melakukan Percepatan Transformasi SDM yang Berkualitas, Profesional dan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi Digital untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas SDM di Lembaga

Strategi percepatan transformasi SDM RRI dilakukan untuk mencapai sasaran nasional, yaitu agar terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta penerapan budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif. Secara teknis, upaya ini juga didukung melalui penerapan sistem pembelajaran terintegrasi atau *Corporate University* (Corpu) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) RRI. Dengan strategi ini, RRI dapat mengurangi kesenjangan kapasitas SDM di lembaga, sehingga mampu menghadapi tantangan industri penyiaran digital secara lebih efektif.

Upaya peningkatan *capacity building* yang dilakukan RRI bukan hanya mengedepankan pada aspek penguatan *hard skill*, melainkan juga pada pengembangan *soft skill* dan *mindset* (pola berpikir) guna menciptakan pegawai yang memiliki tingkat kompetensi yang menyeluruh hingga pada aspek sikap dan perilaku.

- 2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Manajemen, Sumber Daya dan Keuangan yang Berimplikasi pada Kualitas Kinerja Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

RRI berupaya untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan manajemen melalui reformasi birokrasi yang lebih efisien. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kinerja lembaga. Dengan pengelolaan yang lebih baik, RRI dapat

memberikan layanan siaran yang lebih berkualitas serta meningkatkan daya saing di era *multiplatform*.

- 3) Meningkatkan Standarisasi Pola Kerja, Tata Alokasi/Distribusi SDM dan Fasilitas Perkantoran Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerja

Strategi kelembagaan ini bertujuan untuk menciptakan kualitas standar kerja yang lebih jelas, pembagian tugas menjadi lebih terstruktur dan terukur, pemanfaatan SDM yang lebih optimal, dan fasilitas kerja yang dapat digunakan secara efisien. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- 4) Melakukan Penguatan Pengawasan Internal dalam Rangka Menjaga Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pencegahan Korupsi.

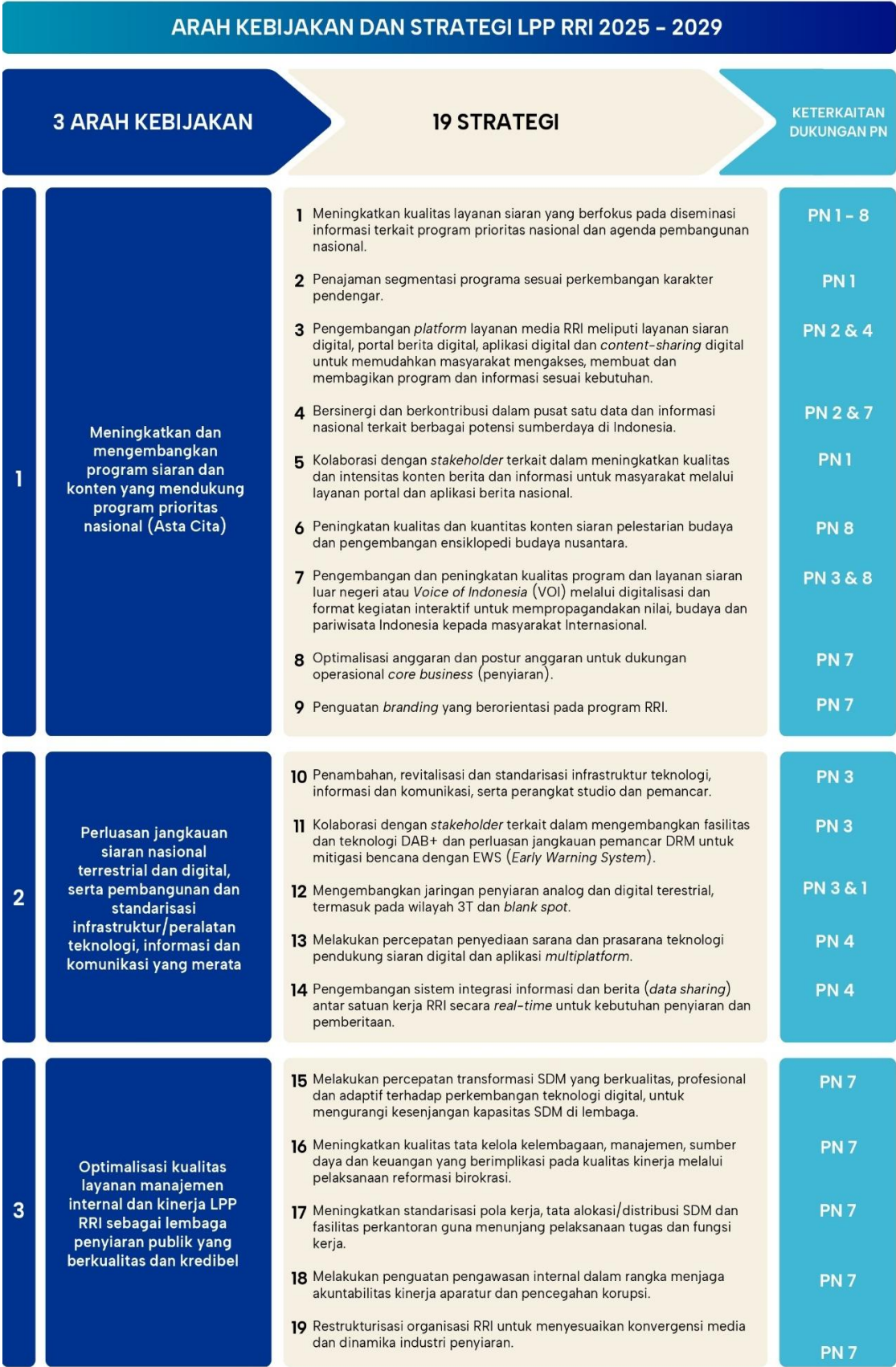
RRI akan memperkuat pengawasan internal guna memastikan akuntabilitas kinerja aparatur serta mencegah praktik korupsi di lingkungan lembaga. Langkah ini mencakup penerapan sistem pengawasan yang transparan, evaluasi berkala, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, RRI dapat menciptakan birokrasi dan budaya kerja yang profesional, bersih, dan berintegritas.

- 5) Restrukturisasi Organisasi RRI untuk Menyesuaikan Konvergensi Media dan Dinamika Industri Penyiaran

Perkembangan industri media global yang semakin kompleks dan bersifat multifaset mendorong transformasi kelembagaan di tubuh RRI agar mampu merespons perubahan dengan cepat, relevan, dan strategis. Konvergensi media yang terjadi saat ini tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga melibatkan pergeseran struktur industri, perubahan perilaku konsumsi media, serta dinamika budaya dan pola komunikasi masyarakat. Restrukturisasi organisasi RRI merupakan Langkah imperatif untuk menjaga relevansi Lembaga di tengah perubahan lanskap industri media yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berbasis pada prinsip fleksibilitas, kolaborasi lintas *platform*, serta orientasi pada inovasi konten digital dan layanan publik yang terintegrasi.

Sebagai langkah konkret, RRI akan mengajukan penyesuaian nomenklatur kelembagaan yang lebih adaptif terhadap ekosistem media digital, antara lain melalui pembentukan Direktorat Konten dan Media Digital atau nomenklatur lainnya yang relevan. Direktorat ini akan mengelola pengembangan konten *multiplatform*, monetisasi digital, optimalisasi layanan media daring, dan penguatan relasi audiens berbasis data. Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundangan dan diajukan secara resmi kepada Kementerian PAN-RB dan regulator terkait guna memperoleh legalitas kelembagaan. Dengan struktur baru yang lebih relevan terhadap lanskap media saat ini, RRI akan memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang modern, kredibel, dan mampu menjawab tantangan transformasi digital secara berkelanjutan.

Gambar 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi RRI



3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud, RRI memperhatikan potensi perubahan regulasi dan perundang-undangan yang mengatur penyiaran dan pers. Dari sisi internal, RRI juga melakukan pembenahan regulasi teknis yang ditetapkan organisasi sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan operasional RRI, baik dalam bidang program dan produksi, teknologi dan media baru, layanan dan pengembangan usaha, SDM dan umum, serta keuangan.

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Renstra RRI 2025-2029 salah satunya menyoroti revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan transformasi digital. Peraturan ini menegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik, termasuk RRI, berperan sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, profesional, dan non-komersial dengan kewajiban menyiarkan layanan melalui sistem digital terrestrial serta *multiplatform*. Dalam regulasi ini, RRI memiliki hak untuk menyelenggarakan penyiaran berbasis platform digital tanpa perlu mengajukan izin tambahan jika sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

RUU Penyiaran yang baru menunjukkan arah reformasi regulasi penyiaran di Indonesia ke arah integrasi teknologi digital, perluasan platform penyiaran, dan fleksibilitas operasional bagi lembaga penyiaran termasuk RRI. RUU ini memberi landasan hukum bagi RRI untuk bertransformasi dalam era digital tanpa kehilangan peran publiknya. Dalam konteks ini, definisi penyiaran juga menjadi lebih luas, dalam rancangan regulasi ini memberikan legitimasi bagi RRI untuk memperluas kegiatan penyiarannya tidak hanya melalui frekuensi radio terrestrial, tapi juga melalui internet, satelit, dan *platform* digital lainnya, selain itu juga menjadikan siaran *on-demand* dan *streaming* sebagai bagian legal dari layanan penyiaran publik. Tentunya hal itu berimplikasi bahwa RRI perlu mengembangkan infrastruktur digital dan SDM untuk mengelola *multiplatform* (termasuk *podcast*, *streaming*, dan kanal digital lainnya).

Sebagai bagian dari transformasi digital, regulasi tersebut mengatur migrasi penyiaran radio dari analog ke digital dalam periode lima tahun, dengan batas akhir November 2028. Regulasi ini juga mencakup ketentuan bahwa digitalisasi penyiaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha penyiaran dan akses masyarakat terhadap teknologi digital. Selain itu, pengelolaan spektrum frekuensi radio menjadi perhatian utama dalam regulasi, dengan penyesuaian kebijakan untuk mendukung digitalisasi serta mencegah penggunaan frekuensi yang tidak efisien.

Menghadapi masa transisi tersebut, RRI harus menyusun *roadmap* migrasi teknologi dan konten ke digital secara bertahap, serta melakukan investasi infrastruktur digital dan edukasi publik menjadi prioritas untuk memastikan audiens tetap dapat mengakses siaran. Dalam implementasi penyiaran *multiplatform*, RRI telah mengembangkan layanan digital seperti RRI Digital, RRI News, RRI Net, dan RRI *Streaming* untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Regulasi juga mendukung kolaborasi antara RRI dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri kreatif, serta penyedia layanan digital, guna memastikan transisi yang lancar ke ekosistem penyiaran digital. Selain itu, RRI mendorong adanya dukungan infrastruktur serta pengamanan data digital sebagai bagian dari kebijakan perlindungan dalam era penyiaran *multiplatform*.

- 2) Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)

Pembahasan *draft* RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) oleh DPR menjadi langkah strategis dalam memperkuat regulasi bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti RRI dan TVRI. RUU ini bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat kapasitas SDM, serta mengatasi kendala dalam pembiayaan dan penyelenggaraan siaran. Salah satu aspek krusial dalam RUU RTRI adalah kejelasan mekanisme pendanaan melalui APBN, yang selama

ini belum memiliki alokasi khusus bagi LPP. Dengan adanya regulasi ini, sumber pembiayaan menjadi lebih terstruktur, mencakup dana dari APBN, jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, serta sumber sah lainnya. Pengaturan yang lebih baik ini akan memastikan keberlanjutan operasional dan memperkuat peran RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, RUU RTRI juga membuka peluang bagi media publik lainnya, seperti LKBN Antara, untuk bergabung dalam satu entitas penyiaran nasional. Sebagai kantor berita resmi negara yang telah lama berperan dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, Antara diharapkan dapat memperkuat ekosistem media publik dengan sinergi yang lebih erat bersama RRI dan TVRI. *Merger* ini akan memungkinkan optimalisasi sumber daya, peningkatan efisiensi operasional, serta penyebaran informasi yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, RUU RTRI tidak hanya memperjelas tata kelola penyiaran publik, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansi media nasional dalam menghadapi dinamika industri informasi yang terus berkembang.

RTRI diharapkan menjadi lembaga penyiaran publik modern yang adaptif dan relevan dalam menghadapi dinamika industri media. Transformasi ini selaras dengan Asta Cita, yang menitikberatkan pada perluasan jangkauan informasi, peningkatan kualitas konten, serta penguatan peran media dalam membangun kesadaran nasional dan diplomasi budaya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan model bisnis *multiplatform* akan meningkatkan daya saing RTRI, memungkinkan diversifikasi layanan seperti siaran *on-demand* dan kolaborasi dengan industri kreatif. Dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan infrastruktur yang memadai, RTRI dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam ekosistem media nasional, memastikan keberlanjutan dan daya saingnya di tingkat global dalam era digital.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi RRI sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, RRI harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan pada RRI secara efektif dan efisien, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Satker RRI di seluruh Indonesia.

A. Restrukturisasi Organisasi

- 1) Pembentukan Bagian atau Divisi Khusus Perencanaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam perumusan strategi dan kebijakan RRI agar lebih terstruktur dan berorientasi pada target jangka panjang.
- 2) Restrukturisasi Satuan Pengawas Intern (SPI) dilakukan guna memperkuat sistem pengawasan dan audit internal, memastikan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang lebih baik dalam operasional RRI.
- 3) Pengembangan Unit Khusus Digitalisasi menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi transformasi digital, termasuk implementasi teknologi baru untuk mendukung layanan *multiplatform* RRI.
- 4) Pengembangan Unit Kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) difokuskan untuk mengelola, mengolah, dan menyajikan data secara sistematis, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan *real-time*.
- 5) Penataan ulang struktur kelembagaan mencakup berbagai aspek, di antaranya:

- a. Perubahan nomenklatur Direktorat dilakukan untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan kebutuhan dan tantangan baru di industri penyiaran.
- b. Proporsi antara Direktorat Layanan Inti (Dit. PP) dan Direktorat Pendukung perlu dibuat lebih proporsional agar kebijakan penganggaran dapat lebih seimbang dan mendukung prioritas utama RRI.

B. Pengembangan Stasiun Siaran

- 1) Peningkatan kapasitas atau status Satuan Kerja Penyiaran dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan kualitas konten, serta penyesuaian struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan audiens di berbagai wilayah.
- 2) Pengembangan Stasiun Siaran RRI di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan RRI di pusat pemerintahan baru, memastikan akses informasi yang merata, serta memperkuat peran RRI sebagai media publik nasional yang mendukung pembangunan dan persatuan bangsa.

Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Stasiun Siaran RRI Tahun 2025 – 2029

Tipe Stasiun Siaran RRI	Jumlah Stasiun Siaran Tahun 2024	Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Stasiun Siaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
A	1	1	1	1	1	1
B	33	33	34	35	36	37
C	35	35	35	35	35	35
SP	30	35	34	33	32	31
Proyeksi Perkembangan Status Stasiun Siaran RRI IKN						
RRI IKN	-	SP	C	B	B	A

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Radio Republik Indonesia, khususnya dalam mendukung terwujudnya “Indonesia Emas 2045,” LPP RRI telah menetapkan sejumlah tujuan dan sasaran strategis yang fokus pada pencapaian hasil nyata. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat melalui berbagai program yang dilaksanakan. Tujuan dan sasaran strategis ini mencerminkan komitmen LPP RRI dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, sekaligus menguatkan perannya sebagai media publik yang menyebarkan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memastikan keberhasilan setiap sasaran strategis, RRI menerapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai alat ukur utama. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi seberapa efektif program-program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, RRI tidak hanya berfokus pada output atau hasil akhir program, tetapi juga pada *outcome*, yaitu dampak yang dirasakan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan komitmen RRI dalam mewujudkan perubahan positif menuju tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

Tujuan dan Sasaran Strategis RRI
Tabel 4.1 Tujuan 1: Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RRI
Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1. Memberikan layanan siaran berkualitas sesuai fungsi media yang menginspirasi seluruh lapisan masyarakat dengan nilai keindonesiaan untuk mendukung tercapainya program prioritas nasional							
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional	Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden	61.685	86.505	111.325	136.145	160.965	Konten
	Indeks tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden	6	6.2	6.4	6.6	7	Indeks
	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI	70	75	80	85	90	Tingkat
	Persentase Layanan Siaran yang Melibatkan Komunitas Masyarakat	10	12	14	16	18	%
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Jangkauan Layanan Siaran Radio dan Penguatan Platform Digital	Jangkauan Penyiaran Radio Teresterial per Populasi	73	76	79	82	85	%
	Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	35	40	45	50	120	%
	Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Teresterial RRI	1	1	1	1	1	%

A. Tujuan 1: Memberikan Layanan Siaran Berkualitas sesuai Fungsi Media yang Menginspirasi Seluruh Lapisan Masyarakat dengan Nilai Keindonesiaan Untuk Mendukung Tercapainya Program Prioritas Nasional.

RRI memikul tanggung jawab strategis untuk memberikan layanan informasi, konten dan siaran yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. RRI berkomitmen untuk mewujudkan layanan siaran dan konten yang sejalan dengan prioritas nasional melalui berbagai program inovatif dan partisipatif.

Selama periode 2025–2029, fokus utama adalah memperkuat kualitas dan jangkauan siaran yang mendukung pilar-pilar Asta Cita, seperti penguatan demokrasi, peningkatan kualitas SDM, pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesatuan dan persatuan bangsa.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional

RRI memikul tanggung jawab strategis untuk memberikan layanan informasi, konten dan siaran yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. RRI berkomitmen untuk mewujudkan layanan siaran dan konten yang sejalan dengan prioritas nasional melalui berbagai program inovatif dan partisipatif. Selama periode 2025–2029, fokus utama Adalah memperkuat kualitas dan jangkauan siaran yang mendukung pilar-pilar Asta Cita, seperti penguatan demokrasi, peningkatan kualitas SDM, pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesatuan dan persatuan bangsa.

1) Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden

Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI menjadikan pengembangan program siaran dan konten yang mendukung Program Prioritas Presiden sebagai salah satu fokus utama. Upaya ini diarahkan untuk menghadirkan layanan siaran berkualitas sesuai fungsi media publik yang menginspirasi seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan, sehingga secara nyata mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional. Target yang ditetapkan adalah terwujudnya layanan siaran yang berkualitas, inklusif, inspiratif, dan berorientasi pada diseminasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, menginspirasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Secara kuantitatif, jumlah konten siaran yang terkait dan bermuatan program prioritas Presiden dirancang meningkat secara bertahap dari *baseline* 61.685 pada 2025–2026, menjadi 86.505 pada 2027–2028, hingga mencapai 160.965 konten pada 2029. Peningkatan ini mencerminkan komitmen RRI dalam mengawal dan mendukung kesuksesan program prioritas presiden yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.

Untuk mencapai target tersebut, LPP RRI melakukan penguatan strategis melalui perencanaan dan produksi program tematik yang relevan dengan Asta Cita, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, optimalisasi multiplatform siaran agar menjangkau masyarakat luas termasuk wilayah 3T, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk menjamin kualitas program dan konten, serta dampak siaran.

2) Indeks tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden

RRI menempatkan peningkatan literasi pendengar terhadap program prioritas presiden sebagai salah satu indikator kinerja utama pada periode 2025– 2029. Indeks literasi pendengar, yang mengukur tingkat pemahaman audiens atas konten program Asta Cita melalui survei daring, ditargetkan meningkat secara bertahap dari baseline 6 pada tahun 2025 menjadi 7 pada tahun 2029. Peningkatan ini selaras dengan transformasi indikator kinerja LPP RRI yang bergeser dari orientasi kuantitatif seperti jumlah siaran menjadi indikator kualitatif yang berbasis capaian audiens dan dampak sosial, seperti peningkatan literasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan perilaku positif di berbagai sektor. Langkah ini menegaskan komitmen LPP RRI dalam menyajikan program yang bukan hanya informatif tetapi juga edukatif dan berdampak nyata pada kehidupan masyarakat.

Dalam implementasinya, RRI secara aktif menyebarkan informasi program pemerintah di berbagai sektor strategis, seperti pemberdayaan ekonomi desa, kewirausahaan, promosi lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan masyarakat. Konten siaran LPP RRI tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang dialog interaktif dengan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan literasi publik, termasuk literasi kesehatan mental, ibu dan anak, hingga penyakit menular.

Dengan menjadi kanal umpan balik antara masyarakat dan pemerintah, LPP RRI memperkuat perannya sebagai pengawal dan pengawas pelaksanaan kebijakan publik agar tepat sasaran. Melalui strategi ini, RRI bukan hanya meningkatkan pemahaman audiens terhadap program prioritas nasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

3) Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI

RRI menetapkan indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan layanan siaran yang berkualitas dan inspiratif. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI diperoleh melalui survei internal yang dilaksanakan secara berkala oleh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Survei ini menilai berbagai aspek pengalaman pendengar, mulai dari frekuensi akses dan keterlibatan mereka terhadap siaran RRI, hingga persepsi atas manfaat, dampak, dan relevansi program yang disuguhkan. Pada tahun 2025, LPP RRI menargetkan *baseline* kepuasan masyarakat sebesar 70 persen, yang selanjutnya ditingkatkan secara bertahap menjadi 90 persen pada tahun 2029 sebagai wujud komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat ini diwujudkan melalui optimalisasi konten siaran yang informatif, edukatif, dan menghibur, disertai peningkatan kualitas produksi program yang lebih inovatif serta penguatan interaksi dengan pendengar di berbagai kanal, termasuk portal dan aplikasi digital RRI. Dengan langkah tersebut, RRI diharapkan mampu memperkuat kepercayaan dan loyalitas audiens, memperluas jangkauan layanan siaran yang berorientasi pada kebutuhan publik, serta mempertegas peran LPP RRI sebagai media publik yang tidak hanya menjadi sumber informasi terpercaya, tetapi juga mitra masyarakat dalam mendukung tercapainya program prioritas nasional.

4) Persentase Layanan Siaran yang Melibatkan Komunitas Masyarakat

RRI menetapkan sasaran peningkatan persentase layanan siaran yang melibatkan komunitas masyarakat dari 10% pada tahun 2025 menjadi 18% pada tahun 2029. Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan ruang ekspresi yang mendorong kreativitas, inovasi, serta partisipasi generasi muda dalam kegiatan edukatif, kompetisi, dialog interaktif, dan lain sebagainya. Selain itu, RRI mengedepankan penguatan harmonisasi sosial dan toleransi antar agama melalui siaran berbasis nilai kebhinekaan serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan ruang komunikasi yang inklusif di tengah keberagaman.

Implementasi komitmen ini tercermin dalam penyelenggaraan program-program strategis, antara lain program siaran edukasi yang menjangkau puluhan ribu institusi pendidikan serta memperoleh apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan UNESCO. Sejak tahun 2022, Festival Pelajar Nusantara juga dilaksanakan secara serentak di 65 satuan kerja dengan melibatkan lebih dari 90.000 pelajar dan puncaknya menghadirkan 22.500 pelajar di Stadion Manahan. Selain itu, program radio tanggap bencana yang melibatkan ratusan personel lintas lembaga semakin memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat luas dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Sasaran Strategis 2. Meningkatkan Jangkauan Layanan Siaran Radio serta Penguatan Platform Digital

RRI memiliki mandate untuk menyediakan layanan informasi yang adil dan merata ke seluruh pelosok Indonesia. Dalam era digital dan konektivitas tinggi saat ini, tantangan dan peluang bagi penyiaran public menjadi sangat kompleks, menuntut penguatan baik dari sisi siaran teresterial maupun platform digital. Dalam rangka akselerasi pemerataan akses digital Indonesia hingga ke wilayah 3T, RRI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan jangkauan siaran dan memperkuat 97 kehadiran jaringan teresterial dan digital secara simultan selama periode 2025-2029. Strategi ini sejalan dengan visi Indonesia menuju Society 5.0, tempat media public menjadi pendorong literasi dan partisipasi digital masyarakat.

1) Persentase Jangkauan Penyiaran Radio Terrestrial per Populasi

Berdasarkan data dari aplikasi *coverage area prediction*, siaran radio teresterial RRI saat ini telah menjangkau sekitar 70% populasi Indonesia. Meskipun capaian ini cukup signifikan, tantangan besar masih dihadapi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang minim infrastruktur penyiaran dan sulit dijangkau secara geografis. Ketimpangan ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik yang berkualitas, terutama dalam hal literasi kebangsaan, mitigasi bencana, dan layanan informasi dasar lainnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, RRI menargetkan peningkatan jangkauan layanan hingga mencakup setidaknya 85% populasi pada tahun 2029. Strategi yang ditempuh meliputi pembangunan pemancar baru di wilayah strategis, modernisasi perangkat siaran untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas transmisi, serta penguatan daya pancar pada jaringan yang telah ada. Selain itu, kerja sama lintas lembaga dan pemangku kepentingan juga terus didorong guna memastikan keberlanjutan layanan penyiaran publik, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai penghubung informasi antara negara dan seluruh warga negara.

2) Persentase Pertumbuhan Pengakses *Streaming* Siaran Radio Digital

Transformasi digital menjadi salah satu agenda prioritas RRI dalam merespons perubahan lanskap media dan perilaku konsumsi masyarakat. Melalui peluncuran dan pengembangan berbagai platform digital seperti RRI Digital, RRI *News*, dan RRI *Podcast*, RRI menyediakan layanan *streaming* siaran radio secara *real-time* yang dapat diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan data internal, pada tahun 2024 jumlah kunjungan pada layanan streaming RRI Digital mencapai sekitar 4 juta visit (31,36%). Angka ini mencerminkan antusiasme publik terhadap akses media berbasis digital yang fleksibel, relevan, dan informatif.

Sejalan dengan peta jalan Transformasi Digital, RRI menargetkan pertumbuhan pengakses *streaming* siaran radio digital sebesar 35% per tahun, dengan proyeksi peningkatan hingga 120% pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, RRI terus memperkuat infrastruktur digital serta melakukan inovasi layanan berbasis teknologi, seperti integrasi sistem antarmuka pengguna, peningkatan kualitas audio visual, dan pengembangan konten yang lebih personal dan interaktif. Di samping itu, kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan juga diperluas, guna memperkaya fitur dan memperkuat posisi RRI sebagai media publik digital yang inklusif, terpercaya, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat *modern*.

3) Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Teresterial RRI

Dalam rencana strategis periode 2025–2029, salah satu sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya jangkauan layanan siaran radio dan penguatan platform digital, termasuk target peningkatan jumlah pendengar siaran teresterial sebesar 1% setiap tahun sejak 2025 hingga 2029. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2024 dan data Nielsen tentang *audience share* RRI, estimasi jumlah pendengar siaran teresterial LPP RRI saat ini berada pada kisaran 11,8 juta jiwa. Untuk mencapai target peningkatan pendengar tersebut, LPP RRI perlu terus berinovasi dengan mengintegrasikan siaran teresterial dan strategi digital agar lebih inklusif, interaktif, serta sesuai dengan preferensi masyarakat di berbagai segmen.

Dengan memahami dinamika perilaku pendengar ini, RRI memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai media public yang relevan, adaptif, dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Tujuan ini hadir sebagai penguatan dari misi ke-2 RRI untuk menegaskan komitmen RRI dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif, efisien, dan partisipatif sehingga mampu menjawab tantangan era digital dan menjaga kepercayaan publik.

Tabel 4.2 Tujuan 2: Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RRI Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target					Satua n
		2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 2. Meningkatkan Tata Kelola LPP RRI sesuai prinsip <i>Good Public Governance</i>							
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen LPP RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	80	82	84	86	90	Indeks

B. Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola LPP RRI sesuai Prinsip *Good Public Governance*

Tujuan ini hadir sebagai penguatan dari misi ke-2 LPP RRI untuk menegaskan komitmen LPP RRI dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif, efisien, dan partisipatif sehingga mampu menjawab tantangan era digital dan menjaga kepercayaan publik.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen LPP RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif

RRI tidak saja memiliki kewajiban dalam hal pelayanan siaran publik, tetapi juga dalam penerapan tata kelola manajemen yang akuntabel, transparan, dan responsif. Komitmen terhadap prinsip *good public governance* menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan kredibilitas dan keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.

Fokus tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, proses, dan layanan LPP RRI berlandaskan prinsip integritas, efektivitas, serta keberlanjutan, sehingga LPP RRI semakin relevan dan berdampak bagi masyarakat.

1) Nilai Reformasi Birokrasi

RRI menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan transformasi kelembagaan melalui implementasi Reformasi Birokrasi secara bertahap dan terukur. Salah satu indikator keberhasilan dari proses ini tercermin dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dinilai oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2024, RRI mencatat skor RB sebesar 76,78, meningkat 4,20 poin dibanding tahun sebelumnya.

Tren positif ini merupakan hasil dari sejumlah langkah strategis seperti optimalisasi manajemen SDM, digitalisasi layanan administrasi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan RRI menargetkan skor RB mencapai 90 pada tahun 2029.

Target ini mencerminkan ambisi institusional untuk mewujudkan birokrasi yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Strategi yang akan ditempuh antara lain mencakup perluasan penerapan Zona Integritas di seluruh satuan kerja LPP RRI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), penguatan sistem penilaian kinerja berbasis hasil, serta peningkatan partisipasi publik dalam pemantauan dan evaluasi kualitas layanan. Melalui pendekatan ini, LPP RRI menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai fondasi utama untuk menopang transformasi digital dan memperkuat kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang kredibel.

4.2. Program dan Indikator Kinerja Utama LPP RRI

Dalam rangka mencapai sasaran program yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) LPP RRI periode 2025-2029, telah ditetapkan kinerja kegiatan dan sasaran kinerja kegiatan, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Sasaran Program

Tabel 4.3 Program Penyiaran Publik - LPP RRI Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penyiaran Publik							
Meningkatnya Kualitas Produksi dan Distribusi Konten	Persentase Satker yang Memperoleh Kriteria “Baik” Untuk Indeks Kualitas Paket Produksi Konten Siaran	45	50	55	60	65	Satuan Kerja
	Jumlah Inovasi Produk Siaran	3	3	4	4	5	Program
	Jumlah Penghargaan Penyiaran	150	152	155	157	160	Peng-hargaan
	Peringkat rri.co.id	25	24	23	22	21	Peringkat
	Jumlah Kerjasama Nasional dan Internasional	15	20	25	30	30	Kerjasama
Meningkatnya Relevansi Program Siaran dengan Prioritas Nasional	Jumlah Konten Digital yang Relevan dengan Program Prioritas Presiden	38.185	63.665	89.145	114.625	140.105	Konten
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung oleh Program Siaran RRI	100	100	100	100	100	%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penyiaran	Nilai Keamanan Sistem Aplikasi RRI	3	3,2	3,35	3,5	3,65	Nilai
	Persentase Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Penyiaran	80	85	90	93	95	%
	Persentase Kabupaten/Kota Blankspot Siaran Teresterial RRI	30	28	25	22	20	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Promosi Program Siaran yang Selaras dengan Prioritas Nasional	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	Nilai
	Indeks <i>Brand Image</i>	4	4,1	4,2	4,3	4,4	Indeks
	Penerimaan PNBP Fungsional	26	28	31	34	37	Milyar Rupiah

SP 1. Meningkatnya Kualitas Produksi dan Distribusi Konten

Dalam menghadapi dinamika industri media yang semakin kompetitif dan menuntut kualitas tinggi, RRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan distribusi konten siaran publik.

Hal ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta menjawab tantangan era digital yang semakin dinamis. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan RPJMN 2025–2029, RRI memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi yang edukatif, kredibel, dan inspiratif sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya saing global.

1. Persentase Satker yang Memperoleh Kriteria Baik Untuk Indeks Kualitas Produksi Siaran

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi satuan kerja LPP RRI, dalam hal ini Stasiun Siaran (radio), yang berhasil mencapai kriteria “Baik” dalam Indeks Kualitas Produksi Siaran. Indeks ini merupakan tolok ukur menyeluruh yang menilai mutu produksi siaran radio berdasarkan berbagai aspek penting, seperti relevansi isi siaran dengan kebutuhan publik, inovasi dalam penyampaian, keberagaman format siaran, kepatuhan terhadap regulasi penyiaran, serta kualitas teknis dan artistik siaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, LPP RRI menargetkan 45 stasiun siaran memperoleh predikat “Baik” pada tahun 2025, dan secara bertahap meningkatkan capaian tersebut hingga 65 pada tahun 2029.

Penilaian kualitas produksi dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai format program siaran unggulan, antara lain:

- 1) Buletin Berita (aktual, relevan, kredibel, berimbang, penting dan menarik);
- 2) Filler (bermanfaat, unik, dapat dipercaya, menarik, mudah dipahami);
- 3) ILM (mudah dipahami, bermanfaat, memiliki kepedulian sosial, orisinal); dan
- 4) Mini Drama (menarik, imajinatif, mengangkat tema Asta Cita).

Berdasarkan hasil penilaian ini, satker akan dikategorikan sesuai tingkat pencapaian indeks kualitas produksi:

- 1) 85–100 (Sangat Baik);
- 2) 70–85 (Baik);
- 3) 55–70 (Cukup);
- 4) 40–55 (Kurang);
- 5) dan < 39,9 (Sangat Kurang).

Melalui sistem pengukuran yang jelas dan konsisten ini, LPP RRI berupaya memperkuat budaya kualitas di seluruh satker sehingga setiap program siaran benar-benar memenuhi standar penyiaran publik yang inspiratif, edukatif, dan berdampak bagi masyarakat luas.

2. Jumlah Inovasi Produk Siaran

Peningkatan kualitas produksi dan distribusi konten menjadi salah satu fokus utama RRI dalam menghadapi tantangan ekosistem media yang terus berkembang. Untuk mendukung hal ini, RRI menargetkan pencapaian inovasi produk siaran secara bertahap dengan target 3 inovasi pada 2025, meningkat menjadi 4 pada 2027 dan 5 inovasi pada 2029. Inovasi ini mencakup pengembangan format program siaran baru, penyusunan dan pembaruan standar operasional prosedur (SOP), adopsi teknologi media terbaru, serta berbagai terobosan lain yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

Setiap inovasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas editorial dan teknis siaran RRI, memperkuat daya jangkauan

konten melalui distribusi multiplatform, serta mendorong keterlibatan audiens secara lebih luas. Pemanfaatan teknologi terkini dan penyempurnaan proses kerja juga menjadi bagian integral dalam mendukung penyiaran publik yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan langkah ini, RRI menegaskan komitmennya untuk terus berkembang sebagai media penyiaran yang profesional, kreatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

3. Jumlah Penghargaan Penyiaran

Indikator strategis Jumlah Penghargaan Penyiaran mencerminkan pengakuan eksternal terhadap kualitas, inovasi, dan kontribusi RRI di tingkat nasional maupun internasional. Dengan baseline sebanyak 150 penghargaan pada tahun 2025, LPP RRI menargetkan peningkatan bertahap hingga mencapai 160 penghargaan pada tahun 2029. Capaian ini mencakup penghargaan dalam berbagai kategori, seperti penyiaran dan jurnalistik, inovasi digital/media, layanan publik, serta diplomasi budaya dan kerja sama internasional. Untuk meraih target tersebut, LPP RRI akan terus mendorong pengembangan program siaran yang relevan dengan isu global, seperti keberagaman budaya, inklusi sosial, dan transformasi digital.

Upaya strategis dilakukan melalui penciptaan konten yang inovatif dan berorientasi publik, serta penguatan jejaring kemitraan dengan organisasi penyiaran dunia, termasuk melalui peran aktif di *Asia-Pacific Broadcasting Union* (ABU) dan kolaborasi dengan lembaga media global lainnya. Dengan strategi ini, LPP RRI diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi di panggung nasional, tetapi juga semakin diakui sebagai lembaga penyiaran publik Indonesia yang berdaya saing dan berwawasan global.

4. Peringkat rri.co.id

Indikator strategis Peringkat rri.co.id dalam Kategori Media Berita Nasional menggambarkan posisi daya saing digital LPP RRI di ranah pemberitaan nasional. Dengan *baseline* peringkat ke-25 pada tahun 2025, LPP RRI menargetkan peningkatan bertahap hingga mencapai peringkat ke-21 pada tahun 2029, sebagai bagian dari upaya transformasi digital dan penguatan kehadiran daring. Peringkat ini dihitung berdasarkan lalu lintas pengunjung, visibilitas konten, dan interaksi pengguna sebagaimana tercermin dalam data dari platform pemantauan seperti *SimilarWeb* dan *Alexa*.

Untuk mencapai sasaran ini, RRI akan mengoptimalkan kinerja portal berita rri.co.id melalui pendekatan strategis seperti pemanfaatan *Search Engine Optimization* (SEO), penguatan integrasi konten multiplatform, serta pengembangan ekosistem digital melalui *RRI News App* dan integrasi konten ke *Google News*. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah, komunitas, dan media mitra akan terus diperluas untuk meningkatkan distribusi informasi dan kepercayaan publik terhadap LPP RRI sebagai sumber berita yang akurat, berimbang, dan kredibel di tengah dinamika arus informasi nasional.

5. Jumlah Kerjasama Nasional dan Internasional

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produksi dan distribusi konten, RRI secara konsisten memperluas jalinan kemitraan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, seperti media massa nasional dan internasional, asosiasi penyiaran, serta

stakeholder relevan lainnya. Sinergi ini bertujuan untuk memperkaya perspektif konten, meningkatkan pertukaran informasi dan teknologi, serta memperluas distribusi siaran RRI baik di tingkat nasional, regional maupun dunia.

Dalam periode 2025–2029, jumlah kerja sama strategis yang terjalin menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan kerjasama yang dilakukan RRI ditarget mengalami peningkatan jumlah kerjasama sebanyak 8 kerja sama baru pada tahun 2025, 10 di tahun 2026, 10 di tahun 2027, 12 di tahun 2028 dan 12 di tahun 2029, sehingga mendapatkan pertumbuhan kerjasama sebanyak 52 kerjasama baru selama 5 tahun ke depan. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen RRI dalam memperkuat posisi sebagai media penyiaran publik yang terbuka terhadap kolaborasi, serta berperan aktif dalam membangun ekosistem media yang lebih inklusif, adaptif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

SP 2. Meningkatnya Relevansi Program Siaran dengan Prioritas Nasional

RRI memastikan bahwa seluruh program siaran tidak hanya mengedukasi dan menghibur, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam mendukung capaian Program Prioritas Nasional. RRI hadir sebagai simpul informasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dan arah kebijakan negara, dengan memperkuat konten yang mencerminkan semangat kebhinekaan, mendorong pembangunan inklusif, serta memperkuat karakter bangsa melalui siaran yang inspiratif dan membumi. Seluruh inisiatif ini diarahkan untuk menggapai *joint outcome* antara RRI dan Pemerintah dalam menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat.

1. Persentase Konten Digital yang Relevan dengan Prioritas Presiden

RRI memandang persentase konten digital yang relevan dengan prioritas nasional sebagai indikator kunci untuk memastikan setiap program siaran mendukung arah pembangunan nasional. Indikator ini didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan atas format siaran prioritas nasional yang telah ditentukan, dengan mengukur keragaman format dan topik/tema konten yang sejalan dengan fokus prioritas pembangunan nasional.

Target persentase konten digital yang relevan dengan prioritas nasional dirancang meningkat secara bertahap, yaitu dari 70% pada 2025 hingga diharapkan mencapai 100% pada 2029. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan RRI untuk memperluas dan memperkuat keragaman format dan topik konten digital agar sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan nasional. Melalui target ini, RRI diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada isu-isu strategis nasional, sehingga konten yang dihadirkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan multiplatform, integrasi konten lokal dan nasional, serta pemanfaatan data audiens, RRI berupaya memastikan bahwa setiap produksi kontennya relevan, berimbang, dan mendukung penguatan kesadaran kolektif terhadap agenda pembangunan nasional.

2. Persentase Program Prioritas Presiden yang Ditunjang Program Prioritas Siaran

RRI menargetkan peningkatan signifikan dalam proporsi siaran yang secara langsung mendukung Program Prioritas Presiden. Berdasarkan monitoring dan evaluasi internal, 70% dari total layanan siaran LPP RRI merupakan konten yang berhubungan dengan tema prioritas nasional.

Pada tahun 2025, menargetkan persentase maksimal, yaitu di angka 100% hingga tahun 2029. Konsistensi capaian ini mencerminkan komitmen kuat LPP RRI untuk senantiasa menyesuaikan konten siarannya dengan kebijakan nasional dan memperkuat perannya sebagai media publik yang proaktif mendukung pembangunan negara.

SP 3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penyiaran

RRI menempatkan penyediaan dan penguatan infrastruktur penyiaran sebagai salah satu pilar strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Sejalan dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LPP RRI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

1. Nilai Keamanan Sistem Aplikasi LPP RRI

Indikator Nilai Keamanan Sistem Aplikasi RRI merefleksikan tingkat ketahanan dan perlindungan digital pada seluruh platform aplikasi yang digunakan oleh RRI. Dengan skala penilaian maksimum 5 berdasarkan standar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), LPP RRI menargetkan peningkatan nilai dari 3 pada tahun 2025 menjadi 3,65 pada tahun 2029. Hal ini mencerminkan langkah bertahap dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem keamanan siber sebagai bagian integral dari transformasi digital lembaga.

Upaya peningkatan ini mencakup audit keamanan berkala, implementasi teknologi enkripsi data terkini, penguatan sistem autentikasi pengguna, serta pelatihan keamanan siber bagi SDM terkait. Penguatan infrastruktur digital yang aman menjadi landasan penting bagi LPP RRI dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi data pengguna, dan memastikan kelancaran operasional multiplatform di tengah ancaman siber yang semakin kompleks. Penguatan infrastruktur digital yang aman menjadi landasan penting bagi RRI dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi data pengguna, dan memastikan kelancaran operasional multiplatform di tengah ancaman siber yang semakin kompleks.

2. Persentase Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Penyiaran

Indikator Persentase Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Penyiaran mengukur sejauh mana efektivitas dan responsivitas RRI dalam menjaga kondisi optimal perangkat siaran yang dimilikinya. Dengan rumus perhitungan jumlah peralatan yang berhasil diperbaiki dibandingkan jumlah total peralatan yang rusak, indikator ini bertujuan memastikan keandalan teknis dalam mendukung kelangsungan layanan siaran publik.

Pada tahun 2025, angka *baseline* ditetapkan sebesar 80%, dan secara bertahap ditargetkan meningkat hingga 95% pada 2029. Peningkatan ini akan dicapai melalui strategi sistematis seperti digitalisasi pencatatan kerusakan, penguatan kapasitas teknisi internal, kolaborasi dengan vendor terpercaya, serta alokasi anggaran berkelanjutan untuk pemeliharaan. Dengan optimalisasi infrastruktur, LPP RRI berkomitmen untuk menjaga kontinuitas siaran berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

3. Persentase Kabupaten/Kota *Blank Spot* Siaran Teresterial LPP RRI

Indikator Persentase Wilayah *Blank Spot* Siaran RRI mengukur tingkat pengurangan area administratif di Indonesia (kabupaten, kecamatan, dan desa) yang belum terjangkau oleh siaran LPP RRI, baik melalui frekuensi analog, siaran digital, maupun platform daring. Target penurunan pada tahun 2025 yaitu menjadi 30%, dan hingga tahun 2029 diharapkan

persentase wilayah *blank spot* ini dapat menunjukkan kurva penurunan hingga tersisa 20%. Melalui program modernisasi infrastruktur siaran, migrasi ke digital *broadcasting*, dan penguatan siaran berbasis internet (*streaming*), LPP RRI secara konsisten menutup celah keterjangkauan informasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya ini turut melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan komunikasi untuk mendukung konektivitas. Dengan demikian, LPP RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang menjamin hak masyarakat atas informasi di seluruh penjuru negeri.

SP 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Promosi Program Siaran yang Selaras dengan Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik serta promosi program siaran yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, RRI mengimplementasikan strategi berbasis peningkatan transparansi tata kelola, citra kelembagaan, dan efektivitas penerimaan anggaran. Pertama, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan relevan sesuai prinsip keterbukaan badan publik.

Kedua, penguatan *brand image* RRI sebagai media penyiaran publik yang informatif, inspiratif, dan mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan terus diupayakan lewat kampanye komunikasi terpadu, pelibatan komunitas, serta konsistensi kualitas konten siaran. Ketiga, peningkatan kinerja layanan turut didukung melalui optimalisasi penerimaan PNPB baik fungsional maupun umum, sebagai wujud akuntabilitas tata kelola anggaran dan responsivitas terhadap kebutuhan layanan publik.

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencerminkan komitmen RRI dalam menjamin hak publik atas informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. LPP RRI telah berhasil mempertahankan status sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan evaluasi Komisi Informasi Pusat selama periode 2022–2024. Untuk menjaga capaian tersebut, LPP RRI menargetkan peningkatan skor bertahap hingga mencapai 98,8 pada tahun 2029.

Langkah strategis untuk mencapai target tersebut mencakup penguatan fungsi dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh satuan kerja, pemutakhiran rutin portal keterbukaan informasi, serta sosialisasi hak masyarakat dalam mengakses informasi publik.

2. Indeks *Brand Image*

Indeks *Brand Image* mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kredibilitas, relevansi, dan kualitas layanan siaran RRI. Berdasarkan hasil survei internal, pada tahun 2025 RRI memperoleh indeks dengan nilai “4”. RRI menargetkan peningkatan indeks ini secara bertahap hingga mencapai “4,4” pada tahun 2029, sebagai bukti penguatan citra positif di mata publik.

Untuk mencapai target tersebut, RRI mengimplementasikan strategi kampanye *rebranding* yang menyeluruh melalui berbagai platform digital, termasuk RRI Digital dan situs resmi rri.co.id. Penyegaran identitas visual turut dilakukan untuk memberikan kesan yang lebih *modern* dan dinamis. Selain itu, peningkatan keterlibatan audiens melalui interaksi aktif di kanal digital serta kolaborasi dengan *brand* nasional dan komunitas kreatif menjadi fokus utama guna memperkuat posisi RRI sebagai media yang inklusif, progresif, dan relevan di era digital.

3. Penerimaan PNBP Fungsional

Pada tahun 2025 RRI menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp 26 milyar dengan proyeksi peningkatan secara bertahap setiap tahun hingga mencapai Rp 37 milyar pada tahun 2029. Peningkatan penerimaan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan program siaran RRI. Strategi yang diterapkan meliputi optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan efisiensi layanan komersial, pengembangan produk dan layanan baru yang bernilai tambah, serta perbaikan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memperkuat kemandirian finansial RRI dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik.

Tabel 4.4 Program Dukungan Manajemen - LPP RRI Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan LPP RRI yang Responsif, Efektif, Efisien, Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas serta Akuntabel dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	Skor Hasil Evaluasi Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penerapan Sistem Kerja	P-5	P-5	P-5	P-5	P-5	Nilai
	Penambahan Jumlah Satuan Kerja yang Berpredikat ZI WBK/WBBM	5	5	5	5	5	Satker
	Tingkat Maturitas SPIP LPP RRI	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Nilai
	Indeks Sistem Merit	290	305	320	335	350	Nilai
	Indeks BerAKHLAK	75	77	79	81	83	%
	Survei Penilaian Integritas LPP RRI	65	75	80	85	85	Nilai
	Indeks Pengelolaan Aset	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	Nilai
	Indeks Reformasi Hukum	98,72	98,75	98,75	98,7	99	Nilai
	Tingkat Digitalisasi Arsip	72	75	77	79	81	Nilai
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	72	75	78	81	84	Nilai
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Lembaga	Nilai IKPA	95	95	95	96	96	Nilai

	Indeks Maturitas Manajemen Risiko	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	Nilai
	Nilai Kinerja Anggaran	95	95	95	96	96	Nilai
	Nila Indeks Perencanaan Pembangunan	95	95	96	96	97	Nilai
	Nila Evaluasi Kinerja Pendukung PN	100	100	100	100	100	Nilai
	Nilai AKIP	70	72	73	74	75	Nilai
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Predikat
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Indeks

SP 5. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan LPP RRI yang Responsif, Efektif, Efisien, Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas serta Akuntabel dalam Penerapan Reformasi Birokrasi

Sebagai upaya mewujudkan kelembagaan yang *modern* dan unggul, RRI secara konsisten mendorong penguatan struktur dan sistem kerja melalui penerapan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh. Capaian tersebut diukur melalui berbagai indikator strategis. Pertama, Skor Hasil Evaluasi Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penerapan Sistem Kerja ditingkatkan untuk memastikan organisasi menjadi lebih ramping, lincah, dan berorientasi hasil. Kedua, Jumlah Satuan Kerja yang Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus diperluas sebagai cerminan budaya integritas yang melembaga. Ketiga, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) diperkuat untuk memastikan tata kelola yang handal dan minim risiko. Keempat, Indeks Sistem Merit ditingkatkan agar manajemen SDM berbasis kinerja, objektivitas, dan profesionalisme berjalan optimal. Selanjutnya, Indeks BerAKHLAK sebagai tolok ukur nilai-nilai ASN diperkuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang humanis dan melayani. Survei Penilaian Integritas (SPI) dilaksanakan untuk menangkap persepsi publik dan internal terkait integritas lembaga. Selain itu, Indeks Pengelolaan Aset dijaga pada tingkat optimal guna memastikan efisiensi dan pemanfaatan aset negara secara akuntabel. RRI juga mendorong peningkatan Indeks Reformasi Hukum untuk memastikan keselarasan regulasi internal dengan kebijakan nasional.

Tingkat Digitalisasi Arsip diperluas agar pengelolaan dokumen lembaga lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Terakhir, Indeks Tata Kelola Pengadaan terus diperkuat agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan, akuntabel, dan kompetitif. Dengan pemantauan dan peningkatan terhadap seluruh indikator ini, RRI menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif terhadap perubahan, berintegritas tinggi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Skor Hasil Evaluasi Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penerapan Sistem Kerja

Indikator ini mengukur efektivitas dan keberhasilan RRI dalam melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi serta penerapan sistem kerja baru yang lebih efisien dan adaptif. Dengan target skor P-5 secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2029, RRI menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas dan konsistensi proses restrukturisasi serta perbaikan tata kelola organisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Direktorat terkait, yang memastikan bahwa setiap perubahan struktur dan sistem kerja berjalan sesuai rencana, mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja lembaga secara menyeluruh.

2. Jumlah Satuan Kerja yang Berpredikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

RRI secara konsisten menetapkan target minimal 5 satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas (ZI) dengan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setiap tahunnya. Predikat ini menunjukkan komitmen RRI dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui upaya peningkatan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan pembinaan budaya kerja yang bersih, RRI memastikan bahwa satuan kerja yang memperoleh predikat tersebut dapat menjadi contoh terbaik dalam integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Evaluasi dan pembinaan terus dilakukan oleh Direktorat guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas birokrasi di seluruh satuan kerja RRI.

3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) LPP RRI

RRI menargetkan peningkatan bertahap pada tingkat maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dari skor 3,3 pada tahun 2025 menjadi 3,7 pada tahun 2029. Maturitas SPIP yang semakin tinggi mencerminkan peningkatan efektivitas pengendalian internal di seluruh aspek operasional dan manajerial RRI.

Dengan fokus pada penguatan pengendalian risiko, peningkatan mekanisme pengawasan, serta pembinaan budaya kepatuhan dan transparansi, RRI berkomitmen untuk mengoptimalkan tata kelola dan akuntabilitas lembaga. Peningkatan ini akan mendukung RRI dalam mencapai kinerja yang lebih baik, mencegah potensi penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan sumber daya lembaga. Evaluasi rutin dan pelaporan berkala menjadi bagian penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan maturitas SPIP secara berkelanjutan.

4. Indeks Sistem Merit

RRI menetapkan target peningkatan Indeks Sistem Merit secara konsisten dari angka 290 pada tahun 2025 menjadi 350 pada tahun 2029. Sistem Merit merupakan kerangka kerja utama yang menjamin penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga penilaian kinerja pegawai. Dengan peningkatan indeks ini, LPP RRI berupaya membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas tinggi, memastikan setiap pegawai diperlakukan adil dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kompetensi dan prestasi. Implementasi sistem

merit yang semakin matang akan mendukung efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik serta meningkatkan motivasi dan produktivitas sumber daya manusia di seluruh satuan kerja. Evaluasi dan pembaruan berkala terhadap kebijakan dan praktik sistem merit menjadi kunci keberhasilan pencapaian target ini.

5. Indeks BerAKHLAK

RRI berkomitmen untuk terus meningkatkan Indeks BerAKHLAK yang mencerminkan nilai-nilai utama organisasi, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Pada tahun 2025, indeks ini tercatat sebesar 75% dan ditargetkan naik secara bertahap hingga mencapai 83% pada tahun 2029. Peningkatan indeks ini menunjukkan perbaikan kualitas budaya kerja dan etika profesi yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan layanan publik. Melalui berbagai program pelatihan, penguatan komunikasi internal, serta penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten, RRI berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya ini sekaligus mendorong terciptanya integritas tinggi serta kolaborasi efektif di seluruh unit kerja demi mewujudkan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan profesional.

6. Survei Penilaian Integritas (SPI) LPP RRI

Sebagai lembaga penyiaran publik yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, LPP RRI berupaya memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi. Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), LPP RRI menargetkan peningkatan skor dari 65 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2029. SPI ini mencerminkan persepsi internal dan eksternal terhadap upaya pencegahan korupsi, transparansi proses kerja, serta komitmen etika dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Untuk mencapai target tersebut, RRI melaksanakan berbagai strategi seperti optimalisasi sistem pengendalian *intern*, edukasi antikorupsi, penguatan fungsi pengawasan, serta pelibatan aktif pegawai dalam pengawasan partisipatif. Survei ini tidak hanya menjadi alat ukur, namun juga pendorong utama bagi transformasi tata kelola LPP RRI yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai BerAKHLAK yang diinternalisasikan secara berkelanjutan.

7. Indeks Pengelolaan Aset LPP RRI

RRI berkomitmen meningkatkan tata kelola aset secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan manajemen keuangan negara. Indeks Pengelolaan Aset LPP RRI ditargetkan naik dari 3,55 pada tahun 2025 menjadi 3,75 pada tahun 2029, dengan skala maksimal 5.

Upaya perbaikan dilakukan melalui digitalisasi manajemen aset, audit dan inventarisasi rutin, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset tetap, bergerak, dan tak berwujud. Selain itu, LPP RRI terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan valid, dimanfaatkan secara optimal, dan dilindungi secara hukum. Capaian indeks ini menjadi indikator penting dalam mendukung efisiensi operasional, akuntabilitas publik, serta kesinambungan pelayanan siaran di seluruh satuan kerja LPP RRI.

8. Indeks Reformasi Hukum LPP RRI

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang berlandaskan hukum serta responsif terhadap dinamika regulasi nasional. Indeks Reformasi Hukum RRI ditargetkan meningkat secara konsisten dari 98,72 pada tahun 2025 menjadi 99 pada tahun 2029, mendekati skor sempurna dalam penilaian reformasi hukum. Capaian ini dicapai melalui sejumlah strategi, antara lain penyelarasan regulasi internal dengan peraturan perundang-undangan terbaru, penguatan peran unit hukum di seluruh satuan kerja, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar layanan publik dan prinsip *good governance*.

LPP RRI juga aktif melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen hukum, sistem pengawasan, serta pembinaan hukum kepada seluruh pegawai. Reformasi hukum yang berkelanjutan menjadi landasan penting dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas lembaga, dan perlindungan terhadap hak-hak publik dalam akses informasi.

9. Tingkat Digitalisasi Arsip

Sebagai bagian dari transformasi digital kelembagaan, RRI secara bertahap meningkatkan tingkat digitalisasi arsip dari 72% pada tahun 2025 menjadi 81% pada tahun 2029. Digitalisasi arsip ini mencakup dokumen administrasi kelembagaan, rekaman siaran, naskah program, serta arsip-arsip kelembagaan.

Langkah strategis yang dilakukan mencakup pengembangan sistem pengelolaan arsip digital terintegrasi, penguatan kapasitas SDM arsiparis, serta investasi pada infrastruktur penyimpanan berbasis *cloud* dan server internal yang aman. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin keterjagaan memori kelembagaan, mempercepat akses dan pencarian arsip, serta memperkuat tata kelola informasi berbasis digital. Dengan percepatan digitalisasi, RRI tidak hanya menjaga warisan dokumenter, tetapi juga memperkuat kapabilitasnya sebagai lembaga penyiaran publik yang *modern* dan sebagai mitra dalam pengembangan Satu Data dan Informasi Nasional.

10. Indeks Tata Kelola Pengadaan LPP RRI

RRI memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan, dari skor 72 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan komitmen RRI terhadap prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam seluruh proses pengadaan.

Strategi yang diterapkan meliputi digitalisasi sistem pengadaan melalui *e-procurement*, peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan, serta penguatan fungsi pengawasan dan audit internal. Selain itu, LPP RRI juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas dalam pengadaan, termasuk mendorong keterlibatan pelaku UMKM dan penyedia lokal. Dengan pengelolaan pengadaan yang lebih profesional dan akuntabel, RRI memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dapat memberikan nilai manfaat maksimal dan mendukung pencapaian program siaran serta transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

SP 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Lembaga

RRI berkomitmen memantapkan tata kelola keuangan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil melalui peningkatan berbagai indikator kinerja utama. Pertama, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dioptimalkan dengan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Kedua, Indeks Maturitas Manajemen Risiko ditingkatkan melalui integrasi

manajemen risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ketiga, Nilai Kinerja Anggaran dijaga pada level optimal sebagai cerminan efisiensi penggunaan sumber daya. Keempat, Indeks Perencanaan Pembangunan diperkuat melalui sinkronisasi rencana kerja dengan arah kebijakan nasional dan pengukuran capaian berbasis *output-outcome*.

RRI juga berupaya meningkatkan Evaluasi Kinerja Pendukung Program Nasional (PN) dengan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan pembangunan nasional. Keenam, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi berlandaskan prinsip kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diupayakan untuk terus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti tertinggi atas pengelolaan keuangan yang andal dan kredibel. Melalui penguatan tujuh indikator ini, LPP RRI berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas dan mendukung pencapaian visi lembaga sebagai penyiaran publik terpercaya.

1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, RRI menargetkan pencapaian nilai IKPA sebesar minimal 95 secara konsisten sejak tahun 2025 hingga 2027, dan meningkat menjadi 96 pada tahun 2028 dan 2029. Nilai IKPA merupakan indikator komprehensif yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran instansi pemerintah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran.

Capaian ini mencerminkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh LPP RRI, termasuk ketepatan waktu penyerapan anggaran, kesesuaian belanja dengan *output*, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan skor IKPA, RRI menguatkan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, meningkatkan kapasitas SDM keuangan, serta memperluas pemanfaatan aplikasi digital keuangan. Dengan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel, RRI menunjukkan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab dalam mengelola dana negara guna mendukung pelayanan informasi dan siaran berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2) Indeks Maturitas Manajemen Risiko

RRI menargetkan peningkatan Indeks Maturitas Manajemen Risiko dari 3,3 pada 2025 menjadi 3,5 pada 2029 sebagai upaya memperkuat penerapan manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis ISO 31000 dan regulasi BPKP, RRI membangun sistem pelaporan risiko terpadu, membentuk unit pengelola risiko, dan menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pegawai. Manajemen risiko yang efektif ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan organisasi dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik nasional.

3) Nilai Kinerja Anggaran

RRI menargetkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 95 pada 2025 dan meningkat menjadi 96 pada 2028–2029. Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Pencapaian ini didorong oleh penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi, serta peningkatan

kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan. Dengan mempertahankan NKA pada level sangat baik, RRI menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran negara dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program strategis dan memberikan layanan siaran publik yang berkualitas serta berdampak nyata bagi masyarakat.

4) Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan

RRI menargetkan Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan sebesar 95 pada tahun 2025 dan 2026, yang kemudian meningkat secara bertahap menjadi 97 pada tahun 2029. Indeks ini mengukur kualitas proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh satuan kerja, mencakup keselarasan antara rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan penganggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi perencanaan nasional. Pencapaian target ini mencerminkan konsistensi dan integrasi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, yang diperkuat melalui penggunaan sistem *e-Planning* dan pendekatan berbasis hasil (*result-based planning*). Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan memastikan bahwa program-program RRI relevan dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

5) Nilai Evaluasi Kinerja Pendukung Prioritas Nasional (PN)

RRI berkomitmen mewujudkan Nilai Evaluasi Kinerja Pendukung Prioritas Nasional (PN) sebesar 100 secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2029. Nilai ini merupakan indikator yang menilai seberapa optimal kontribusi program, kegiatan, dan anggaran LPP RRI dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Nilai 100 menunjukkan bahwa seluruh komponen program RRI telah dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara tepat sasaran sesuai dengan peta jalan pembangunan nasional. Capaian ini dimungkinkan melalui sinkronisasi perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU). Komitmen ini mempertegas peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya fokus pada pelayanan informasi dan edukasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis negara.

6) Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

RRI menargetkan peningkatan nilai AKIP secara bertahap dari angka 70 pada tahun 2025 menjadi 75 pada tahun 2029. Nilai AKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga dalam mengelola seluruh aspek tata kelola, pelaksanaan program, serta pencapaian hasil yang transparan dan bertanggung jawab sesuai standar pemerintah. Peningkatan nilai AKIP ini diupayakan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor dan melaporkan capaian kinerja secara *real-time* dan akurat. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan anggaran RRI berjalan efektif, efisien, dan berdampak positif bagi publik.

7) Opini BPK terkait Laporan Keuangan LPP RRI

RRI berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, mulai dari tahun 2025 hingga 2029. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan RRI telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta bebas dari kesalahan material. Pencapaian opini WTP secara konsisten memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme RRI dalam mengelola dana negara. Hal ini juga mencerminkan efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku, sekaligus mendukung kinerja RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang akuntabel dan transparan.

8) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel, RRI menetapkan peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai salah satu indikator sasaran strategis dalam periode 2025–2029. Pada tahun 2024, RRI memperoleh skor 2,964 dan menargetkan peningkatan bertahap hingga mencapai skor 3 pada tahun 2025 dan 3,4 pada tahun 2029. Indeks ini merupakan bagian dari Penilaian Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan skor maksimum 5. Indeks ini mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian internal LPP RRI efektif dalam mencegah dan mengendalikan risiko korupsi di lingkungan organisasi. Untuk mencapai target tersebut, RRI akan memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta meningkatkan kesadaran dan integritas pegawai melalui pelatihan anti-korupsi dan pelaporan yang transparan.

4.2.2. Sasaran Kegiatan Penyiaran Publik

K 1. Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru

RRI menempatkan pengembangan infrastruktur penyiaran dan teknologi media baru sebagai prioritas strategis. Fokus utama diarahkan pada penyediaan dan pemutakhiran kebijakan serta sistem pendukung untuk memastikan kualitas siaran yang andal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Infrastruktur Siaran Terestrial dan Siaran Digital, serta dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar tata kelola digital yang terpadu dan efisien.

Pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama, yang tercermin dari Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pemancar, Studio, dan Peralatan Jaringan dan IT, termasuk tersusunnya Laporan *Monitoring* Kondisi Peralatan Teknik Pendukung Siaran serta Laporan *Monitoring* Jaringan. Aspek pengadaan juga diperkuat melalui peningkatan jumlah Pemancar Baru, Peralatan Infrastruktur Penyiaran, Lisensi dan Pengembangan *Software* dan Aplikasi, serta *User Aplikasi Coverage Area Prediction* untuk meningkatkan akurasi jangkauan siaran.

Dari sisi legalitas dan keandalan penyiaran, RRI mendorong peningkatan Jumlah Kepemilikan Izin Siar Aktif dan memastikan Persentase Performa Pemancar berada dalam kondisi optimal. Seluruh langkah ini ditujukan untuk menjawab tantangan konvergensi media, memperluas jangkauan layanan siaran berbasis teknologi, dan mewujudkan transformasi digital yang terstruktur, terukur, dan

berkelanjutan dalam mendukung peran strategis RRI sebagai media publik terpercaya di era *modern*.

Tabel 4.4 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru							
Tersedianya Infrastruktur Penyiaran Radio dan Pengembangan Teknologi Media Baru	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Infrastruktur Siaran Terestrial	46	60	70	80	90	%
	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Infrastruktur Siaran Digital	36	63	72	81	90	%
	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses SPBE	63	63	72	81	90	%
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pemancar	25	40	55	70	85	Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Studio	5	15	24	32	45	Kegiatan
	Laporan <i>Monitoring</i> Kondisi Peralatan Teknik Pendukung Siaran	4	4	4	4	4	Dokumen
	Laporan <i>Monitoring</i> Jaringan	4	4	4	4	4	Dokumen
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jaringan dan IT	6	12	15	18	22	Kegiatan
	Jumlah Pengadaan Pemancar	9	20	31	42	53	Unit
	Jumlah Lisensi dan Pengembangan <i>Software</i> dan Aplikasi	12	15	16	16	16	Software
	Jumlah Pengadaan Peralatan Infrastruktur Penyiaran	40	49	75	85	93	Unit
	Pertumbuhan Jumlah Kepemilikan Izin Siar Aktif	560	580	611	653	703	Izin Siar
	Jumlah Pengadaan <i>User Aplikasi Coverage Area Prediction</i>	1	2	2	-	-	Software
	Jumlah Layanan Internet Data Center di Kantor Pusat	10	15	20	25	30	Mbps

Terselenggaranya Optimalisasi Performa Layanan Siaran Satuan Kerja	Persentase Performa Pemancar	75	77	79	82	85	%
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Teknik	276	276	276	276	276	Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Antena	134	134	134	134	134	Kegiatan

K 2. Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik

Sebagai upaya untuk memperkuat peran RRI sebagai radio publik yang responsif terhadap dinamika publik bermedia dan selaras dengan perkembangan teknologi, pengembangan program dan produksi siaran menjadi fokus strategis lembaga. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dan peningkatan Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Penyiaran Terestrial dan Digital yang menjadi fondasi operasional penyiaran berbasis regulasi *modern* dan adaptif.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan konten yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan publik serta arah pembangunan nasional. Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan, RRI secara berkala menyusun Laporan *Monitoring Implementasi Kebijakan* di seluruh Satuan Kerja (Satker), yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan program penyiaran di seluruh wilayah.

Tabel 4.5 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik							
Terselenggaranya Pengembangan Program Produksi Penyiaran Radio	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Penyiaran Terestrial yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	%
	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Penyiaran Digital yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	%
	Jumlah Laporan <i>Monitoring Implementasi Kebijakan</i> di Seluruh Satker	4	4	4	4	4	Laporan
	Jumlah Kegiatan Kerjasama Penyiaran Strategis yang Melibatkan Mitra Kerjasama dan Mitra Potensial	20	25	30	35	40	Kegiatan

K 3. Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha

RRI memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif melalui penyelenggaraan layanan dan pengembangan usaha berbasis tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik. Sasaran kegiatan ini didukung oleh penyusunan dan penerapan Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Komunikasi Publik, Layanan Usaha, dan Pengembangan Usaha secara bertahap, yang dijadikan acuan dalam mengembangkan layanan komunikasi publik yang inklusif serta layanan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Guna memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, RRI juga menyusun Laporan *Monitoring* Implementasi Kebijakan di seluruh Satker sebagai bagian dari mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks layanan usaha, jumlah kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan sebagai sumber penguatan kemandirian dan daya dukung lembaga. Upaya ini diiringi dengan peningkatan transparansi informasi publik, yang ditargetkan mencapai Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 98,8% pada tahun 2029. Selain itu, penguatan citra lembaga juga menjadi prioritas melalui strategi komunikasi yang masif dan konsisten, dengan target Indeks Preferensi Publik terhadap *Brand Image* RRI mencapai skor 4,4 dalam Skala Likert pada tahun yang sama. Dengan demikian, RRI diharapkan tidak hanya menjadi lembaga penyiaran yang terpercaya, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui layanan dan pengembangan usaha yang inovatif.

Tabel 4.7 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI 2025-2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha							
Terselenggaranya Layanan dan Pengembangan Usaha (Sasaran Kegiatan)	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Komunikasi Publik	100	100	100	100	100	%
	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Layanan Usaha	100	100	100	100	100	%
	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Pengembangan Usaha	100	100	100	100	100	%
	Jumlah Laporan <i>Monitoring</i> Implementasi Kebijakan di Seluruh Satker	4	4	4	4	4	Laporan
	Jumlah Kegiatan Layanan Usaha	2	3	4	5	5	Kegiatan
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	Nilai
	Indeks <i>Brand Image</i>	4	4,1	4,2	4,3	4,4	Indeks

K 4. Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional yang Berkualitas

Sebagai media diplomasi budaya dan bangsa, RRI terus memperkuat layanan siaran internasional yang strategis dan relevan melalui layanan Stasiun Siaran Luar Negeri *Voice of Indonesia*. Penyelenggaraan layanan ini diarahkan untuk mendukung diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*) dengan menekankan enam tema utama yang selaras dengan prioritas nasional, seperti kebudayaan, ekonomi kreatif, pariwisata, demokrasi, kebencanaan, serta kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Target produksi siaran pada periode 2025– 2029 mencapai 253 item konten tematik setiap tahun yang secara khusus dirancang untuk menjangkau khalayak global dan mempromosikan narasi positif tentang Indonesia.

Selain produksi konten tematik, LPP RRI juga menjaga konsistensi dalam siaran berbahasa Inggris secara langsung (live broadcast) yang ditetapkan sebanyak 4380 jam siar setiap tahun sebagai bagian dari upaya memberikan informasi terpercaya dan aktual mengenai Indonesia kepada audiens internasional. Tidak hanya itu, untuk memperluas jangkauan komunikasi antarbangsa, LPP RRI VoI secara rutin memproduksi 2080 paket siaran dalam 9 bahasa internasional setiap tahun, yang meliputi bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jepang, Perancis, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Melayu. Dengan pendekatan multibahasa dan multiperspektif ini, *Voice of Indonesia* terus memperkuat perannya sebagai kanal komunikasi strategis yang merepresentasikan wajah Indonesia yang inklusif, demokratis, dan inspiratif di kancah dunia.

Sebagai wajah internasional RRI, *Voice of Indonesia* (VOI) terus memperkuat strategi komunikasi merek guna meningkatkan visibilitas dan daya saing di ranah global. Upaya ini tercermin dalam peningkatan Indeks *Brand Image* yang menjadi indikator utama keberhasilan komunikasi lembaga kepada audiens internasional. Guna mendukung pencapaian tersebut, VOI secara aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, media asing, dan mitra internasional lainnya, untuk memperluas dukungan program dan jangkauan siaran.

Selain itu, kegiatan promosi program secara masif, inovatif, dan berkelanjutan juga ditingkatkan melalui berbagai kanal digital, partisipasi dalam forum internasional, serta kampanye diplomasi budaya dan informasi. Seluruh langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi VOI sebagai media penyiaran publik Indonesia yang mampu membawa pesan-pesan nasional ke pentas global secara efektif dan inspiratif.

Tabel 4.6 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional LPP RRI Tahun 2025 - 2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional							
Terselenggaranya Layanan Siaran Internasional	Jumlah Produksi Siaran untuk Mendukung <i>Second Track Diplomacy</i> dengan Fokus pada 6 Tema Mengacu Prioritas Nasional	220	220	231	242	253	Paket Siaran
	Jumlah Jam Siaran Bahasa Inggris <i>Live</i> sesuai dengan Prioritas Nasional	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	Jam Siar
	Jumlah Paket Siaran 9 Bahasa Internasional Mengacu pada Prioritas Nasional	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	Paket Siaran
	Indeks Kualitas Konten Produksi Siaran	75	80	82.5	85	88.5	Nilai
	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	80	80	83	86	90	Nilai
	Persentase Konten yang Didistribusikan secara Digital	100	100	100	100	100	%
	Jumlah Produksi Berita	1440	5760	5760	5760	5760	Berita

K 5. Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional yang Berkualitas

Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan publik di tingkat lokal dan regional, LPP RRI berkomitmen mengoptimalkan kapasitas dan kualitas stasiun siaran lokal guna mendukung pemerataan informasi, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian program prioritas nasional. Seluruh konten siaran ditargetkan 100% mendukung program prioritas Presiden, dengan melibatkan sebanyak 36.135 kelompok masyarakat secara konsisten setiap tahun hingga 2029. Produksi berita ditetapkan sebesar 96.480 berita per tahun, dengan penguatan mutu melalui peningkatan Indeks Kualitas Paket Produksi Konten Siaran dari nilai 75 pada 2025 menjadi 88,5 pada 2029. Selain itu, seluruh produk siaran dipastikan didistribusikan secara digital (100%) untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama segmen milenial dan digital *native*.

LPP RRI juga mendorong pengembangan program siaran unggulan lokal dengan peningkatan kualitas, ditargetkan melalui Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan dari 80 pada 2025 menjadi 90 pada 2029. Penguatan ini diperkuat dengan strategi komunikasi merek, termasuk pelaksanaan 24.455 kegiatan promosi per tahun yang didukung peningkatan Indeks Kualitas Promosi dari 80 pada 2025 menjadi 90 pada 2029.

Dalam aspek kemitraan, LPP RRI mempertahankan 3.216 kerjasama strategis dengan stakeholder setiap tahun hingga 2029. Kerjasama ini mencakup kolaborasi dengan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, hingga lembaga internasional untuk memperkuat dukungan terhadap keberhasilan program siaran. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat citra LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang kredibel, modern, relevan, serta dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung peran LPP RRI dalam memperkuat kohesi sosial dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Tabel 4.9 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional LPP RRI Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional							
Terselenggaranya Penyiaran Lokal, Regional yang Berkualitas	Persentase Konten Siaran yang Menunjang Program Prioritas Presiden	100	100	100	100	100	%
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dilibatkan dalam Siaran RRI	36.135	36.135	36.135	36.135	36.135	Kelompok Masyarakat
	Jumlah Produksi Berita	96.480	96.480	96.480	96.480	96.480	Berita
	Jumlah Minimal Berita Online yang di Produksi	647.760	680.148	714.155	749.863	787.356	Berita
	Indeks Kualitas Paket Produksi Konten Siaran	75	80	82,5	85	88,5	Indeks
	Persentase Produk Siaran yang Didistribusikan secara Digital	100	100	100	100	100	%
	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	80	80	83	86	90	Indeks
	Jumlah Produksi Berita Ringan oleh Bidang LPU	34.840	34.840	34.840	34.840	34.840	Berita

K 6. Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI yang Berkualitas

Dalam rangka memperkuat fungsinya sebagai media informasi publik yang kredibel, LPP RRI menetapkan fokus strategis pada peningkatan kualitas dan jangkauan siaran pemberitaan radio dan multimedia di tingkat lokal maupun regional. Prioritas ini selaras dengan komitmen mendukung program prioritas Presiden, dengan target 100% konten siaran menunjang program prioritas nasional secara konsisten hingga 2029.

Produksi konten informatif diperkuat melalui dialog interaktif sebanyak 365 konten per tahun serta peningkatan jumlah produksi berita dari 21.900 berita pada 2025 menjadi 29.200 berita pada 2029. Mutu konten siaran ditingkatkan secara bertahap dengan target Indeks Kualitas Paket Produksi Konten naik dari nilai 75 pada 2025 menjadi 88,5 pada 2029. Selain itu, seluruh produk siaran dipastikan 100% terdistribusi secara digital, mencerminkan transformasi RRI menuju media publik yang adaptif terhadap perkembangan multiplatform. Program siaran unggulan tetap menjadi ikon di setiap satuan kerja dengan fokus pada kualitas, yang ditargetkan melalui Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan dari nilai 80 pada 2025 menjadi 87,5 pada 2029.

RRI juga menjaga konsistensi dalam membangun jaringan kolaborasi dengan 828 kerjasama stakeholder setiap tahun, mencakup kementerian, lembaga negara, swasta, komunitas, dan lembaga pendidikan. Peningkatan visibilitas dan kedekatan dengan publik diwujudkan melalui 2.484 kegiatan promosi per tahun yang mencakup kampanye media, partisipasi dalam *event* nasional maupun internasional, *branding* digital, serta promosi melalui kanal siaran internal RRI. Mutu promosi terus ditingkatkan dengan target Indeks Kualitas Promosi naik dari 80 pada 2025 menjadi 90 pada 2029. Kombinasi strategi peningkatan kualitas konten, stabilitas kemitraan, serta intensifikasi promosi diharapkan mampu memperkuat *brand communication* LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang kredibel, *modern*, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan LPP RRI dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tabel 4.7 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI Tahun 2025 - 2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia							
Terselenggaranya Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia yang Berkualitas	Persentase Konten Siaran yang Menunjang Program Prioritas Nasional	100	100	100	100	100	%
	Jumlah Produksi Dialog Interaktif	365	365	365	365	365	Konten
	Jumlah Produksi Berita Radio	21.900	23.725	25.550	27.375	29.200	Berita
	Jumlah Minimal Berita Online yang Diproduksi	11.680	12.848	14.133	15.466	17.101	Berita
	Indeks Kualitas Paket Produksi Konten Siaran	75	80	82.5	85	88.5	Nilai
	Persentase Produksi Siaran yang Didistribusikan secara Digital	100	100	100	100	100	%
	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	80	80	82.5	85	87.5	Nilai

4.2.3 Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen

Untuk memastikan pengelolaan organisasi yang efektif dan akuntabel, RRI berkomitmen meningkatkan mutu di bidang perencanaan kinerja, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan, pengelolaan risiko, dan pencegahan korupsi. Keberhasilan diukur melalui kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran, dengan target pencapaian 100% secara konsisten dari 2025 hingga 2029. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Nilai perencanaan kinerja ditargetkan stabil di angka 22 pada 2025–2027 dan meningkat menjadi 23 pada 2028–2029, seiring penguatan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Nilai pengukuran dan pelaporan kinerja juga ditargetkan meningkat, masing-masing mencapai 20 dan 13 pada 2029. Untuk mendukung pengawasan internal, evaluasi akuntabilitas kinerja ditargetkan naik dari 17 pada 2025 menjadi 19 pada 2029, mencerminkan kematangan sistem pemantauan yang mendukung integritas lembaga. Sementara itu, sistem pengendalian *intern* atas laporan keuangan ditargetkan tetap berstatus Efektif sepanjang periode lima tahun, menunjukkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan secara tepat waktu. Indikator-indikator ini mencerminkan upaya LPP RRI dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, sekaligus mendukung capaian kinerja nasional secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan di seluruh Satuan Kerja (Satker), LPP RRI menargetkan peningkatan kualitas tata kelola melalui sejumlah indikator utama. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan pada angka 95 untuk 2025–2027, dan naik menjadi 96 pada 2028–2029. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan Satker dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Indeks maturitas manajemen risiko berdasarkan evaluasi Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) ditargetkan naik bertahap: 3,3 (2025–2026), 3,4 (2027–2028), dan 3,5 pada 2029, mencerminkan penguatan budaya sadar risiko dalam proses bisnis Satker. Nilai kinerja anggaran Satker juga ditargetkan stabil di angka 95 pada 2025–2027, dan naik menjadi 96 pada 2028–2029, menandakan pelaksanaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada *value for money*. Sementara itu, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditargetkan meningkat dari 70 (2025) menjadi 75 (2029), sebagai hasil dari penguatan pengukuran kinerja berbasis hasil dan indikator yang lebih terukur. Dengan capaian ini, LPP RRI terus memperkuat kapasitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis hasil, sebagai fondasi menuju lembaga penyiaran publik yang profesional, transparan, dan terpercaya.

K 7. Pengelolaan Keuangan LPP RRI

Dalam rangka mendukung tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, RRI terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan PNPB, pelaporan, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi. Target utama dalam aspek ini adalah pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran yang konsisten pada angka 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029. Hal ini menunjukkan komitmen RRI dalam mengelola anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Nilai pengukuran dan pelaporan kinerja juga ditingkatkan secara bertahap dengan target masing-masing mencapai 20 dan 13 pada tahun 2029.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal menjadi fokus pengembangan dengan target nilai meningkat dari 17 pada 2025 menjadi 19 pada 2029 (rentang skor 1-25), menandakan penguatan sistem pengawasan internal yang mendukung transparansi dan integritas lembaga. Tingkat pengendalian *intern* atas laporan keuangan ditargetkan tetap efektif sepanjang lima tahun, menandakan sistem kontrol keuangan yang mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan secara tepat waktu. Melalui pencapaian indikator-indikator tersebut, LPP RRI berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Upaya ini sekaligus mendukung pencapaian kinerja nasional secara berkelanjutan sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional dan terpercaya.

Selain itu, indeks maturitas manajemen risiko yang didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 3.3 pada tahun 2025 dan 2026 menjadi 3.5 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan perkembangan budaya sadar risiko di setiap proses bisnis Satker, yang sangat penting untuk meminimalisasi potensi risiko dan memastikan kelancaran operasional organisasi.

Kinerja anggaran Satker juga diarahkan untuk mempertahankan nilai tinggi, yaitu 95 pada awal periode dan naik menjadi 96 pada akhir periode, sebagai indikator pelaksanaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada prinsip *value for money*. Sebagai tolok ukur keberhasilan tata kelola, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan hasil evaluasi SPI juga mengalami tren peningkatan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 75 pada tahun 2029. Peningkatan nilai AKIP ini mencerminkan upaya sistematis LPP RRI dalam memperkuat pengukuran kinerja berbasis hasil, memastikan transparansi, dan memperbaiki proses pengelolaan kinerja di seluruh Satker. Dengan capaian-capaian tersebut, LPP RRI semakin memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung visi lembaga penyiaran publik yang terpercaya.

Tabel 4.11 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Keuangan LPP RRI Tahun 2025-2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Keuangan LPP RRI							
Terselenggaranya Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Perbendaharaan, Penatausahaan PNBP, Pelaporan, Manajemen Risiko dan Anti Korupsi	Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	100	100	100	100	100	%
	Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	%
	Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	%
	Nilai Perencanaan Kinerja	22	22	22	23	23	Nilai
	Nilai Pengukuran Kinerja	19	20	20	20	20	Nilai
	Nilai Pelaporan Kinerja	12	12	13	13	13	Nilai
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17	18	18	18	19	Nilai
	Tingkat Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Satuan Kerja	Nilai IKPA Satuan Kerja	95	95	95	96	96	Nilai
	Skor Penerapan Proses Manajemen Risiko	15	17	20	22	26	%
	Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja	95	95	95	96	96	Nilai
	Nilai AKIP Berdasarkan Hasil Evaluasi SPI	70	72	73	74	75	Nilai

K 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum

LPP RRI berupaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja melalui berbagai indikator strategis yang menjadi fokus utama. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan barang milik negara (BMN), serta pengadaan barang dan jasa dipertahankan pada tingkat maksimal 100% selama periode 2025 hingga 2029. Selain itu, utilisasi BMN juga ditargetkan minimal 99% setiap tahun, sebagai upaya optimalisasi aset negara dalam mendukung operasional LPP RRI secara efisien dan efektif. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) menjadi aspek kunci dalam memperkuat tata kelola internal LPP RRI. Target nilai maturitas SPIP di tingkat satuan kerja direncanakan meningkat secara bertahap dari 3.3 pada 2025 menjadi 3.7 pada 2029.

Sementara itu, tingkat maturitas SPIP pada direktorat dan satuan kerja juga diproyeksikan naik dari 3.8 menjadi 4.2 dalam kurun waktu yang sama, menggambarkan kemajuan sistem pengendalian yang semakin matang dan mampu mengelola risiko secara lebih optimal.

Selain aspek pengendalian internal, LPP RRI juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kepuasan layanan di berbagai bidang pengelolaan sumber daya. Kepuasan layanan manajemen kepegawaian dan keprotokolan ditargetkan meningkat dari kategori “Puas” menjadi “Sangat Puas” pada akhir periode Renstra. Ini menunjukkan komitmen LPP RRI dalam memberikan layanan prima kepada pegawai dan pemangku kepentingan lain. Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan BMN juga menjadi prioritas dengan target 100% pemantauan dan penyelesaian temuan setiap tahun.

Selain itu, kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan ditingkatkan dari 95% menjadi 98%, memastikan setiap proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan pencapaian indikator- indikator tersebut, LPP RRI menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung fungsi lembaga penyiaran publik yang handal dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Tabel 4.12 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum LPP RRI Tahun 2025-2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum							
Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat dan Satuan Kerja	3,8	3,9	4	4,1	4,2	Nilai
Terselenggaranya Pengelolaan SDM melalui Penerapan Sistem Merit	Tingkat Kepuasan Pelayanan Manajemen Kepegawalan	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Nilai

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Umum LPP RRI	Persentase Pemantauan atas Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	100	100	100	100	100	%
Terselenggaranya Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan LPP RRI	Persentase Pemberian Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	%
Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan dan Persuratan LPP RRI	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kearsipan dan Persuratan	72	75	77	79	81	Nilai
Terselenggaranya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Peningkatan Kinerja UKPBJ LPP RRI	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana Pengadaan	95	95	97	97	98	%
Terselenggaranya Pelayanan Keprotokolan LPP RRI	Tingkat Kepuasan Layanan Keprotokolan sesuai dengan Pedoman Keprotokolan	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Nilai
Terselenggaranya Tata Kelola Manajemen Kinerja Satuan Kerja	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	100	100	100	100	%
	Persentase Utilisasi BMN	≥99	≥99	≥99	≥99	≥99	%
	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100	100	%
	Nilai Maturitas SPIP Satuan Kerja	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Nilai

K 9. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

RRI menempatkan pengawasan internal sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penguatan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.

Target persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan meningkat secara bertahap dari 85% pada tahun 2025 menjadi 89% pada tahun 2029. Demikian pula, tindak lanjut atas pemeriksaan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) ditargetkan naik dari 90% menjadi 94% pada periode yang sama, sebagai bentuk komitmen RRI untuk segera menindaklanjuti setiap temuan audit secara efektif.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan konsultansi yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) juga menjadi fokus penting. Persentase pencapaiannya ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2025 dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029. Sejalan dengan itu, nilai kapabilitas Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) diproyeksikan mengalami peningkatan dari 3,25 menjadi 3,29, yang menunjukkan penguatan kapasitas pengawasan dalam mengawal manajemen dan operasional lembaga.

Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan diarahkan tidak hanya untuk menutup temuan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian *intern*, akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen risiko di satuan kerja. Dengan demikian, persentase tindak lanjut rekomendasi yang berhasil meningkatkan skor Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP), nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta penerapan Manajemen Risiko ditargetkan masing-masing mencapai 90% pada 2025 dan meningkat sempurna menjadi 100% pada 2029.

Melalui target-target tersebut, RRI menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan internal, memperbaiki sistem pengendalian, serta memastikan penerapan manajemen risiko secara konsisten di seluruh satuan kerja. Langkah ini merupakan bagian integral dalam menjaga tata kelola kelembagaan yang andal, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berdaya saing.

Tabel 4.13 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal LPP RRI Tahun 2025-2029

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal							
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	85	86	87	88	89	%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pemeriksaan SPI	90	91	92	93	94	%
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi sesuai PKPT	90	95	100	100	100	%
	Nilai Kapabilitas APIP	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29	Nilai
Mendorong Perbaikan Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Skor SPIP Satuan Kerja	90	95	100	100	100	%
	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Skor AKIP Satuan Kerja	90	95	100	100	100	%
	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Penerapan Manajmen Risiko	90	95	100	100	100	%

K 10. Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan profesionalisme angkasawan dan angkasawati,RRI secara konsisten melaksanakan program pendidikan dan pelatihan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Penyiaran Radio LPP RRI. Fokus utama diarahkan pada kesesuaian penyelenggaraan pelatihan administratif dan media dengan rencana kebutuhan, dengan target pencapaian 100% sepanjang periode 2025–2029. Hal ini memastikan setiap pelatihan yang dilaksanakan benar-benar relevan dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Kualitas penyelenggaraan pelatihan juga menjadi perhatian utama. Indeks kepuasan peserta terhadap pelatihan ditargetkan berada pada angka 4,0 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 4,2 pada 2029, mencerminkan persepsi positif peserta terhadap aspek fasilitator, materi, metode, maupun sarana pendukung. Sejalan dengan itu, LPP RRI juga menetapkan target peningkatan kualitas pengajar, yang diukur melalui

indeks penilaian peserta, dengan skor 4,0 pada 2025 dan naik menjadi 4,2 pada 2029. Selain pelatihan tatap muka, penguatan kapasitas pegawai juga didorong melalui pembelajaran mandiri di satuan kerja. Indeks efektivitas pelaksanaan pembelajaran mandiri ditargetkan berada pada angka 4,0 di tahun 2025 dan meningkat menjadi 4,3 pada 2029, menggambarkan optimalisasi pemanfaatan metode belajar fleksibel berbasis kebutuhan kerja.

Sementara itu, keberhasilan program pelatihan diukur melalui kompetensi peserta. Persentase pegawai yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti pelatihan administratif dan media ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 93% pada tahun 2029. Melalui sasaran ini, RRI menegaskan bahwa pengembangan SDM bukan hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan, tetapi juga untuk menjamin kualitas hasil pembelajaran. Dengan demikian, LPP RRI dapat membangun pegawai yang kompeten, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika penyiaran publik di era digital dan multiplatform.

Tabel 4.14 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan LPP RRI Tahun 2025-2029

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan							
Meningkatnya Kompetensi Pegawai sesuai rencana Pengembangan Kompetensi SDM	Persentase Pelatihan Administratif dan Media yang Diselenggarakan Sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100	%
	Indeks Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	4	4	4,1	4,1	4,2	Nilai
	Indeks Kualitas Pengajar Pelatihan	4	4	4,1	4,1	4,2	Nilai
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri di Satuan Kerja	4	4	4,1	4,2	4,3	Nilai
	Persentase Peserta Pelatihan yang Dinyatakan Kompeten pada Pelatihan Administratif dan Media	90	90	91	92	93	%

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pada RRI berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sumber pendanaan akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas konten, memperkuat infrastruktur teknologi siaran, serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Indikasi pendanaan untuk periode 2025 - 2029 merupakan hasil dari analisis yang mendalam terhadap kebutuhan anggaran untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Alokasi dana akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikasi total kebutuhan pendanaan untuk menjalankan semua program dan kegiatan di lingkungan LPP RRI dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4.15 Rencana Kebutuhan Pendanaan Program LPP RRI 2025-2029

No	Program	Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program (dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen	949.645.314	1.197.109.269	1.251.836.946	1.290.735.270	1.330.797.162
2	Program Penyiaran Publik	120.666.517	301.258.887	357.859.326	447.769.293	534.787.398
Total Pendanaan		1.070.311.831	1.498.368.156	1.609.696.272	1.738.504.563	1.865.584.560

Tabel 4.16 Kerangka Pendanaan Program Penyiaran Publik Renstra LPP RRI 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program (dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.070.311.831	1.498.368.156	1.609.696.272	1.738.504.563	1.865.584.560
Program Penyiaran Publik		120.666.517	301.258.887	357.859.326	447.769.293	534.787.398
5141	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru	35.164.036	187.309.251	230.509.186	281.033.313	316.882.698
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	6.863.874	7.851.508	9.744.914	11.126.557	12.713.045
5143	Layanan dan Pengembangan Usaha	6.258.198	7.196.898	8.276.132	9.517.533	10.945.183
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran	3.139.642	5.827.764	5.985.550	6.144.187	6.326.990
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	62.450.317	83.564.447	92.119.154	126.500.223	171.543.252
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia	6.790.450	9.509.019	11.224.390	13.447.480	16.376.230

Tabel 4.17 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Renstra LPP RRI 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program (dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen		949.645.314	1.197.109.269	1.251.836.946	1.290.735.270	1.330.797.162
5136	Pengelolaan Keuangan LPP RRI	855.660.947	1.097.607.000	1.147.869.620	1.182.172.033	1.217.502.016
5137	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana, SDM, BMN dan Umum, Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum, Kearsipan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Keprotokolan	83.906.032	88.062.743	91.144.935	94.335.009	97.636.733
5138	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	4.058.455	5.058.454	6.058.454	7.058.454	8.058.454
5139	Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	6.019.880	6.381.072	6.763.937	7.169.774	7.599.959

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RRI 2025 – 2029 dirancang untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi disrupsi teknologi, perubahan pola konsumsi media, serta kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Dalam konteks ini, RRI diarahkan untuk menjadi simpul informasi publik yang adaptif, relevan, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memerankan peran, tugas dan fungsi Lembaga negara yang menjalankan penyiaran publik sebagaimana diamanatkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Renstra RRI menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran RRI sebagai perekat sosial dan penguat identitas kebangsaan. Melalui penyiaran konten yang menumbuhkan semangat toleransi, kebhinekaan, dan solidaritas antarwarga, RRI dapat membantu mencegah fragmentasi sosial yang dipicu oleh polarisasi informasi dan maraknya ujaran kebencian di ruang digital.

Penegasan peran ini semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan akan media yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan menghadirkan ruang dialog yang konstruktif di tengah masyarakat. Dengan konten yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, RRI diharapkan menjadi penggerak utama dalam memperkuat kohesi sosial dan kesatuan nasional.

Di sisi lain, penguatan sistem siaran dan platform digital menjadi fokus utama dalam pengembangan kualitas layanan publik yang lebih inklusif dan merata. RRI tidak hanya dituntut untuk menghadirkan informasi, tetapi juga berperan sebagai media edukasi, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat. Renstra ini memuat arah kebijakan untuk memperluas jaringan siaran hingga ke wilayah 3T, memperkuat sistem informasi berbasis satu data, dan mempercepat transformasi digital melalui integrasi konten *multiplatform* yang interaktif dan mudah diakses.

Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan nasional secara umum, tetapi juga menjadikan RRI sebagai aktor utama dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berdaya guna.

Bagi masyarakat, Renstra RRI menghadirkan visi transformasi konten yang lebih relevan, beragam, dan berbasis kebutuhan riil publik pendengarnya. Peningkatan kualitas produksi siaran, segmentasi program yang lebih tajam, serta penggunaan kanal digital secara optimal merupakan bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik, terutama dari generasi muda. Melalui penyajian konten yang informatif, inspiratif, dan partisipatif, LPP RRI tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai fasilitator ruang dialog yang memungkinkan publik untuk menyuarakan aspirasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Renstra RRI disusun untuk menyelaraskan program penyiaran dengan kebutuhan negara dan publik Indonesia yang beragam. RRI terus berupaya menjadi lembaga penyiaran publik yang relevan, informatif dan menyatukan dalam lanskap media yang berubah dan cepat. Dengan demikian, Renstra RRI 2025 – 2029 adalah fondasi strategis bagi transformasi kelembagaan menuju media publik yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan tata kelola yang transparan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi monetisasi digital yang inovatif, RRI diarahkan untuk tidak hanya menjadi media penyiaran konvensional, tetapi juga platform layanan publik yang dinamis dan mandiri. Sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta komitmen terhadap kualitas dan akuntabilitas akan

menjadi pilar utama dalam mewujudkan LPP RRI sebagai garda terdepan penyiaran publik yang relevan, berdampak dan menginspirasi dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Renstra

Dalam rangka menjamin konsistensi Rencana Strategis dan implementasi program RRI, pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Dewan Pengawas dengan Direksi, serta Perjanjian Kinerja Direktur Utama dengan Kepala Satuan Kerja. Mekanisme ini menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap level manajerial memiliki tanggung jawab yang terukur dan terarah terhadap capaian kinerja lembaga.

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berkala setiap semester, sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel. Proses pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan metode yang telah terbukti efektif pada periode sebelumnya, sebagaimana diterapkan oleh Dewan Pengawas RRI, yaitu melalui:

- 1) Kunjungan *monitoring*, dilakukan secara terjadwal ke satuan kerja di seluruh Indonesia untuk memantau capaian kinerja, kondisi fasilitas, dan efektivitas pelaksanaan program siaran serta layanan publik.
- 2) Rapat Konsultasi Dewan Pengawas dan Direksi, yang diadakan setiap bulan sebagai forum untuk membahas perkembangan program, tindak lanjut rekomendasi, serta penyelesaian isu strategis kelembagaan.
- 3) Diskusi Publik, yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan program dan kebijakan penyiaran publik.
- 4) Evaluasi Kinerja Direksi per Semester, sebagai mekanisme penilaian kinerja formal yang disertai rekomendasi dan tindak lanjut strategis untuk periode berikutnya.
- 5) Revisi Tata Kerja, dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi guna memperkuat sistem tata kelola yang adaptif dan efektif.

Sebagai langkah penguatan sistem perencanaan dan evaluasi, direncanakan pembentukan unit Perencanaan dan evaluasi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama LPP RRI.

Melalui sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis, LPP RRI diharapkan dapat mewujudkan tata kelola penyiaran publik yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan perubahan lingkungan strategis.

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNATIUS HENDRASMO

LAMPIRAN: MATRIKS KINERJA LPP RRI 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029		
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA										1.070.311	1.498.368	1.609.696	1.738.504	1.865.584		
Tujuan	1	Memberikan Layanan Siaran Berkualitas sesuai Fungsi Media yang Menginspirasi Seluruh Lapisan Masyarakat dengan Nilai Keindonesiaan untuk Mendukung Tercapainya Program Prioritas Nasional	Pusat													
Indikator Tujuan	1.1	Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden	Pusat	61.685	86.505	111.325	136.145	160.965	Konten							
	1.2	Indeks Tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden	Pusat	6	6,2	6,4	6,6	7	Indeks							
	1.3	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI	Pusat	70	75	80	85	90	Tingkat							
	1.4	Persentase Layanan Siaran yang melibatkan Komunitas Masyarakat	Pusat	10	12	14	16	18	%							
	1.5	Jangkauan Penyiaran Radio Teresterial per Populasi	Pusat	73	76	79	82	85	%							
	1.6	Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	Pusat	35	40	45	50	120	%							
	1.7	Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Teresterial RRI	Pusat	1	1	1	1	1	%							
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya Layanan Siaran yang Menunjang Capaian Program Prioritas Nasional	Pusat													
Indikator SS	1.1	Jumlah Konten Siaran Program Prioritas Presiden	Pusat	61.685	86.505	111.325	136.145	160.965	Konten							
	1.2	Indeks Tingkat Pengenalan atau Literasi Pendengar atas Siaran Program Prioritas Presiden	Pusat	6	6,2	6,4	6,6	7	Indeks							
	1.3	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Siaran RRI	Pusat	70	75	80	85	90	Tingkat							
	1.4	Persentase Layanan Siaran yang melibatkan Komunitas Masyarakat	Pusat	10	12	14	16	18	%							
PROGRAM	Penyiaran Publik									120.666	301.258	357.859	447.769	534.787		
Sasaran Program	1	Meningkatnya Kualitas Produksi dan Distribusi Konten	Pusat													
	1.1	Jumlah Satker yang Memperoleh Kriteria "Baik" Untuk Indeks Kualitas Paket Produksi Konten (Siaran/Berita)	Pusat	45	50	55	60	65	Jumlah Satker							
	1.2	Jumlah Inovasi Produk Siaran	Pusat	3	3	4	4	5	Program							
	1.3	Jumlah Penghargaan Penyiaran	Pusat	150	152	155	157	160	Penghargaan							
	1.4	Peringkat Portal Berita Nasional	Pusat	25	24	23	22	21	Peringkat							
	1.5	Jumlah Kerjasama Nasional dan Internasional	Pusat	15	20	25	30	35	Kerjasama							

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator SK	1.1	Jumlah Produksi Siaran untuk mendukung Second Track Diplomacy dengan Fokus pada 6 Tema mengacu Program Prioritas Presiden	Satker	220	220	231	242	253	Paket Siaran						Stasiun Siaran Luar Negeri
	1.2	Jumlah Jam Siaran Bahasa Inggris Live sesuai dengan Prioritas Presiden	Satker	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	Jam Siar						
	1.3	Jumlah Paket Siaran 8 Bahasa Internasional mengacu pada Prioritas Presiden	Satker	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	Paket Siaran						
	1.4	Indeks Kualitas Konten Produksi Siaran	Satker	75	80	82.5	85	88.5	Indeks						
	1.5	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	Satker	80	80	83	86	90	Indeks						
	1.6	Persentase Konten yang didistribusikan secara digital	Satker	100	100	100	100	100	Persentase						
	1.7	Jumlah Produksi Berita	Satker	1680	1825	1825	1825	1825	Berita						
Output	1	BMA. Data dan Informasi Publik	Satker							2.253	0	0	0	0	
	1.1	001 Pengembangan Program Produksi Siaran Luar Negeri Sebagai Media Diplomasi Bangsa	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	2.122	0	0	0	0	
	1.2	U01 Program Siaran Dialog Interaktif di dalam Studio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	49	0	0	0	0	
	1.3	U02 Program Buletin Berita	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	10	0	0	0	0	
	1.4	U03 Program Feature	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	9	0	0	0	0	
	1.5	U04 Program Siaran Langsung Reportase	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	23	0	0	0	0	
	1.6	U05 Program Produksi Komentar	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	6	0	0	0	0	
	1.7	U06 Program Produksi Kaleidoskop	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	20	0	0	0	0	
	1.8	U07 Program Produksi Filler	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	4	0	0	0	0	
	1.10	U08 Program Siaran Wawancara	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	7	0	0	0	0	
Output	2	OMA. Data dan Informasi Publik	Satker							885	5.827	5.985	6.144	6.326	
	2.1	001 Layanan Siaran Multiplatform Siaran Luar Negeri	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	740	0	0	0	0	
	2.2	002 Layanan Konten Digital	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	145	0	0	0	0	
	2.3	003 INDONESIA IS ME	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	500	520	530	550	
	2.4	004 Podcast (Ekonomi Digital)	Satker	0	24	24	24	24	Layanan	0	145	150	152	155	
	2.5	005 Mitigasi Bencana	Satker	0	52	52	52	52	Layanan	0	240	250	270	300	
	2.6	006 Layanan Siaran Informasi Budaya dan Pariwisata	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	700	717	735	753	

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.7	007 Layanan Siaran Informasi Ekonomi, Perdagangan dan Investasi	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	760	779	798	818	Stasiun Siaran Luar Negeri
	2.8	008 Layanan Siaran Informasi tentang Reputasi Indonesia	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	770	789	808	829	
	2.9	009 Layanan Siaran informasi Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	1.242	1.273	1.304	1.337	
	2.10	010 Layanan Siaran Informasi Polhukam terkait Isu Internasional	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	700	717	735	753	
	2.11	011 Layanan Siaran Informasi Jejaring Lembaga dan Diaspora	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	770	789	808	829	
Kegiatan	3	5145. Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional yang Berkualitas	Satker							54.888	59.851	66.618	88.316	113.328	Satuan Kerja
Sasaran Kegiatan	1	Terselenggaranya Penyiaran Lokal, Regional	Satker												
Indikator SK	1.1	Persentase Konten Siaran yang Menunjang Program Prioritas Presiden	Satker	100	100	100	100	100	%						
	1.2	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dilibatkan dalam Siaran RRI	Satker	36.135	36.135	36.135	36.135	36.135	Kelompok Masyarakat						
	1.3	Jumlah Produksi Berita Radio	Satker	96.480	96.480	96.480	96.480	96.480	Berita						
	1.4	Jumlah Minimal Berita Online yang Diproduksi	Satker	647.760	680.148	714.155	749.863	787.356	Berita						
	1.5	Indeks Kualitas Paket Produksi Konten Siaran	Pusat	75	80	82,5	85	88,5	Indeks						
	1.6	Persentase Produksi Siaran yang Didistribusikan secara Digital	Pusat	100	100	100	100	100	%						
	1.7	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	Pusat	80	80	83	86	90	Indeks						
	1.8	Jumlah Produksi Berita Ringan oleh Bidang LPU	Satker	34.840	34.840	34.840	34.840	34.840	Berita						
Output	1	OMA. Data dan Informasi Publik	Satker							13.674	51.336	57.847	73.285	90.024	
	1.1	001 Layanan Siaran Berisikan Nilai-Nilai Ke Indonesiaan	Satker	67	67	67	67	67	Layanan	0	23.230	25.939	30.559	35.575	
	1.2	002 Layanan Konten Digital Regional	Satker	67	0	0	0	0	Layanan	9.755	0	0	0	0	
	1.3	003 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	Satker	67	0	0	0	0	Layanan	3.919	0	0	0	0	
	1.4	004 Layanan Siaran dengan tema Menyuksekan Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis serta Pertahanan Keamanan Negara, Kemandirian Bangsa Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	7.011	7.977	10.594	13.612	
	1.5	005 Layanan Siaran dengan tema Industri Kreatif, Kewirausahaan, dan Agromaritim Industri	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	7.313	7.977	10.594	13.612	
	1.6	006 Layanan Siaran dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	6.911	7.977	10.594	13.612	
	1.7	007 Layanan Siaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	6.867	7.977	10.594	13.612	

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	2	BMA. Data dan Informasi Publik	Satker							41.213	8.515	8.770	15.033	23.304	Satuan Kerja
	2.1	001 Layanan Siaran Informasi dan Inspirasi	Satker	67	67	67	67	67	Layanan	3.030	4.029	4.150	7.275	11.403	
	2.2	002 Layanan Siaran Bernuansa Generasi Muda	Satker	67	67	67	67	67	Layanan	3.372	4.485	4.619	7.758	11.901	
	2.3	003 Layanan Siaran bermuatan budaya lokal	Satker	67	0	0	0	0	Layanan	6.620	0	0	0	0	
	2.4	U01 Program Siaran Dialog Interaktif didalam Studio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.816	0	0	0	0	
	2.5	U02 Program Siaran Dialog Interaktif diluar Studio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	4.278	0	0	0	0	
	2.6	U03 Program Produksi Spot	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	204	0	0	0	0	
	2.7	U04 Program Produksi Buletin Berita	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.117	0	0	0	0	
	2.8	U05 Program Siaran Produksi Feature	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	2.096	0	0	0	0	
	2.9	U06 Program Produksi Laporan Mendalam	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	2.814	0	0	0	0	
	2.10	U07 Program Siaran Langsung Reportase	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	3.659	0	0	0	0	
	2.11	U08 Program Produksi Majalah Udara	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	701	0	0	0	0	
	2.12	U09 Program Siaran Kuis	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	414	0	0	0	0	
	2.13	U10 Program Produksi Sandiwara Radio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.610	0	0	0	0	
	2.14	U11 Program Siaran Pergelaran	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	3.515	0	0	0	0	
	2.15	U12 Program Produksi Komentar	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	207	0	0	0	0	
	2.16	U13 Program Produksi Dokumenter	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.183	0	0	0	0	
	2.17	U14 Program Produksi Kaleidoskop	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.279	0	0	0	0	
	2.18	U15 Program Siaran Obrolan	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	1.816	0	0	0	0	
	2.19	U16 Program Produksi Filler	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	306	0	0	0	0	
	2.20	U17 Program Produksi Report On The Spot (ROS)	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	190	0	0	0	0	
	2.21	U19 Program Siaran Wawancara	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	952	0	0	0	0	
Kegiatan	4	5146. Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	Satker							6.790	9.509	11.224	13.447	16.376	Pusat Pemberitaan
Sasaran Kegiatan	1	Terselenggaranya Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia yang Berkualitas	Satker												
Indikator SK	1.1	Persentase Konten Siaran Yang Menunjang Program Prioritas Presiden	Satker	100	100	100	100	100	%						
	1.2	Jumlah Produksi Dialog Interaktif	Satker	104	156	156	156	156	Konten						
	1.3	Jumlah Produksi Berita Radio	Satker	21.900	23.725	25.550	27.375	29.200	Berita						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.4	Jumlah Minimal Berita Online yang di produksi	Satker	11.680	12.848	14.133	15.546	17.101	Berita						Pusat Pemberitaan
	1.5	Indeks Kualitas paket Produksi Konten Siaran	Satker	75	80	82,5	85	88,5	Indeks						
	1.6	Persentase Produksi Siaran yang didistribusikan secara digital	Satker	100	100	100	100	100	Persentase						
	1.7	Indeks Kualitas Program Siaran Unggulan	Satker	80	80	82,5	85	87,5	Indeks						
Output	1	BMA. Data dan Informasi Publik	Satker							2.728	2.796	2.866	2.938	3.011	
	1.1	001 Layanan Pengelolaan Media Online Pro - 3	Satker	1	1	1	1	1	Layanan	163	163	171	175	180	
	1.2	002 Program Siaran Pemberitaan Jaringan Nasional	Satker	1	1	1	1	1	Layanan	2.437	2.629	2.695	2.762	2.831	
	1.3	003 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	36	0	0	0	0	
	1.4	004 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	22	0	0	0	0	
	1.5	U03 Program Produksi Spot	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	14	0	0	0	0	
	1.6	U07 Program Siaran Langsung Reportase	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	20	0	0	0	0	
	1.7	U10 Program Produksi Komentar	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	23	0	0	0	0	
	1.8	U14 Program Produksi Filler	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	9	0	0	0	0	
Output	2	QMA. Data dan Informasi Publik	Satker							4.061	6.712	8.357	10.509	13.364	
	2.1	001 Layanan Siaran Pemberitaan Sektor Prioritas Berbasis Multiplatform	Satker	1	0	0	0	0	Layanan	3.916	0	0	0	0	
	2.2	002 Layanan Siaran Berisikan Nilai-Nilai Ke Indonesiaan	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	903	1.174	1.527	1.985	
	2.3	003 Podcast (Ekonomi Digital)	Satker	24	24	35	45	50	Layanan	145	1.431	1.493	1.585	1.763	
	2.4	004 Layanan Siaran dengan tema menyukseskan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis serta Pertahanan Keamanan Negara, Kemandirian Bangsa energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	952	1.237	1.608	2.091	
	2.5	005 Layanan Siaran dengan tema Industri Kreatif, Kewirausahaan, dan Agromaritim Industri	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	1.148	1.492	1.940	2.522	
	2.6	006 Layanan Siaran dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	1.265	1.644	2.138	2.779	
	2.7	007 Layanan Siaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	1.011	1.314	1.709	2.221	

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya Jangkauan Layanan Siaran Radio dan Penguatan Platform Digital	Pusat												
Indikator SS	2.1	Jangkauan Penyiaran Radio Teresterial per Populasi	Pusat	73	76	79	82	85	%						
	2.2	Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	Pusat	35	40	45	50	120	%						
	2.3	Persentase Peningkatan Pendengar Siaran Teresterial RRI	Pusat	1	1	1	1	1	%						
Sasaran Program	3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penyiaran	Pusat												
Indikator Program	3.1	Nilai Keamanan Sistem Aplikasi RRI	Pusat	3	3,2	2,35	3,5	3,65	Nilai						
	3.2	Persentase Optimalisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Penyiaran	Pusat	80	85	90	93	95	%						
	3.3	Persentase Kabupaten/Kota yang Blankspot Siaran Teresterial RRI	Pusat	30	28	25	22	20	%						
Kegiatan	5	5141. Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru	Pusat							35.164	187.309	230.509	281.033	316.882	
Sasaran Kegiatan	1	Tersedianya Infrastruktur Penyiaran Radio dan Pengembangan Teknologi Media Baru	Pusat												Direktorat Teknologi Media Baru
Indikator SK	1.1	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Infrastruktur Siaran Teresterial	Pusat	46	60	70	80	90	%						
	1.2	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Infrastruktur Siaran Digital	Pusat	36	63	72	81	90	%						
	1.3	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses SPBE	Pusat	63	63	72	81	90	%						
	1.4	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Pemancar	Pusat	25	40	55	70	85	Kegiatan						
	1.5	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Studio	Pusat	5	15	24	32	45	Kegiatan						
	1.6	Laporan Monitoring Kondisi Peralatan Teknik Pendukung Siaran	Pusat	4	4	4	4	4	Laporan						
	1.7	Laporan Monitoring Jaringan	Pusat	4	4	4	4	4	Laporan						
	1.8	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jaringan dan IT	Pusat	6	12	15	18	22	Kegiatan						
	1.9	Jumlah Pengadaan Pemancar	Pusat	9	20	31	42	53	Unit						
	1.10	Jumlah Lisensi dan Pengembangan Software dan Aplikasi	Pusat	12	15	16	16	16	Unit						
	1.11	Jumlah Pengadaan Peralatan Infrastruktur Penyiaran	Pusat	40	49	75	85	93	Unit						
	1.12	Pertumbuhan Jumlah Kepemilikan Izin Siar Aktif	Pusat	560	580	611	653	703	Izin Siar						
	1.13	Jumlah Pengadaan User Aplikasi Coverage Area Prediction	Pusat	1	2	2	-	-	Unit						
	1.14	Jumlah Layanan Internet Data Center dan Kantor Pusat	Pusat	10	15	20	25	30	Mbps						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	2	Terselenggaranya Optimalisasi Performa Layanan Siaran Satuan Kerja	Satker												Direktorat Teknologi Media Baru
Indikator SK	2.1	Persentase Performa Pemancar	Satker	75	77	79	82	85	%						
	2.2	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Teknik	Satker	276	276	276	276	276	Kegiatan						
	2.3	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Antena	Satker	134	134	134	134	134	Kegiatan						
Output	1	ABO. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Pusat							7.314	4.616	5.659	6.675	7.533	
	1.1	001 Kebijakan Teknologi dan Media Baru Penyiaran Radio	Pusat	58	69	80	93	105	Dokumen	7.314	4.616	5.659	6.675	7.533	
Output	2	RAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat							27.849	148.136	187.140	233.487	265.311	
	2.1	001 Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana Teknik LPP RRI Prioritas Nasional	Pusat	50	114	130	149	165	Unit	27.849	148.136	187.140	233.487	265.311	
Output	3	RCL. OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat							0	34.556	37.709	40.869	44.038	
	3.1	001 Revitalisasi Perangkat Siaran	Pusat	0	514	539	565	593	Unit	0	34.556	37.709	40.869	44.038	
Sasaran Program	4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Promosi Program Siaran yang Selaras dengan Program Prioritas Presiden	Pusat												Direktorat Layanan Pengembangan Usaha
Indikator Program	4.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Pusat	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	Indeks						
	4.2	Indeks Brand Image	Pusat	4	4.1	4.2	4.3	4.4	Indeks						
	4.3	Penerimaan PNBPFungsional	Pusat	26	28	31	34	37	Milyar Rupiah						
Kegiatan	6	5143. Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	Pusat							13.819	30.910	33.777	47.699	69.159	Direktorat Layanan Pengembangan Usaha
Sasaran Kegiatan	1	Terselenggaranya Layanan dan Pengembangan Usaha	Pusat												
Indikator SK	1.1	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Komunikasi Publik yang Terpenuhi	Pusat	100	100	100	100	100	%						
	1.2	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Layanan Usaha yang Terpenuhi	Pusat	100	100	100	100	100	%						
	1.3	Persentase Dokumen Kebijakan Bisnis Proses Pengembangan Usaha yang Terpenuhi	Pusat	100	100	100	100	100	%						
	1.4	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Kebijakan di Seluruh Satker	Pusat	4	4	4	4	4	Laporan						
	1.5	Jumlah Kegiatan Layanan Usaha	Pusat	2	3	4	5	5	Kegiatan						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Pusat	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	Indeks						Direktorat Layanan Pengembangan Usaha
	1.7	Indeks Brand Image	Pusat	4	4.1	4.2	4.3	4.4	Skala Likert						
Output	1	AEC. Kerjasama	Pusat							777	781	1.027	1.181	1.359	
	1.1	001 Kebijakan Bisnis Proses Komunikasi Publik, Layanan Usaha dan Pengembangan Usaha	Pusat	4	4	4	4	4	Kebijakan	777	781	1.027	1.181	1.359	
Output	2	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Pusat							4.079	0	0	0	0	
	2.1	001 Layanan Penyelenggaraan Agenda Tahunan Nasional Berbasis Multiplatform	Pusat	2	0	0	0	0	Kebijakan	4.079	0	0	0	0	
Output	3	OAH. Pelayanan Publik Lainnya	Pusat							0	6.415	7.248	8.335	9.586	
	3.1	001 Layanan Event Penyiaran dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Pusat	0	1	2	3	4	Layanan	0	2.994	5.394	6.203	7.314	
	3.2	002 Layanan Event Penyiaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan	Pusat	0	2	1	2	2	Layanan	0	3.412	1.853	2.131	2.451	
Output	4	BMB. Promosi dan Publikasi Multiplatform	Pusat							1.401	0	0	0	0	
	4.1	001 Promosi dan Publikasi Multiplatform	Pusat	1	0	0	0	0	Layanan	1.401	0	0	0	0	Stasiun Siaran Luar Negeri
Sasaran Kegiatan	2	Terselenggaranya Peningkatan Brand Communication	Satker												
Indikator SK	2.1	Indeks Brand Image	Satker	4	4	4.1	4.2	4.3	Indeks						
	2.2	Jumlah Kerjasama dengan stakeholder untuk dukungan program	Satker	4	4	4	4	4	Kerjasama						
	2.3	Jumlah Kegiatan Promosi	Satker	3	3	3	3	3	Kegiatan						
	2.4	Indeks Kualitas Promosi	Satker	80	82	85	87	90	Indeks						Satuan Kerja
Sasaran Kegiatan	3	Terselenggaranya Peningkatan Brand Communication	Satker												
Indikator SK	3.1	Penerimaan PNBP Fungsional	Satker	26	28	31	34	37	Milyar Rupiah						
	3.2	Indeks Brand Image	Satker	4	4.1	4.2	4.3	4.4	Skala Likert						
	3.3	Jumlah Kerjasama dengan Stakeholder untuk Dukungan Program	Satker	3216	3216	3216	3216	3216	Kerjasama						
	3.4	Jumlah Kegiatan Promosi	Satker	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	Kegiatan						Satuan Kerja
	3.5	Indeks Kualitas Promosi	Satker	80	80	83	86	90	Indeks						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	1	AEC. Kerjasama	Satker							7.561	3.613	4.370	6.212	11.938	Satuan Kerja
	1.1	001 Layanan Pengembangan Usaha, Peran Humas dan Branding Satker Daerah	Satker	67	67	67	67	67	Layanan	6.576	3.613	4.370	6.212	11.938	
	1.2	002 Layanan Publik	Satker	67	0	0	0	0	Layanan	521	0	0	0	0	
	1.3	003 Layanan Pengembangan Usaha	Satker	67	0	0	0	0	Layanan	464	0	0	0	0	
Output	2	QAH. Pelayanan Publik Lainnya	Satker							0	20.100	21.130	31.969	46.275	
	2.1	001 Layanan Event Penyiaran dengan Tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesenian, Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	10.050	10.565	15.984	23.079	
	2.2	002 Layanan Event Penyiaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan	Satker	0	67	67	67	67	Layanan	0	10.050	10.565	15.984	23.196	
Sasaran Kegiatan	4	Terselenggaranya Peningkatan Brand Communication	Satker												Pusat Pemberitaan
Indikator SK	4.1	Indeks Brand Image	Satker	4	4	4,1	4,2	4,3	Indeks						
	4.2	Jumlah Kerjasama dengan stakeholder untuk dukungan program	Satker	4	4	4	4	4	Kerjasama						
	4.3	Jumlah Kegiatan Promosi	Satker	3	3	3	3	3	Kegiatan						
	4.4	Indeks Kualitas Promosi	Satker	80	82	85	87	90	Indeks						
Tujuan	2	Meningkatkan Tata Kelola LPP RRI sesuai Prinsip Good Public Governance	Pusat												Pusat Pemberitaan
Indikator Tujuan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	Pusat	80	82	84	86	90	Indeks						
Sasaran Strategis	3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Manajemen LPP RRI yang Dinamis, Transparan, Akuntabel, dan Adaptif	Pusat												
Indikator SS	3.1	Nilai Reformasi Birokrasi	Pusat	80	82	84	86	90	Indeks						
PROGRAM	Dukungan Manajemen									949.645	1.197.109	1.251.836	1.290.735	1.330.797	
Sasaran Program	5	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan LPP RRI yang Responsif, Efektif, Efisien, Adaptif, Kolaboratif dan Berintegritas serta Akuntabel dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	Pusat												
Indikator SP	5.1	Skor Hasil Evaluasi Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penerapan Sistem Kerja	Pusat	P-5	P-5	P-5	P-5	P-5	Peringkat						
	5.2	Jumlah Satuan Kerja yang Berpredikat ZI WBK/WBBM	Pusat	5	5	5	5	5	Satker						
	5.3	Tingkat Maturitas SPIP LPP RRI	Pusat	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indeks						
	5.4	Indeks Sistem Merit	Pusat	290	305	320	335	350	Nilai						
	5.5	Indeks BerAKHLAK	Pusat	75	77	79	81	83	%						
	5.6	Survei Penilaian Integritas LPP RRI	Pusat	65	75	80	85	85	Nilai						
	5.7	Indeks Pengelolaan Aset	Pusat	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	Indeks						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
	5.8	Indeks Reformasi Hukum	Pusat	98,72	98,75	98,75	98,78	99	Nilai						
	5.9	Tingkat Digitalisasi Arsip	Pusat	72	75	77	79	81	Nilai						
	5.10	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Pusat	72	75	78	81	84	Nilai						
Kegiatan	7	5137. Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum	Pusat							83.906	88.062	91.144	94.335	97.636	Direktorat SDM dan Umum
Sasaran Kegiatan	1	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	1.1	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat dan Satuan Kerja	Pusat	3,8	3,9	4	4,1	4,2	Indeks						
Sasaran Kegiatan	2	Terselenggaranya Pengelolaan SDM melalui Penerapan Sistem Merit	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	2.1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Manajemen Kpegawain	Pusat	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Tingkat Kepuasan						
Sasaran Kegiatan	3	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Umum LPP RRI	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	3.1	Persentase Pemantauan atas Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Pusat	100	100	100	100	100	%						
Sasaran Kegiatan	4	Terselenggaranya Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan LPP RRI	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	4.1	Persentase Pemberian Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien	Pusat	100	100	100	100	100	%						
Sasaran Kegiatan	5	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan dan Persuratan LPP RRI	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	5.1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kearsipan dan Persuratan	Pusat	72	75	77	79	81	Tingkat Kepuasan						
Sasaran Kegiatan	6	Terselenggaranya Tata Kelola Manajemen Kinerja Satuan Kerja	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	6.1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana Pengadaan	Pusat	95	95	97	97	98	%						
Sasaran Kegiatan	7	Terselenggaranya Pelayanan Keprotokolan LPP RRI	Pusat												
<i>Indikator SK</i>	7.1	Tingkat Kepuasan Layanan Keprotokolan Sesuai dengan Pedoman Keprotokolan	Pusat	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Tingkat Kepuasan						
Sasaran Kegiatan	8	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja	Satker												
<i>Indikator SK</i>	8.1	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Satker	100	100	100	100	100	%						
	8.2	Persentase Utilisasi BMN	Satker	≥99	≥99	≥99	≥99	≥99	%						
	8.3	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Satker	100	100	100	100	100	%						
	8.4	Nilai Maturitas SPIP Satuan kerja	Satker	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indeks						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	1	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pusat							6.678	5.787	5.989	6.199	6.416	Direktorat SDM dan Umum
	1.1	956 Layanan BMN	Pusat	0	1	1	1	1	Layanan	0	908	940	973	1.007	
	1.2	957 Layanan Hukum	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	637	113	116	121	125	
	1.3	959 Layanan Protokoler	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	2.130	2.144	2.219	2.297	2.377	
	1.4	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	2	2	2	2	2	Layanan	3.032	2.219	2.297	2.377	2.460	
	1.5	962 Layanan Umum	Pusat	1	0	0	0	0	Layanan	878	0	0	0	0	
	1.6	969 Layanan Bantuan Hukum	Pusat	0	1	1	1	1	Layanan	0	401	415	430	445	
Output	2	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pusat							77.227	79.930	82.727	85.623	88.619	
	2.1	951 Layanan Sarana Internal	Pusat	18	1	1	1	1	Layanan	39.584	31.834	42.403	43.888	45.424	
	2.2	971 Layanan Prasarana Internal	Pusat	2	1	1	1	1	Layanan	37.642	48.095	40.323	41.734	43.195	
Output	3	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Pusat							0	2.202	2.279	2.359	2.442	Pusbangkom Penylaran Radio
	3.1	954 Layanan Manajemen SDM	Pusat	0	3	3	3	3	Layanan	0	2.202	2.279	2.359	2.442	
Output	4	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Pusat							0	142	147	152	157	
	4.1	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	0	1	1	1	1	Layanan	0	61	63	65	67	
	4.2	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	0	1	1	1	1	Layanan	0	81	83	86	89	
Kegiatan	8	5139 – Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	Satker							83.906	88.062	91.144	94.335	97.636	
Sasaran Kegiatan	1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi SDM	Satker												
Indikator SK	1.1	Persentase Pelatihan Administratif dan Media yang Diselenggarakan Sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Satker	100	100	100	100	100	%						
	1.2	Indeks Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Satker	4	4	4,1	4,1	4,2	Indeks						
	1.3	Indeks Kualitas Pengajar Pelatihan	Satker	4	4	4,1	4,1	4,2	Indeks						
	1.4	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri di Satuan Kerja	Satker	4	4	4,1	4,2	4,3	Indeks						
	1.5	Persentase Peserta Pelatihan yang Dinyatakan Kompeten pada Pelatihan Administratif dan Media	Satker	90	90	91	92	93	%						

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	1	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Satker							6.019	6.381	6.763	7.169	7.599	Pusbangkom Penyiaran Radio
	1.1	954 Layanan Manajemen SDM	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	318	337	357	378	
	1.2	955 Layanan Manajemen SDM Sertifikasi	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	450	477	506	536	
	1.3	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Satker	1	1	1	1	1	Layanan	6.019	3.574	3.789	4.016	4.257	
	1.4	997 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Siaran	Satker	0	1	1	1	1	Layanan	0	2.037	2.159	2.289	2.426	
Sasaran Program	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Lembaga	Pusat												
Indikator SP	6.1	Nilai IKPA	Pusat	95	95	95	96	96	Nilai						
	6.2	Indeks Maturitas Manajemen Risiko	Pusat	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	Indeks						
	6.3	Nilai Kinerja Anggaran	Pusat	95	95	95	96	96	Nilai						
	6.4	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan	Pusat	95	95	96	96	97	Nilai						
	6.5	Nilai Evaluasi Kinerja Pendukung Prioritas Nasional	Pusat	100	100	100	100	100	Nilai						
	6.6	Nilai AKIP	Pusat	70	72	73	74	75	Nilai						
	6.7	Opini BPK	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
	6.8	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Pusat	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Indeks						
Kegiatan	9	5136 – Pengelolaan Keuangan LPP RRI	Pusat dan Satker							855.660	1.097.607	1.147.869	1.182.172	1.217.502	Direktorat Keuangan
Sasaran Kegiatan	1	Terselenggaranya Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Perbendaharaan, Penatausahaan PNB, Pelaporan, Manajemen Risiko dan Anti Korupsi	Pusat												
Indikator SK	1.1	Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	Pusat	100	100	100	100	100	Nilai						
	1.2	Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Pusat	100	100	100	100	100	Nilai						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator/Output		Lokasi	Target						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator SK	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	Pusat	85	86	87	88	89	%						Satuan Pengawasan Intern
	1.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pemeriksaan SPI	Pusat	90	91	92	93	94	%						
	1.3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Konsultansi sesuai PKPT	Pusat	80	85	90	95	100	%						
	1.4	Nilai Kapabilitas APIP	Pusat	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29	Nilai						
Sasaran Kegiatan	2	Mendorong Perbaikan Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko	Pusat												
Indikator SK	2.1	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Skor SPIP Satuan Kerja	Pusat	90	95	100	100	100	%						
	2.2	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Skor AKIP Satuan Kerja	Pusat	90	95	100	100	100	%						
	2.3	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang Meningkatkan Penerapan Manajmen Risiko	Pusat	90	95	100	100	100	%						
Output	1	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Pusat							4.058	5.058	6.058	7.058	8.058	
	1.1	965 Layanan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	4.058	5.058	6.058	7.058	8.058	

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNATIUS HENDRASMO

**LAMPIRAN: MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH
TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 003 - Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplatform 5141.RAN.001 Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Teknik Prioritas Nasional	Jangkauan Penyiaran Radio Terrestrial per Populasi	73%	76%	79%	82%	85%	27.849	148.136	187.140	233.488	265.311						27.849	148.136	187.140	233.488	265.311
01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 003 - Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplatform 5141.RCL.001 Revitalisasi Perangkat Siaran							0	34.556	37.709	40.870	44.038						0	34.556	37.709	40.870	44.038
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.001 Layanan Siaran Komunitas Khusus	Pertumbuh-an Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	35%	40%	45%	50%	120%	620	0	0	0	0						620	0	0	0	0
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital							135										135				

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.002 Layanan Siaran Sektor Prioritas																					
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.003 Layanan Siaran Unggulan Olahraga							81										81				
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.004 Layanan Siaran Teresterial dan Digital Penguatan Ideologi Pancasila								246	254	261	269							246	254	261	269
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.005 Program Informasi Pelayanan Kesehatan dan								225	232	239	246							225	232	239	246

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Gizi melalui Program Makan Bergizi pada usia sekolah																					
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5142.QMA.006 Program Prestasi Olahraga								177	182	188	193							177	182	188	193
01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka 5143.QAH.001 Layanan Event Penyiaran dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas								2.994	5.395	6.204	7.134							2.994	5.395	6.204	7.134
01 - Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan								3.421	1.854	2.132	2.452							3.421	1.854	2.132	2.452

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01 - Peningkatan Literasi Keagamaan 5143.QAH.002 Layanan Event Penyiaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan																					
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5144.QMA.001 Layanan Siaran Multiplatform Sasaran Luar Negeri							740										740				
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5144.QMA.002 Layanan Konten Digital							146										146				
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5144.QMA.003 INDONESIA IS ME								500	520	530	550						500	520	530	550	500

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5144.QMA.004 Podcast (Ekonomi Digital)								146	150	152	155							146	150	152	155
02 - Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana 02 - Pelayanan Peringatan Dini Multiancam Bencana 5144.QMA.005 Mitigasi Bencana								240	250	270	300							240	250	270	300
07 - Pengembangan Diplomasi Kebudayaan 02 - Promosi dan Pertukaran Budaya 5144.QMA.006 Layanan Siaran Informasi Budaya dan Pariwisata								700	718	735	754							700	718	735	754
04 - Penguatan Diplomasi Ekonomi 01 - Diplomasi Ekonomi yang adaptif 5144.QMA.007								760	779	798	818							760	779	798	818

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Siaran Informasi, Perdagangan dan Investasi																					
02 - Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia 03 - Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif 5144.QMA.008 Layanan Siaran Informasi tentang Reputasi Indonesia								770	789	809	829							770	789	809	829
02 - Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif 01 - Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan 5144.QMA.009 Layanan Siaran informasi Perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran								1.242	1.273	1.305	1.337							1.242	1.273	1.305	1.337

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02 - Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia 01 - Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia 5144.QMA.010 Layanan Siaran Informasi Polhukam terkait Isu Internasional								700	718	735	754							700	718	735	754
02 - Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia 01 - Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama								770	789	809	829							770	789	809	829

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia 5144.QMA.010 Layanan Siaran Informasi Jejaring Lembaga dan Diaspora																					
01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka 5145.QAH.001 Layanan Event Penyiaran dengan Tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas								10.050	10.565	15.985	23.080							10.050	10.565	15.985	23.080
01 - Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan 01 - Peningkatan Literasi Keagamaan 5145.QAH.002 Layanan Event Penyiaran dengan								10.050	10.565	15.985	23.196							10.050	10.565	15.985	23.196

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan																					
01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) 03 - Penyehatan Media Arus Utama 5145.QMA.001 Layanan Siaran Berisikan Nilai-Nilai Ke Indonesiaan								23.231	25.940	30.559	35.576							23.231	25.940	30.559	35.576
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5145.QMA.002 Layanan konten digital regional							9.755										9.755				
02 - Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana 02 - Pelayanan Peringatan Dini Multiancam Bencana 5145.QMA.003 Program Produksi Siaran Tanggap							3.920										3.920				

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Bencana Prioritas Nasional																					
01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) 03 - Penyehatan Media Arus Utama 5145.QMA.004 Layanan Siaran dengan tema Menyukkseskan Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis serta Pertahanan Keamanan Negara, Kemandirian Bangsa Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru								7.012	7.977	10.594	13.612							7.012	7.977	10.594	13.612
01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) 03 - Penyehatan Media Arus Utama 5145.QMA.005 Layanan Siaran dengan tema Industri Kreatif, Kewirausahaan, dan Agromaritim Industri								7.314	7.977	10.594	13.612							7.314	7.977	10.594	13.612

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka 5145.QMA.006 Layanan Siaran dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesenjangan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas								6.912	7.977	10.943	13.612							6.912	7.977	10.943	13.612
02 - Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya 02 - Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal 5145.QMA.007 Layanan Siaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan								6.868	7.977	10.594	13.612							6.868	7.977	10.594	13.612
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5146.QMA.001							3.916										3.916				

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Siaran Pemberitaan Sektor Prioritas Berbasis Multiplatform																					
01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) 03 - Penyehatan Media Arus Utama 5146.QMA.002 Layanan Siaran Berisikan Nilai-Nilai Ke Indonesiaan								904	1.175	1.527	1.985							904	1.175	1.527	1.985
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5146.QMA.003 Podcast (Ekonomi Digital)							146	1.432	1.493	1.585	1.763						146	1.432	1.493	1.585	1.763
002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 006 - Pengembangan Media Digital 5146.QMA.004 Layanan Siaran								952	1.238	1.609	2.092							952	1.238	1.609	2.092

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
dengan tema menyukseskan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis serta Pertahanan Keamanan Negara, Kemandirian Bangsa energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.																					
02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif 01 - Pemanfaatan Teknologi. Riset. dan Inovasi 5146.QMA.005 Layanan Siaran dengan tema Industri Kreatif, Kewirausahaan, dan Agromaritim industri								1.148	1.493	1.941	2.523							1.148	1.493	1.941	2.523
01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka 5146.QMA.006 Layanan Siaran dengan tema								1.265	1.645	2.138	2.780							1.265	1.645	2.138	2.780

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender, Pemuda dan Penyandang Disabilitas																					
01 - Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan 01 - Peningkatan Literasi Keagamaan 5146.QMA.007 Layanan Siaran dengan Tema Lingkungan, Budaya, dan Keagamaan								1.011	1.315	1.709	2.222							1.011	1.315	1.709	2.222

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNATIUS HENDRASMO

LAMPIRAN: MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk mengakomodir perkembangan digitalisasi penyiaran dan perkembangan kebutuhan lembaga	1. Menyesuaikan kerangka hukum penyiaran dengan perkembangan teknologi digital, yang saat ini belum sepenuhnya diakomodasi oleh UU No. 32 Tahun 2002. Transformasi digital menuntut adanya pengaturan baru yang mencakup penyiaran berbasis internet, satelit, streaming, dan layanan on-demand sebagai bagian dari penyiaran publik. 2. Mendukung transformasi kelembagaan dan operasional RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, profesional, dan non-komersial dengan kemampuan beradaptasi terhadap ekosistem penyiaran digital. 3. Mendorong migrasi penyiaran radio dari analog ke digital secara bertahap, termasuk penyediaan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan edukasi publik agar masyarakat tetap mendapatkan akses informasi. 4. Menjamin efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan spektrum frekuensi radio, sejalan dengan kebijakan nasional dalam optimalisasi pemanfaatan spektrum untuk layanan digital. 5. Memperkuat posisi RRI dalam ekosistem penyiaran nasional sebagai penyedia konten publik yang inklusif, adaptif, dan aman secara digital, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, industri kreatif, dan penyedia layanan digital.	Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI	• LPP RRI • LPP TVRI • Kementerian Komunikasi dan Digital	Tahun 2028
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)	1. Mewujudkan integrasi kelembagaan media publik nasional dengan membentuk RTRI sebagai entitas penyiaran publik terpadu yang mencakup RRI dan TVRI. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, efisiensi operasional, serta konsistensi penyiaran publik di seluruh Indonesia. 2. Menyesuaikan arah transformasi kelembagaan penyiaran publik dengan perkembangan teknologi digital dan ekosistem multiplatform, termasuk penyiaran berbasis internet, layanan on-demand, dan kolaborasi dengan industri kreatif, sehingga RTRI tetap relevan dan kompetitif di era konvergensi media.	Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI	• LPP RRI • LPP RRI • LPP TVRI	Tahun 2029
3	Pembaharuan Peraturan Internal terkait seluruh pelaksanaan tugas fungsi di RRI dan Multiplatform. Yang mencakup diantaranya: • Pembentukan unit-unit yang berfokus pada digitalisasi konten, serta pusat data dan informasi • Pembentukan unit atau bagian khusus yang membidangi perencanaan, evaluasi dan manajemen risiko	1. Menyesuaikan struktur organisasi dan tata kelola RRI dengan tuntutan transformasi digital dan pengelolaan multiplatform. Regulasi internal yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembagian peran baru dalam pengelolaan perencanaan strategis, digitalisasi konten, serta tata kelola data dan informasi. Melalui pengembangan unit digitalisasi konten, RRI akan mampu mengintegrasikan berbagai layanan siaran dalam satu ekosistem multiplatform yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku audiens.	Dewan Direksi LPP RRI	• LPP RRI	Tahun 2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		2. Mendukung arah kebijakan nasional dalam Asta Cita, khususnya cita ke-6 tentang percepatan transformasi digital nasional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi. Regulasi internal ini akan memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional di bidang digitalisasi dan pelayanan publik adaptif. 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan melalui pembentukan unit khusus yang berfokus pada perencanaan, evaluasi, dan manajemen risiko agar proses perumusan kebijakan lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil (outcome-oriented). 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi melalui penerapan mekanisme manajemen risiko dan pemantauan kinerja yang terintegrasi, guna memastikan pelaksanaan program dan layanan publik sesuai prinsip good governance.			
4.	Penyusunan regulasi mengenai Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan RRI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Broadcasting	1. Memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi RRI sebagai Badan Layanan Umum (BLU) guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan produktif. 2. Mendukung penguatan peran RRI dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan transparan, termasuk optimalisasi aset dan kerja sama dengan mitra strategis tanpa meninggalkan karakteristik lembaga publik. 3. Mendukung peningkatan kompetensi SDM di bidang penyiaran, baik internal RRI maupun eksternal, melalui pengembangan lebih banyak skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri media, broadcasting digital, dan konten kreatif.	Direktur Utama dan Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRII	• LPP RRI • BNSP	Tahun 2029 (untuk BLU) Tahun 2026 (untuk LSP)

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNATIUS HENDRASMO